



# PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat diselesaikan dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 disusun untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4506/SEK/OT.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2024 dan sekaligus bentuk pertanggung jawaban Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 menggambarkan perkembangan dan hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini dibuat dengan harapan dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, 31 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.

Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
A. Profil Peradilan.....	1
B. Visi dan Misi.....	4
C. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan.....	4
D. Struktur Organisasi .....	6
<b>BAB II Perkara Di Peradilan Militer</b> .....	7
A. Keadaan Perkara di Peradilan Militer .....	8
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	8
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	9
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	9
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	10
B. Penyelesaian Perkara .....	11
1. Jumlah Sisa Perkara yang Di Putus.....	11
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.....	11
3. Jumlah Perkara Tingkat Pertama yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK.....	12
4. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	14
C. Capaian Prioritas Nasional .....	15
Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	15
<b>BAB III Sumber Daya Manusia</b> .....	18
A. Mutasi.....	41
B. Promosi .....	49
C. Pensiun .....	53
D. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) .....	55

<b>BAB IV</b>	<b>Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana Dan Teknologi Informasi</b>	77
A.	Pengelola Keuangan	77
B.	Pengelola Sarana dan Prasarana	120
C.	Pengelola Teknologi Informasi	155
<b>BAB V</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Publik</b>	182
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu	182
B.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	184
C.	Inovasi Pelayanan Publik	187
<b>BAB VI</b>	<b>Pengawasan</b>	246
A.	Internal	246
B.	Evaluasi	264
<b>BAB VI</b>	<b>Penutup</b>	274
A.	Kesimpulan	274
B.	Rekomendasi	274



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Profil Peradilan

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2004 tentang pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam Pasal 25 ayat (4) serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (Prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih bersdinas aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sesuai peraturan perundang – undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan Visi dan Misi sesuai dengan kebijakan yang telah di gariskan oleh Mahkamah Agung RI dalam terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meliputi - Jawa Timur, Sulawesi, Jayapura, NTT, Maluku dan Bali, yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) Pengadilan Militer yaitu :

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkedudukan di Sidoarjo
2. Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Madiun
3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkedudukan di Denpasar
4. Pengadilan Militer III-15 Kupang berkedudukan di Kupang
5. Pengadilan Militer III-16 Makassar berkedudukan di Makassar
6. Pengadilan Militer III-17 Manado berkedudukan di Manado
7. Pengadilan Militer III-18 Ambon berkedudukan di Ambon
8. Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkedudukan di Jayapura.

Tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama:
  - a. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
    - 1) Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas;
    - 2) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya berpangkat Mayor ke atas; dan
    - 3) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
  - b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer.
2. Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding;
3. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam Daerah hukumnya.

Tugas pokok Pengadilan Militer Tingkat Pertama diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; "Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
2. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya ' termasuk tingkat kepangkatan' Kapten ke bawah; dan
3. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer".

*Wilayah Yurisdiksi*

No	Satker	Tipe	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Dilmilti III Surabaya	A	Sidoarjo	Jatim, Sulawesi, Jayapura, NTT, Bali, Maluku
2.	Dilmil III-12 Surabaya	A	Sidoarjo	Surabaya
3.	Dilmil III-13 Madiun	B	Madiun	Madiun
4.	Dilmil III-14 Denpasar	A	Denpasar	Denpasar
5.	Dilmil III-15 Kupang	B	Kupang	Kupang
6.	Dilmil III-16 Makassar	A	Makassar	Sulawesi
7.	Dilmil III-17 Manado	A	Manado	Sulawesi
8.	Dilmil III-18 Ambon	A	Ambon	Maluku
9.	Dilmil III-19 Jayapura	A	Jayapura	Jayapura

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajaran di bawahnya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan selaku Pembina Personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2023 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya yaitu :

Memeriksa dan memutus pada Tingkat Pertama perkara pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Memeriksa dan memutus pada Tingkat Banding perkara pidana yang telah di putus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam daerah hukumnya yang di mintakan banding. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Melaksanakan Pengawasan dan Pengamatan di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Pelaksanaan tugas yang meliputi bidang Organisasi, Administrasi, Finansial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2024, telah dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada DIPA tahun 2024.

## B. Visi dan Misi.

Untuk menyatukan persepsi serta mengimplementasikan dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi, dilandasi dengan Visi dan Misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

### **VISI**

*“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang Agung”*

### **MISI**

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya. dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip

dalam bekerja, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki motto “

**TEKAD**”, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

**T: tangguh,**

**E : enerjik,**

**K: konsisten,**

**A: adil,**

**D: disiplin.**

## C. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

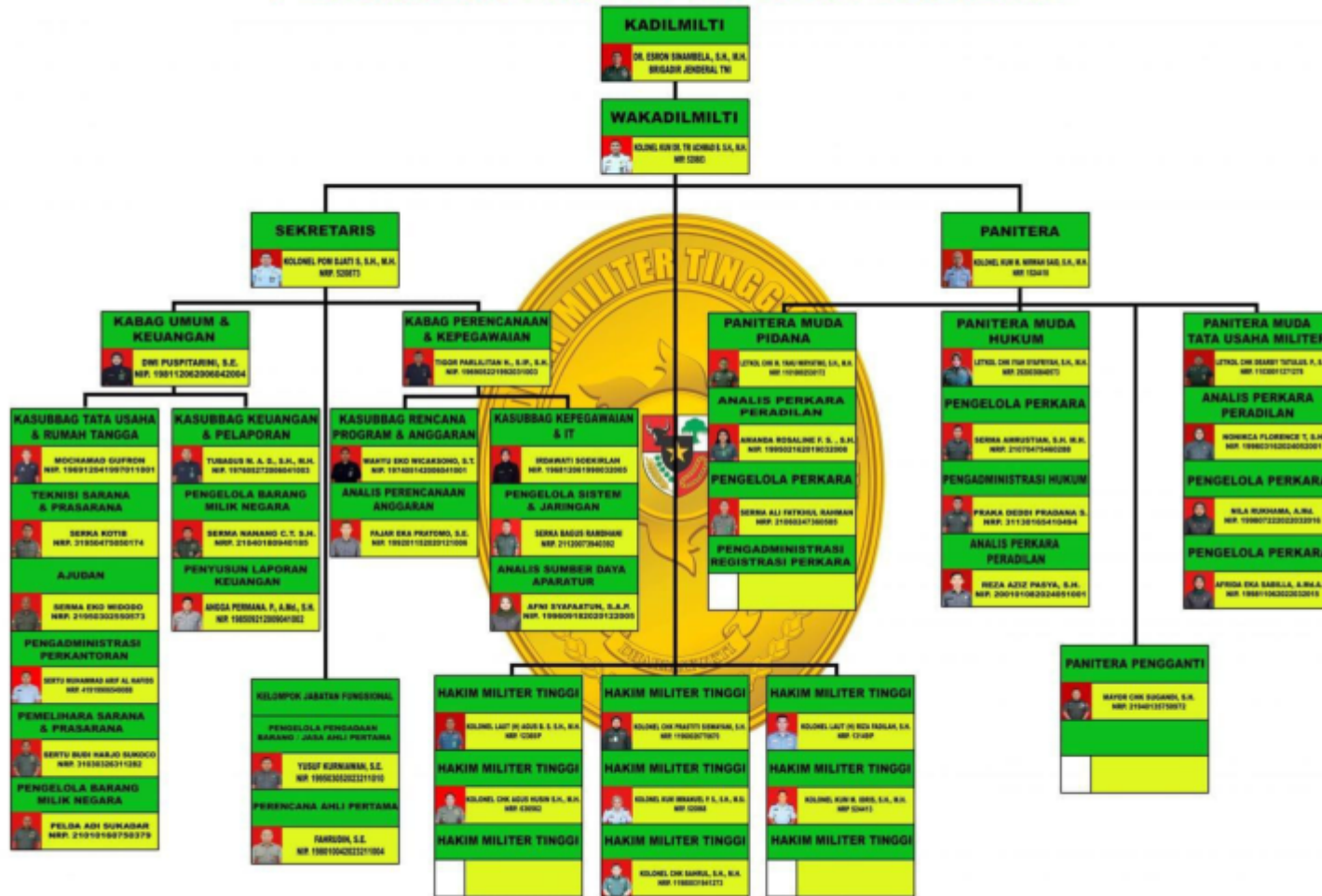
Sejalan dengan program *One Roof System* (Peradilan Satu Atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2024 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian usaha dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2024.

D. STRUKTUR ORGANISASI

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**





## BAB II

### PERKARA DI PERADILAN MILITER

Kewenangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan tanggal 9 Oktober 2018 bahwa yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah:

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkedudukan di Sidoarjo
2. Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Madiun
3. Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkedudukan di Denpasar
4. Pengadilan Militer III-15 Kupang berkedudukan di Kupang
5. Pengadilan Militer III-16 Makassar berkedudukan di Makassar
6. Pengadilan Militer III-17 Manado berkedudukan di Manado
7. Pengadilan Militer III-18 Ambon berkedudukan di Ambon
8. Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkedudukan Jayapura

Tugas pokok Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai kewenangan sebagai Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama yang Terdakwanya Prajurit TNI yang berpangkat Mayor ke atas, serta memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang berada dalam jajaran daerah hukumnya dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya juga memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Militer dalam jajaran daerah hukumnya.

**A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER**

**1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.**

Adapun keadaan perkara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Keadaan Perkara Satuan Kerja Wilayah Dilmilti III Surabaya**

No	Satker	Sisa tahun 2022	Masuk tahun 2023	Jumlah	Putus	Sisa	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dilmilti III Surabaya	1	27	28	27	1	96,43
2	Dilmil III -12 Surabaya	21	179	200	179	21	89,5
3	Dilmil III -13 Madiun	5	54	59	58	1	98
4	Dilmil III -14 Denpasar	0	52	52	52	0	100
5	Dilmil III -15 Kupang	0	29	29	29	0	100
6	Dilmil III -16 Makassar	7	117	124	94	30	76
7	Dilmil III -17 Manado	19	112	131	124	7	97
8	Dilmil III -18 Ambon	6	74	80	68	12	85
9	Dilmil III -19 Jayapura	11	424	435	406	29	93,3

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selain menangani perkara Tingkat Pertama juga menangani perkara Tingkat Banding, dengan keadaan perkara Tingkat Banding sebagai berikut :

sisa tahun 2023	10	perkara
perkara di terima selama tahun 2024	149	perkara
Jumlah	159	perkara
perkara diselesaikan pada tahun 2024	140	perkara
sisa tahun 2024	19	perkara
persentase penyelesaian perkara yang putus	88,05	%

**2. Keadaan perkara Tingkat Banding.**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara, dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding sejumlah 5 (lima) perkara, dengan rincian 5 (lima) berkas permohonan upaya hukum banding telah dikirim secara lengkap. Berkas beserta putusan banding yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Utama telah diterima kembali oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, berikut keadaan perkara upaya hukum banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya :

No.	Satker	Sisa Tahun 2023	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024	Jumlah	Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dilmilti III Surabaya	2	5	7	7	0
2.	Dilmil III-12 Surabaya	7	30	37	31	6
3.	Dilmil III -13 Madiun	2	14	16	13	3
4.	Dilmil III -14 Denpasar	3	15	18	15	3
5.	Dilmil III -15 Kupang	1	9	10	8	2
6.	Dilmil III -16 Makassar	8	13	21	21	0
7.	Dilmil III -17 Manado	2	16	18	16	2
8.	Dilmil III -18 Ambon	3	13	16	10	6
9.	Dilmil III -19 Jayapura	3	28	31	23	8

**3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara, dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 6 (enam) perkara, upaya hukum Kasasi tersebut atas Putusan Banding yang sudah diputus oleh Pengadilan Militer Utama sebanyak 4 (empat) perkara, dan putusan Perkara Tingkat Pertama yang amar putusannya bebas sebanyak 2 (dua) perkara, berikut keadaan perkara upaya hukum banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya :

No	Satker	Sisa tahun 2023	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Dilmilti III Surabaya	2	6	8	4	4
2.	Dilmil III-12 Surabaya	7	24	31	25	6
3.	Dilmil III -13 Madiun	7	12	19	12	7
4.	Dilmil III -14 Denpasar	2	9	11	9	2
5.	Dilmil III -15 Kupang	1	7	8	7	1
6.	Dilmil III -16 Makassar	5	13	18	17	1
7.	Dilmil III -17 Manado	9	10	19	17	2
8.	Dilmil III -18 Ambon	6	9	15	12	3
9.	Dilmil III -19 Jayapura	26	20	46	40	6

#### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara, pada tahun 2024 Pengadilan Milier Tinggi III Surabaya menerima 2 (dua) berkas permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali, dari permohonan tersebut terdapat 2 (dua) permohonan yang perkaranya diputus tahun 2005 dan tahun 2023, sehingga perkara yang mengajukan permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang perkaranya diputus Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2024 sejumlah nihil perkara, berikut keadaan perkara upaya hukum banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya :

No	Satker	Sisa tahun 2023	Perkara yang mengajukan upaya hukum PK tahun 2024	Jumlah	Putus	Sisa
1.	Dilmilti III Surabaya	2	1	3	2	1
2.	Dilmil III-12 Surabaya	1	3	4	4	0
3.	Dilmil III -13 Madiun	5	0	5	5	0
4.	Dilmil III -14 Denpasar	1	0	1	1	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	0	0	0	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	2	2	4	3	1
7.	Dilmil III -17 Manado	2	1	3	2	1
8.	Dilmil III -18 Ambon	5	3	8	1	7
9.	Dilmil III -19 Jayapura	4	4	8	4	4

**B. PENYELESAIAN PERKARA**

**1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.**

Sisa perkara yaitu perkara yang belum bisa diselesaikan pada tahun berjalan sehingga menjadi beban perkara ditahun berikutnya, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya di tahun 2024 memiliki sisa Tahun 2023, yang dapat diselesaikan di tahun 2024 dengan rincian berikut :

No	Satker	Sisa tahun 2022	Putus tahun 2023	Sisa perkara
1.	Dilmilti III Surabaya			
	Tingkat pertama	1	27	1
	Tingkat banding	10	140	19
2.	Dilmil III-12 Surabaya	21	179	21
3.	Dilmil III -13 Madiun	5	58	1
4.	Dilmil III -14 Denpasar	0	52	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	29	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	7	94	30
7.	Dilmil III -17 Manado	19	124	7
8.	Dilmil III -18 Ambon	6	62	12
9.	Dilmil III -19 Jayapura	11	406	29

**2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu.**

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Mendasari Surat Edaran tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	< 3 bulan	4 - 5 bulan	6 - 12 bulan	> 12 bulan
1.	Dilmilti III Surabaya				
	Tingkat Pertama	22	5	0	0
	Tingkat Banding	140	0	0	0
2.	Dilmil III-12 Surabaya	175	4	0	0
3.	Dilmil III -13 Madiun	50	8	0	0
4.	Dilmil III -14 Denpasar	52	0	0	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	29	0	0	0

6.	Dilmil III -16 Makassar	81	13	0	0
7.	Dilmil III -17 Manado	124	0	0	0
8.	Dilmil III -18 Ambon	55	13	0	0
9.	Dilmil III -19 Jayapura	353	50	3	0

**3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK.**

a. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 telah memutus Perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara, dari putusan tersebut terdapat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, berikut keadaan perkara yang telah diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya:

No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding
1.	Dilmilti III Surabaya	27	5	22
2.	Dilmil III-12 Surabaya	179	30	149
3.	Dilmil III -13 Madiun	58	14	44
4.	Dilmil III -14 Denpasar	52	15	37
5.	Dilmil III -15 Kupang	29	9	20
6.	Dilmil III -16 Makassar	94	21	73
7.	Dilmil III -17 Manado	131	18	113
8.	Dilmil III -18 Ambon	68	13	55
9.	Dilmil III -19 Jayapura	406	28	378

b. Putusan Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara, sehingga rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :



No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
1.	Dilmilti III Surabaya	27	6	21
2.	Dilmil III-12 Surabaya	179	24	155
3.	Dilmil III -13 Madiun	58	10	48
4.	Dilmil III -14 Denpasar	52	9	43
5.	Dilmil III -15 Kupang	29	7	22
6.	Dilmil III -16 Makassar	94	18	76
7.	Dilmil III -17 Manado	131	19	112
8.	Dilmil III -18 Ambon	68	9	59
9.	Dilmil III -19 Jayapura	406	20	386

c. Putusan Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya Hukum Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 telah memutus perkara Tingkat Pertama sejumlah 27 (dua puluh tujuh) perkara dan menerima Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung sejumlah 4 (empat) perkara dari putusan tersebut ada 2 (dua) perkara permohonan kasasi pada tahun 2023 dan 2 (dua) perkara permohonan kasasi pada tahun 2024 dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 1 (satu) perkara, sehingga rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta jajarannya sebagai berikut :

No	Satker	Perkara di Putus	Perkara yang mengajukan upaya hukum PK	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK
1.	Dilmilti III Surabaya	27	1	26
2.	Dilmil III-12 Surabaya	179	3	176
3.	Dilmil III -13 Madiun	58	0	58
4.	Dilmil III -14 Denpasar	52	0	0
5.	Dilmil III -15 Kupang	0	0	0
6.	Dilmil III -16 Makassar	94	4	90
7.	Dilmil III -17 Manado	131	3	127
8.	Dilmil III -18 Ambon	68	3	65
9.	Dilmil III -19 Jayapura	406	4	402

**4. Jumlah Perkara Tingkat Banding yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

a. Putusan Tingkat Banding yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2024 telah memutus perkara Tingkat Banding sejumlah 140 (seratus empat puluh) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) perkara, sehingga rincian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut :

No	Satker	Perkara Banding	Yang Mengajukan kasasi	Yang Tidak mengajukan Kasasi
1.	Dilmilti III Surabaya	140	101	39

**C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL**

**Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu**

Salah satu kegiatan untuk meningkatkan pelayanan public dalam penyelesaian perkara dilakukan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Manfaat Sidang Keliling adalah :

1. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara
2. Biaya transportasi pihak pencari keadilan
3. Menghemat waktu

Data Sidang keliling Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidang kan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	22 Januari 2024 s.d 26 Januari 2024	Dilmil III-16 Makassar	5 Perkara	5 Perkara	0 Perkara	Rp55.400.000,00
2.	3 Juni 2024 s.d 7 Juni 2024	Dilmil III-16 Makassar	5 Perkara	5 Perkara	0 Perkara	Rp46.604.380,00
3.	19 Agustus 2024 s.d 23 Agustus 2024	Dilmil III-18 Ambon	4 Perkara	4 Perkara	0 Perkara	Rp55.844.600,00
4.	7 Oktober 2024 s.d 11 Oktober 2024	Dilmil III-17 Manado	7 Perkara	6 Perkara	0 Perkara	Rp66.014.900,00
5.	28 November 2024 s.d 29 November 2024	Dilmil III-13 Madiun	5 Perkara	5 Perkara	0 Perkara	Rp15.540.000,00
JUMLAH			26 Perkara	25 Perkara	1 Perkara	Rp239.403.880,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidang kan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	20-22 Februari 2024	Pengadilan Agama Kota Malang	13	8	5	Rp.22.580.000,00
2.	24-27 Juni 2024	Pengadilan Agama Kota Jember	12	9	3	Rp.22.580.000,00
3.	7-10 Oktober 2024	Pengadilan Agama Kota Malang	11	7	4	Rp.23.380.000,00
JUMLAH						

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	11-06-2024 s/d 14-06-2024	Pengadilan Agama Kab. Nganjuk	5	5	0	Rp21.420.000,00
2.	15-10-2024 s/d 18-10-2024	Pengadilan Negeri Kelas 1 A Blitar	5	5	0	Rp24.070.000,00
<b>JUMLAH</b>						Rp45.490.000,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-14 Denpasar

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	22 s.d 26 April 2024	Pengadilan Tipikor Mataram	5	4	1	Rp. 34. 568.800
2.	28 s.d 31 Oktober 2024	Pengadilan Agama Mataram	4	4	0	Rp. 30.678.400
<b>JUMLAH</b>			9	8	1	Rp.65.247.200

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-15 Kupang

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	29 April 2024 - 2 Mei 2024	Pengadilan Agama Maumere	4	4	0	Rp. 36.350.000,-
2.	11 November 2024 - 13 November 2024	Pengadilan Agama Waikabubak	2	2	0	Rp. 31.412.000,-
<b>JUMLAH</b>			6	6	0	Rp. 67.762.000,-

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-16 Makassar

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	26 Feb-3 Mar 2024	PTUN KENDARI	7	7	0	Rp44.736.900,00
2.	8 Jul-12 Jul 2024	PN PARE-PARE	8	8	0	Rp25.450.000,00
3.	2 Des-6 Des 2024	PN PARE-PARE	12	12	0	Rp25.530.00,00
<b>JUMLAH</b>			27	27	0	Rp95.716.900,00

Data Sidang keliling Pengadilan Militer III-17 Manado

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	24 Feb-01 Mar 2024	PA GORONTALO	10	10	0	Rp.78.639.500
2.	23 Sept-27 Sept 2024	PA GORONTALO	14	14	0	Rp. 89.363.200
<b>JUMLAH</b>						Rp. 168.002.700

Data Sidang Keliling Dilmil III-18 Ambon

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	05-08 Maret 2024	PN Masohi	9	8	1	Rp28.160.000
2.	3-7 September 2024	PA Ternate	3	0	3	Rp54.321.000
3.	11-15 November 2024	PN Tual	6	2	4	Rp54.960.000
<b>JUMLAH</b>						

Data Sidang Keliling Dilmil III-19 Jayapura

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	29 Jan – 2 Feb 2024	PN Manokwari	11	11	-	Rp58.156.800
2.	19 Feb-23 Feb 2024	PN Merauke	7	7	-	Rp54.226.350
3.	10 Jun-14 Jun 2024	PN Manokwari	7	7	-	Rp60.704.150
4.	8 Jul-12 Jul 2024	Lantamal XIV Sorong	7	7	-	Rp50.112.900
5.	5 Ags-9 Ags 2024	PN Biak	7	7	-	Rp64.836.000
6.	25 Nov-29 Nov 2024	PN Manokwari	9	7	2	Rp67.484.150
<b>JUMLAH</b>			48	46	2	Rp355.520.350

## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari 5 jenis status Kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan BP Personel Militer. Tahun 2024 SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berjumlah 56 orang dengan rincian 24 orang Militer, 14 orang PNS, 2 orang PPPK, 11 orang PPNP dan 5 orang BP Personel Militer.

SDM di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersusun atas tenaga Teknis dan Non Teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PPNP belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNP dalam Struktur Organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

#### 1. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Tabel 3.1.1. Data Personel Pengadilan Militer III Surabaya

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Dr. Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.	Brigadir Jenderal TNI	Kadilmilti III
2.	Dr Tri Achmad Bhaykhoni, S.H.,M.H	Kolonel Kum NRP 52083	Waka Dilmilti III
3.	Prastiti Siswayani, S.H	Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670	Hakim Militer Tinggi
4.	Agus Husin, S.H.,M.H.	Kolonel Chk NRP 636562	Hakim Militer Tinggi
5.	Sahrul, S.H., M.H.	Kolonel Chk NRP 119800319412730114	Hakim Militer Tinggi
6.	Riza Fadilah, S.H.	Kolonel Laut (H) NRP 13149/P	Hakim Militer Tinggi



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
7.	Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si	Kolonel Kum NRP 520868	Hakim Militer Tinggi
8.	Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.	Kolonel Laut (H) NRP 12365/P	Hakim Militer Tinggi
9	Muhamad Idris, S.H., M.H.	Kolonel Kum NRP 524413	Hakim Militer Tinggi
10.	Djati Santoso, S.H., M.H.	Kolonel Pom NRP 520873	Sekretaris
11.	Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.	Kolonel Kum NRP 524418	Panitera
12.	Mustofa Yanu Wiryatmo, S.H. M.H.	Letkol Chk NRP 11010002530172	Panmud Pidana
13.	Iyah Syafriah, S.H., M.H.	Letkol Chk (K) NRP 2920030840573	Panmud Hukum
14.	Dearby Tatulus Peginusa, S.H.	Letkol Chk NRP 11030011271278	Panmud TUM
15.	Sugandi, S.H.	Mayor Chk NRP 21950303621075	Panitera Pengganti
16.	Tigor Parlilitan Hasugian, S.IP.,S.H.	Pembina Gol. IV/a NIP 196905221992031003	Kabag Perencanaan Kepegawaian
17.	Dwi Puspitarini,S.E.	Pembina Gol. IV/a NIP 198112062006042004	Kabag Umum dan Keuangan
18.	Irdawati Soekirlan, S.H.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 196812061990032005	Kasubbag Kepegawaian dan TI
19.	Wahyu Eko Wicaksono, S.T.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 197405142006041001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
20.	Tubagus Maulana Arif Darma, S.H., M.H.	Penata Tk.I Gol. III/d NIP 197605272006041003	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
21.	Mochamad Gufron, S.H.	Penata Gol. III/c NIP 196912041997011001	Kabag Tata Usaha dan Rumah Tangga
22.	Amanda Rosaline Fajar Sari, S.H.	Penata Muda Tk.I Gol. III/b NIP 199502162019032008	AnalisisPerkara Peradilan
23.	Angga Permana Putra, S.H.	Penata Muda Tk. I Gol. III/b NIP 198509212009041002	Penyusun Laporan Keuangan
24.	Fajar Eka Pratomo, S.E.	Penata Muda Tk.I Gol. III/b NIP 199201152020121006	Analisis Perencanaan
25.	Afni Syafaatun, S.AP.	Penata Muda Tk.I Gol. III/b NIP 199609182020122005	Analisis Sumber DayaManusia Aparatur
26.	Adi Sukadar	Peltu NRP 21010160750379	Pengelola BarangMilik Negara
27.	Eko Widodo	Serma NRP 21950302550573	Ajudan
28.	Nanang Candra Trisnianto, S.H.	Serma NRP 21040180940185	Pengelola Barang Milik Negara
29.	Ali Fatkul Rahman	Serma NRP 21060247360585	Pengelola Perkara
30.	Amrustian, S.H.,M.H.	Letda Chk NRP 21070475460288	Pengelola Perkara
31.	Bagus Ramdhani	Serka NRP 21120073940392	Pengolah Data dan Informasi, Subbagian

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILT I III SURABAYA TAHUN 2024**

			Kepegawaian dan Teknologi Informasi
32.	Muhammad Arif Al Hafids	Sertu NRP 41919906549088	Pengadministrasi Perkantoran
33.	Nila Rukhama, A.Md.	Pengatur Gol. II/c NIP 199807222022032016	Pengelola Perkara
34.	Afrida Eka Sabiila, A.Md.AB	Pengatur Gol. II/c NIP 199811062022032015	Pengelola Perkara
35.	Budi Harjo Sukoco	Sertu NRP 31030326311282	Pemelihara Saranadan Prasarana
36.	Kotib	Sertu NRP 31950475050174	Teknisi Sarana dan Prasarana
37.	Deddi Pradana .S	Praka NRP 31130165410494	Pengadministrasi Hukum
38.	Nonikca Florence Tiara, S.H.	CPNS Penata Muda III/a NIP 199603162024052001	Analisis Perkara Peradilan Panitera Muda Tata Usaha Militer
39.	Reza Aziz Pasya, S.H.	CPNS Penata Muda III/a NIP 200101082024051001	Analisis Perkara Peradilan Panitera Muda Hukum

*Tabel 3.1.2 Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*

No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1.	Yusuf Kurniawan, S.E.	NI. 199503052023211010	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
2.	Fahrudin, S.E.	NI, 198010042023211004	Perencana Pertama

*Tabel 3.1.3 Data BP Personel Militer*

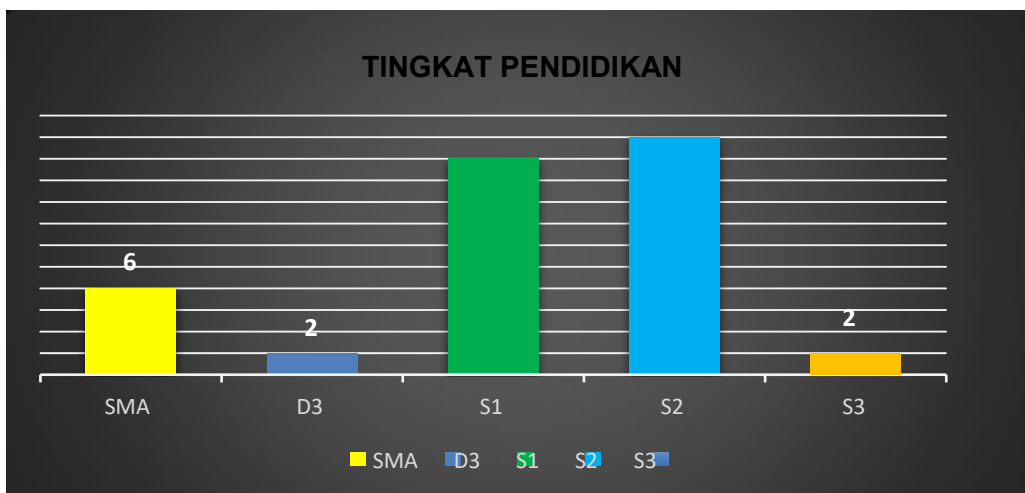
No	Nama	Pangkat/NRP	Keterangan
1.	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.	Mayor Chk NRP 21940135750972	Panmud Pidana Dilmilti II Jakarta
2.	Hendra Duta Prasetya	Serda NRP 21210134821100	Staf Perkara
3.	Fajar Firmansyah	Pratu NRP 31180278570396	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
4.	Khaerudin Tamimi	Prada NRP 31210139770601	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga
5.	Rafif Dwi Bagus Setiawan Sutarto	Prada NRP 31210218550801	Staf Tata Usaha dan Rumah Tangga

*Tabel 3.1.4 Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)*

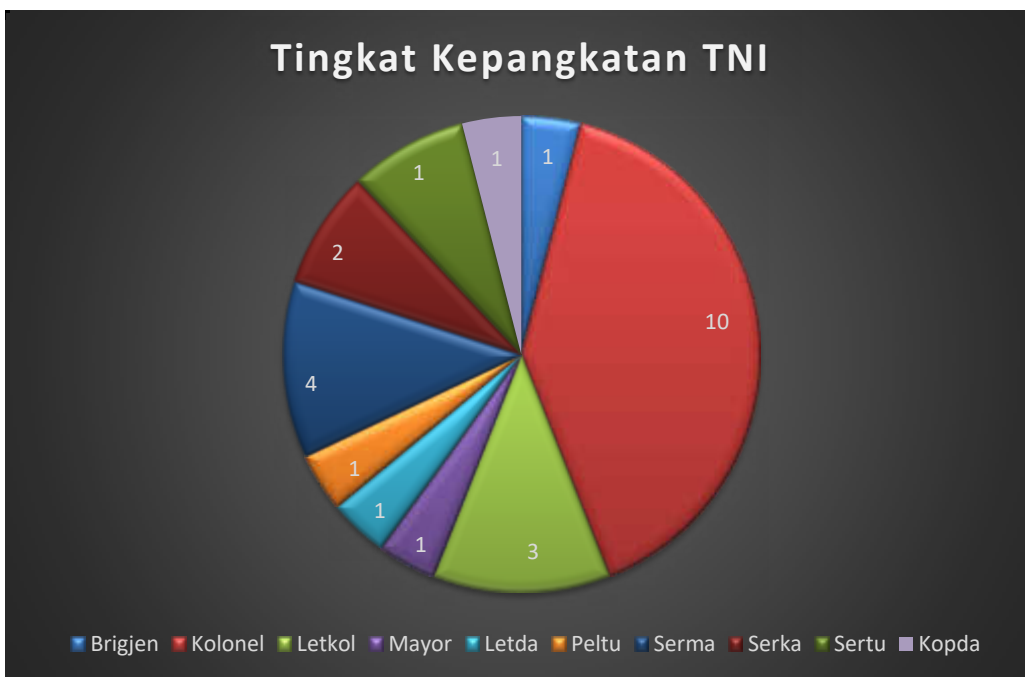
No	Nama	Keterangan
1.	Karmayani	Pramubakti
2.	Purwaning Wahyudi	Pramubakti
3.	Agita Kartika Ayuningtyas , S.H.	Pramubakti
4.	Sukiman	Security
5.	Nanang Setiyoko	Security
6.	Amir Hasan	Security
7.	Nugraha Kencana Efendi	Driver

8.	M. Yusuf Efendhi	Pramubakti
9.	Faisal Dwikky K. Nugroho	Pramubakti
10	Gilang Pratama	Pramubakti
11	Ahmad Santoso	Pramubakti

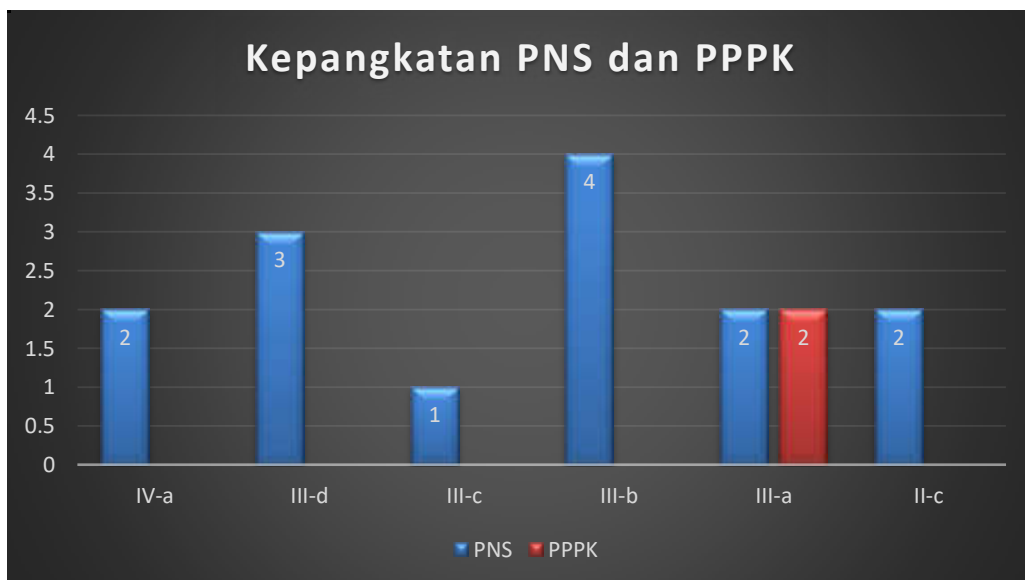
Grafik 3.1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



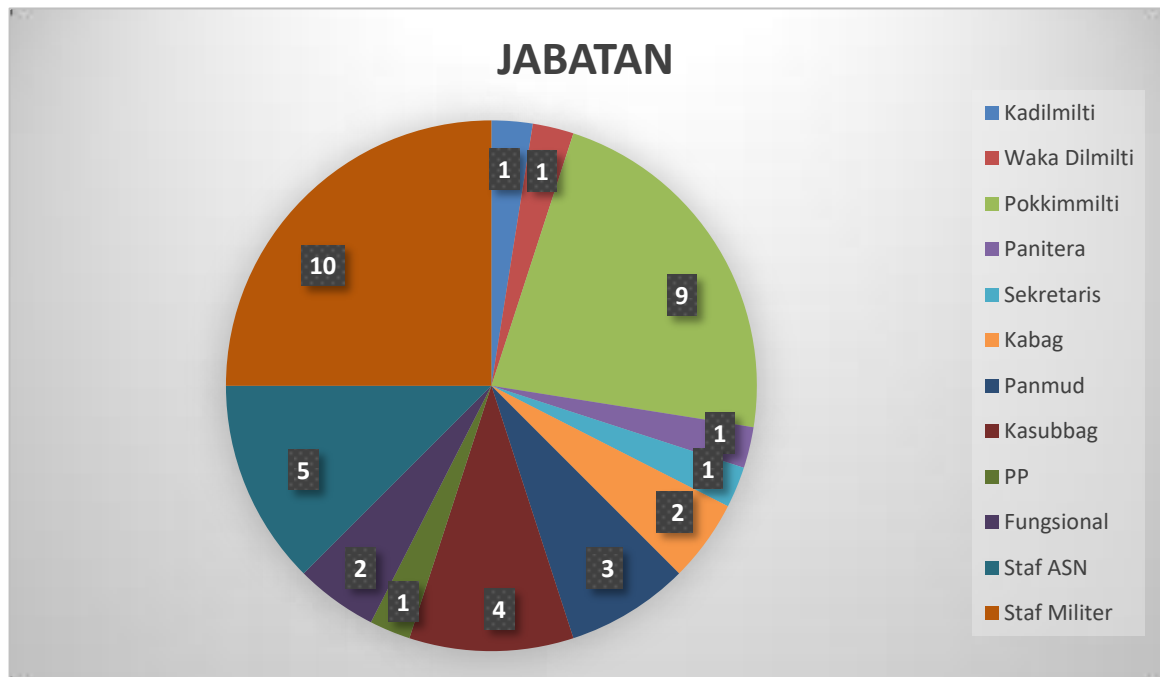
Grafik 3.1.2 Pangkat TNI pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Grafik 3.1.3 Pangkat PNS pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Grafik 3.1.4 Jabatan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya

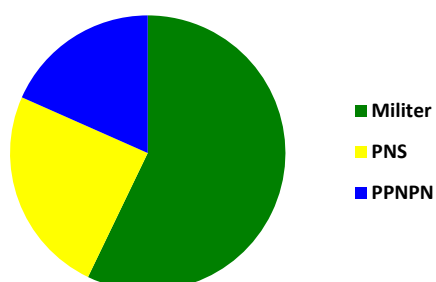
Tabel 3.2.1 Data Personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	8 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	6 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Pidana	1 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Hukum	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana	4 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	0 Orang
		2	Non Tehnis Pengadilan
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang		
Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang		
Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang		
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	0 Orang		
Pranata Layanan Operasional Subbag Umum (Bendahara)	1 Orang		
Pengolah Data dan Informasi Subbag Umum	2 Orang		
Pengolah Data dan Informasi Subbag Kepegawaian	1 Orang		
Pengolah Daftar Gaji	Kosong		
Teknisi Sarana dan Prasarana Subbag PTIP	1 Orang		
Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum	4 Orang		
Pengadministrasi Perkantoran Subbag Kepegawaian	1 Orang		
3	Jabatan Fungsional		
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Komputer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong

Tabel 3.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	28	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPNP	9	20,00
Jumlah Total		49	100,00

Grafik 3.2.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian





Tabel 3.2.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	26	2
2	PNS	3	9
3	PPNPN	7	2
Jumlah Total		36	13

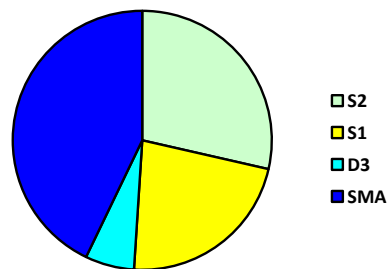
Tabel 3.2.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	6	-
3	Mayor	3	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	1	-
6	Peltu	4	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	1	-
9	Serka	3	-
10	Sertu	-	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	2	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	1	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	4
21	III/a	-	-
22	II/d	-	1
23	II/c	-	2
Jumlah Total		28	12

Tabel 3.2.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	S-2	13	1	-	14
2	S-1	5	5	1	11
3	D-3	-	3	-	3
4	SMA	10	3	8	21
Jumlah Total		28	12	9	49

Grafik 3.2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tabel 3.2.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	20 – 30 Tahun	2	3	3	8
2	31 – 40 Tahun	5	3	5	13
3	41 – 50 Tahun	17	3	-	20
4	51 – 58 Tahun	4	3	1	8
Jumlah Total		28	12	9	49

**3. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-13 Madiun :**

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang antara lain:

Tabel 3.3.1 Data Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	HAKIM MILITER	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972
2		Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951
3		Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174
4		Asep Hendra Andriyanto, S.H. Mayor Chk 21950078651073
5	PANITERA	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097
6	PANITERA PENGGANTI	Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415
7		Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273
8		Dodik Sugeng Prasetyo Pelda NRP 531770
9	PROVOST	Budi Utomo Pelda NRP 21010116541280
10		Dodit Puguh Prasetyo Serma NRP 531806
11		Andri Sujatmiko Serma NRP 106531
12		Febi Ramona Serma NRP 31940520920274
13		Mulyono Serka NRP 31970176050877
14		Yohanes Hartono Serka NRP 31960641781076
15		Aris Hermawan Serka NRP 541215
16		Adi Prakosa Serka NRP 21130071790694
17		Kamari Sertu NRP 531302
18		Agus Setiawan Kopka Lis NRP 96984
19		Tommy Hariyanto Kopka Ttu NRP 99830
20		Badruzzaman Koptu NRP 31000591731079

21		Catur Yulianto Kopda NRP 529007
22		M. Afiq N. Kopda NRP 31090486560390
23		Riyanto Kopda Ttg NRP 115709

Tabel 3.3.2 Data Personel Pengadilan Militer III-13 Madiun.

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	KEPALA	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972
2	WAKA	Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951
3	SEKRETARIS	Samian, S.H., M.M. IV/a NIP. 197002211992031009
4	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Gatot Suprpto III/d NIP.196805031991031009
5	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	Sugeng Biyono III/b NIP.196810101991031003

Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	STAF	Sri Luswati III/b 196803281989032004
2		Amin III/b 196712311992031024
3		Sriyani III/b 197210041994032001
4		Zakiah, S.E III/b NIP.19911008202012200
5		Rendy Ardicha Pradana, S.ST. III/a NIP. 19920202019031004
6		Lina Nilawati Serka NRP 542081
7		Raudya Rifka Zahra, A.Md. II/d NIP 199712262020122005
8		Luky Setiawan, A.Md. II/c NIP. 199210262022031003
9		Hilmy Aziz Raihan, A.Md. II/c NIP. 199510062022031009

Tabel 3.3.3 Data Personel PPNPN

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPNPN	Ali Maskur
2		Dimas Wahyu Nugroho
3		Felicianus Suwanto
4		Dani Nani Nur
5		Kadir
6		Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T.

4. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Tabel 3.4.1 Data Personel Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

1	Nama	Pangkat/Korps/Gol NRP/NIP	Jabatan
<b>Personel Militer</b>			
1	Dedy Darmawan, S.H., M.H.	Kolonel Chk	Kadilmil
2	Muhammad Rizal, SH., MH.	Letkol Chk	Waka Dilmil
3	I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.	Letkol Chk	Hakim Gol. V
4	Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.	Letkol Chk	Hakim Gol. V
5	Kus Indrawati, S.H., M.H.	Kolonel (K) Chk	Hakim Gol. IV
6	Dianing Lusiasukma, S.H., M.H.	Kapten (K) Chk	Hakim Gol. VII
7	Mahpul Saepuloh, S.H.	Mayor Chk	Panitera
8	Damai Chrisdianto, S.H	Lettu Chk	Panmud Pidana
9	Kadek Subrata, S.H.	Peltu	Panitera Pengganti
10	Purwodiyanto, S.H.	Serma	Pengolah data dan informasi
11	I Nym Jana Nuraga, SH.	Serma	Pengelola Perkara
12	Hendricus Andryas	Sertu	Teknisi Sarana dan prasarana
13	I Wayan Kusuma Yuda	Kopka	Pengadministrasian Perkantoran
14	I Wayan Widana	Kopka	Pengadministrasian Perkantoran
15	Viktor Januaris Berutu	Pratu	Pengadministrasian Perkantoran
<b>Personel Pegawai</b>			
1	I Wayan Parna, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2	I Nym Suartika, SE, SH, MH	Penata Tk I III/d	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
3	A.A.I Intan Prabawati, S.E.	Penata Tingkat I III/d	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	Katharina, S.H.	Penata Tingkat I III/d	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
5	Sri Susmawati, SH	Penata III/c	Analisis Perkara Peradilan
6	I.G.A.N Wahyu Permadi, S.H.	Penata III/c	Analisis P. Keuangan APBN
7	I G.A.N Nym Giri Sundari, SE.M.M	Penata Tk I III/d	Penata Layanan Operasional
8	Ketut Suriani, SH	Penata Muda Tingkat I III/b	Penata Layanan Operasional
9	Ketut Gede Wiguna, S.IP.	Penata Muda III/a	Penata Layanan Operasional
10	Ni Kadek Yuliantini, A.Md.	Pengatur II/c	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Gisca Pravita A, A.Md.M	Pengatur II/c	Penata Layanan Operasional
12	Melathi Indahsari, A.Md.M	Pengatur II/c	Pengolah data dan informasi

Tabel 3.4.2 Data PPNPN

No	Nama	Status	Jabatan
1	I Nyoman Dika	PPNPN	Pramubakti
2	Sri Yuliowati	PPNPN	Pamubakti
3	I Putu Mega Yasa, S.H	PPNPN	Pamubakti
4	I.Nym Gede Jaya, S.Kom	PPNPN	Pamubakti
5	Pieteron Yagoto	PPNPN	Pamubakti
6	Nyoman Sukadi, S.H	PPNPN	Satpam
7	Gst Ngh Suardika Adi Saputra	PPNPN	Satpam
8	Bagoes Dewangga	PPNPN	Satpam

## 5. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-15 Kupang

Tabel 3.5.1 Data rekapitulasi Personel Pengadilan Militer III-15 Kupang.

No	Uraian	Jumlah
1	Militer	12
2	ASN	7
3	Honoror	9
4	BP	1
Total		29

Tabel 3.5.2 Data Pejabat Struktural Pengadilan Militer III-15 Kupang

No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan
1	Joko Trianto, S.H., M.H.	Letnan Kolonel Chk/ 11020016150177	Kadilmil
2	Subiyatno, S.H., M.H.	Mayor Chk/ 11060006130681	Waka Dilmil
3	Procleo Franz Simamora, S.H.	Kapten Chk/ 21960348840874	Panitera
4	I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.	Letda Chk/ 21050263690586	Panmud Pidana
5	-	-	Panmud Hukum
6	Alexander, S.E.	Penata Tk. I / III/d 197609082009121002	Sekretaris
7	-	-	Kasubag IT dan Pelaporan
8	Delmi B Sabloit, S.Ak	Penata Muda Tk.I / III/b	Kasubag Kepegawaian,

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024**

		198301262009042001	Organisasi dan Tata Laksana
9	Marloyati Lado, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b 198710082009122003	Kasubag Umum dan Keuangan

Tabel 3.5.3 Data Hakim Militer Pengadilan Militer III-15 Kupang.

No	Nama	Pangkat/NRP	Matra
1.	Joko Trianto, S.H., M.H.	Letnan Kolonel Chk/ 11020016150177	Angkatan Darat
2.	Subiyatno, S.H., M.H.	Mayor Chk/ 11060006130681	Angkatan Darat
3.	Nandar Franssiska, S.H.	Mayor Chk/ 11070077240186	Angkatan Darat
4.	Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.	Kapten Kum/537313	Angkatan Udara
5.	Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.	Kapten Kum/541692	Angkatan Udara
6.	Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I.	Kapren Chk/ 21980220931177	Angkatan Darat

Tabel 3.5.4 Data Staf dan Fungsional Umum Pengadilan Militer III-15 Kupang.

No	Nama	Pangkat/NRP/NIP	Jabatan
1	Diana R. Laiskodat	Penata Tk. I / III/d 196901311991032002	Pengadministrasi Perkantoran
2	Ridwan Permana Putra, S.E	Penata Muda/ III/a 199109122022031008	Penata Layanan Operasional
3	Hendra Dianto, S.H.	Serka/ 31000726061278	Pengelola Penanganan Perkara
4	Muhammad Ghiyats Lizuardi, A.Md.	Pengatur Tk.I /II/d 1994062020201007	Teknisi Sarana dan Prasarana
5	Tia Agustina Murtiani, A.Md.	Pengatur II/c 199608152022032013	Pengelola Data dan Informasi
6	Hasbi Pasolo, S.H., M.H.	Serka/ 31000726061278	Pengelola Data dan Informasi
7	Norberto Manek Alo, S.H.	Serda/ 31071468740188	Pengadministrasi Perkantoran
8	Yanus Dangu	Kopda/ 31130618690492	Pengadministrasi Perkantoran

Tabel 3.5.5 Data Personel PPNPN Pengadilan Militer III-15 Kupang.

No	Nama	Jabatan	Diperbantukan
1	Benyamin Giri	Pengemudi	Staf Kepaniteraan
2	Desi A. Hingmadi, SH	Pramubakti	Staf Umum dan Keuangan
3	Mariance Huwae, SH	Pramubakti	Staf Kepaniteraan
4	Jidon A. Balla	Pramubakti	Staf PTIP
5	Jermias J. Bessie	Pramubakti	Staf Umum dan Keuangan
6	Marthen Wila Do	Sekuriti	Staf Umum dan Keuangan
7	Bupelsi E. Tabun	Sekuriti	Staf Kepegawaian
8	Trymoon Tome	Sekuriti	Staf Umum dan Keuangan
9	Muchlis A. Achmad	Sekuriti	Staf Umum dan Keuangan

6. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-16 Makassar

Tabel 3.6.1 Data Klasifikasi Pegawai

	KLASIFIKASI	JABATAN	JUMLAH (Orang)
<b>I</b>	<b>Struktural</b>	Kepala	1
		Wakil Kepala	0
		Panitera	1
		Sekretaris	1
		Panitera Muda Pidana	1
		Panitera Muda Hukum	0
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1
		Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	1
		<b>II</b>	<b>Fungsional</b>
Panitera Pengganti	3		
Analisis SDM Aparatur Pertama	1		
<b>III</b>	<b>Pelaksana</b>	Analisis Perkara Peradilan Pidana	0
		Analisis Perkara Peradilan Hukum	1
		Pengelola Penanganan Perkara Pidana	4
		Pengelola Penanganan Perkara Hukum	1
		Pengolah Data Informasi Panmud Hukum	1
		Pengolah Data Informasi Subbag Kepegawaian	1
		Penata Layanan Operasional	1
		Pengadministrasi Perkantoran	1
		Penelaah Teknis Kebijakan	1
		Bendahara Pengeluaran	1
<b>IV</b>	<b>Tenaga Kontrak</b>	Pramubakti	2
		Pengemudi	2
		Satpam	4

Tabel 3.6.2 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1.	Kolonel	1	
2.	Letnan Kolonel	3	
3.	Mayor	5	
4.	Kapten	1	
5.	Lettu	0	
6.	Letda	1	
7.	Peltu	1	
8.	Pelda	1	
9.	Serma	6	
10.	Serka	2	
11.	Kopda	0	
12.	Praka	0	
13.	Penata Tk I		4
14.	Penata		0
15.	Penata Muda Tk I		2
16.	Penata Muda		1
17.	Pengatur		2
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>9</b>

Tabel 3.6.3 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	8	1	-	9
2.	S-1	11	5	4	20
3.	D-3	-	2	-	2
4.	SMA	2	1	4	7
<b>Jumlah</b>		<b>21</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>38</b>

7. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-17 Manado

Tabel 3.7.1 Data rekapitulasi Personel Pengadilan Militer III-17 Manado.

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Amriandie, S.H., M.H	Kolonel Laut (H) NRP 14124/P	Kepala
2.	Wakil	-	Kosong
3.	Prima Ledy Yudoyono, S.T(Han)., S.H	Kapten Chk NRP. 11130023470589	Panitera
4.	Meldi M. A. S Seon S.Pi.,	Penata Tk.I III/d NIP. 197405142002121001	Sekretaris
5.	Amriandie, S.H., M.H	Kolonel Laut (H) NRP 14124/P	Hakim Militer
7.	Patta Imang, S.H.	Mayor Chk NRP. 21930123471271	Hakim Militer
8.	Ruslan, S.H.	Mayor Laut (H) NRP. 17599/P	Hakim Militer
9.	Soniardhi, S.H., M.H.	Kapten Chk. NRP 11100009060986	Hakim Militer
10.	Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H	Kapten Chk. NRP1112002926 0790	Hakim Militer
11.	Zulkarnain S.H.	Lettu Chk NRP. 21020026780383	Panmud Pidana
12.	Panmud Hukum	-	Kosong
13.	Procleo Franz Simamora, S.H.	Kapten Chk NRP 21960348840874	Panitera Pengganti
14.	Muhammad Sophian Dalimunthe, S.H.	Letda Chk NRP 21060309150286	Panitera Pengganti
15.	Dharmawati Rahayu, S.E.,M.E.,	Penata Muda Tk.I III/c NIP.198708142011012015	Kasubbag Umum dan Keuangan)
16.	Nasir,	Penata Muda Tk.I III/b NIP196805101997011001	Pengadministrasi Registrasi Perkara
17.	Fiere G. Harinda, S.T	Penata Muda Tk. III/a NIP 197804042006041003	Analisis Tata Laksana / Plh. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi
18.	Rohma Rohimah Hartono, A.Md	Pengatur II/c NIP.198810222022032003	Pengelola Perkara
19.	Riri Agustina, A.Md.,A.B,	Pengatur II/c NIP 199908182022032009	Pengelola Perkara
20.	Rodi Salmon	Sertu NRP. 31040378600482	Staf Kesekretariatan

Tabel 3.7.2 Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)



No	Nama	Keterangan
1.	Dewi Durandt	Pramubhakti
2.	Ervina R. Damima	Pramubhakti
3	Jinli Ignasius Repi	Pramubhakti
4	Zuhri Zain Purwanto, S.Tr.Kom.	Pramubhakti
5	Febrina Mato, S.H.,M.H	Pramubhakti
6	Ahmad Mahadjani, S.H.	Pengemudi
7	Fahmi Rizal Rahanyamtel	Pengemudi
8	Deavis Billi Chandra Aling	Security
9	Filipus P.A.R Anumpitan	Security

Tabel 3.7.3 Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1.	Kolonel	1	
2.	Letnan Kolonel	-	
3.	Mayor	2	
4.	Kapten	4	
5.	Lettu	1	
6.	Letda	1	
7.	Peltu	-	
8.	Pelda	-	
9.	Serma	-	
10.	Serka	-	
11.	Sertu	3	
12.	Praka		
13.	Penata Tk I		1
14.	Penata		1
15.	Penata Muda Tk I		1
16.	Penata Muda		1
17.	Pengatur		2
<b>Jumlah</b>			

Tabel 3.7.4 Berdasarkan pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	3	2	1	
2.	S-1	5	2	2	
3.	D-3		2		
4.	SMA	3	1	6	
<b>Jumlah</b>					

8. **Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon**

Tabel 3.8.1 Data Personel Militer

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.	Kolonel Chk / 11980040360874	Kadilmil
2.	Magdial, S.H., M.H.	Letkol Chk/ 11030010440578	Hakim Militer
3.	Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., M.Tr.Opsla.	Letkol Laut (H) / 16762/P	Hakim Militer (BP di Dilmil III-14 Denpasar)
4.	Hadiryanto, SIP, S.H., M.H.	Mayor Chk/ 11030043370581	Hakim Militer
5.	Kiki Parlaungan Lubis, S.H.	Mayor Chk/ 11040007551078	Hakim Militer
6.	Samsul Hadi, S.H., M.H.	Mayor Chk / 21940082370175	Hakim Militer
7.	Purwadi, S.H., M.H.	Mayor Chk / 21960345950374	Hakim Militer
8.	Ayik Triandi Asmara, S.H.	Kapten Chk / 21990110790279	Panitera
9.	Riska Dori, S.H.	Lettu Chk / 21010058540582	Panitera Muda Hukum
10.	Syaiful Adhi Bramastagiri, S.H.	Letda Chk/ 21080731450589	Panitera Pengganti Gol. XI (BP di Dilmiltama)
11.	Erlangga Prasady, S.H., M.H.	Letda Chk/ 21080618760289	Panitera Pengganti Gol. XI
12.	Hendra Yanto, S.H.	Letda / 21080776901187	Pengelola Penanganan Perkara (sedang dalam pendidikan)
13.	Muhammad Madanil Mustofa	Praka / 31140180580393	Spri (ajudan) Kadilmil, Provost (BP dari Yonif 733/Masariku)

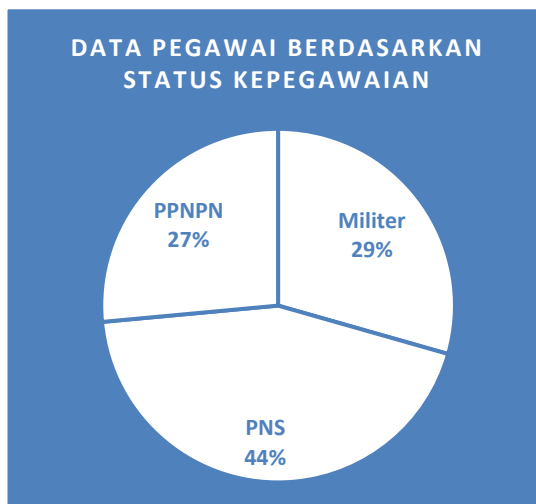
Tabel 3.8.2 Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Hendri D. Muskitta, S.H	Pembina IV/a / 197602231998031001	Sekretaris
2.	Asis, S.Kom., S.H., M.H.	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
3.	Rachel A. Patty, S.H., M.H.	Penata Tk.I III/d 197001251990032001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
4.	Rina Deby J. Wattimury, S.H., M.H	Penata Tk. I / III/d 197304012006042001	Kasubbag Umum dan Keuangan

5.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata / III/c 197606061998031002	Analisis Perkara Peradilan
6.	Stany Rraprap, S.H.	Penata / III/c / 19871202006042001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
7.	Rio Matauseja, S.H.	Penata / III/c / 199005182009041001	Analisis Perkara Peradilan
8.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Pengadministrasi Perkantoran
9.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda Tk. I / III/b / 198411272011012015	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir
10.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda Tk. I / III/b 198807242019031005	Penata Layanan Operasional
11.	Muhammad Adib Hadriansyah, S.E.	Penata Muda III/a 199207192020121006	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir
12.	Dicky Dharma Saputra, S.Ak.	Penata Muda III/a 199606222022031007	Penata Layanan Operasional
13.	Ade Widiyanto, A.Md.	Pengatur Tk.I II/d 199009182020121002	Teknisi Sarana dan Prasarana
14.	Andra Abdul Rahman, A.Md	Pengatur II/c 199103312022031006	Pengelola Penanganan Perkara

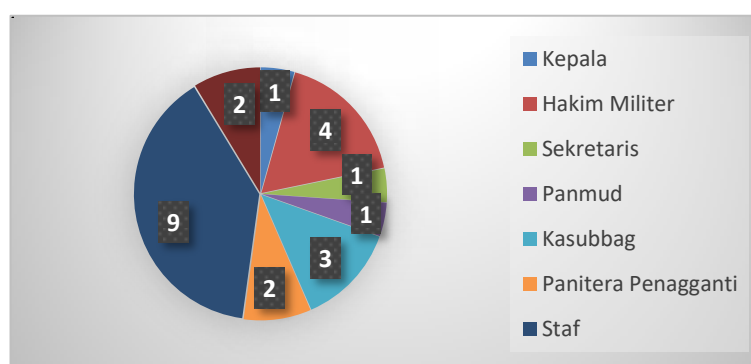
Tabel 3.8.3 Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1.	Fredy Mahulette	Pramubhakti
2.	Alfreds Werinussa, S.E	Pengemudi
3.	Arpan	Security
4.	Muhamad Alpisal	Security
5.	Akmal, S.H.	Security
6.	Ratna Fairus, S.Kom.	Pramubhakti
7.	Ulfi Tehuayo, S.Pi	Pramubhakti
8.	Alifda Kiat, S.H.	Pengemudi
9.	Reingard Pattiasina	Security



Tabel 3.8.4 Data Pegawai berdasarkan jabatan

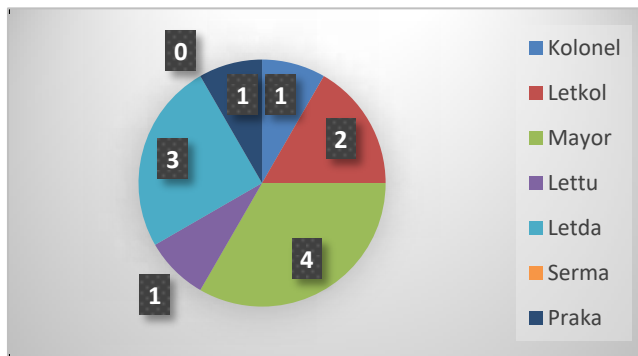
No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	-
3	Pokkimmil	6 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Hukum	1 Orang
7	Panmud Pidana	-
8	Panitera Pengganti	2 Orang
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
12	Fungsional Keuangan	3 Orang
13	Staf Panmud Hukum	1 Orang
14	Staf Panmud Pidana	4 Orang
15	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
16	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
17	Staf Subbag Umum dan Keuangan	-



Grafik Pegawai berdasarkan Jabatan

Tabel 3.8.5 Data Pegawai Militer berdasarkan Pangkat Militer

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	1 orang	
2	Letnan Kolonel	2 orang	1 orang BP (dii Dilmil III-14 Denpasar)
3	Mayor	4 orang	
4	Letnan Satu	1 orang	
5	Letnan Dua	3 orang	1 orang BP (di Dilmiltama), 1 orang sedang pendidikan Diktukpa
6	Praka	1 orang	BP dari Yonif 733 Masariku
<b>Jumlah</b>		<b>12 orang</b>	

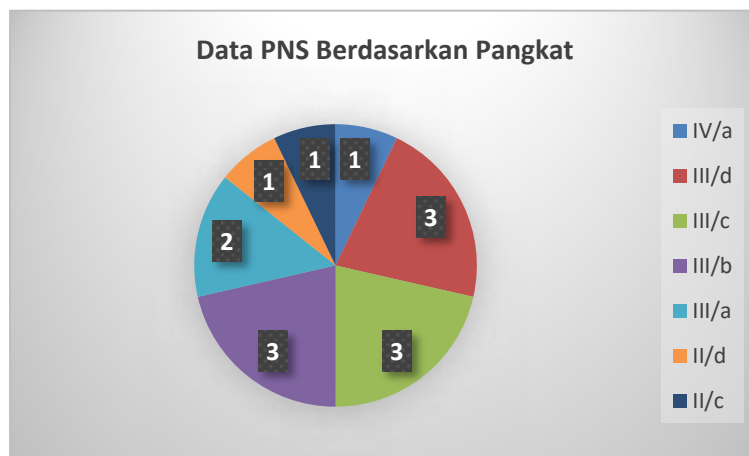


Grafik Pegawai berdasarkan Pangkat

Tabel 3.8.6 Pangkat PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Pembina	1	
2	Penata Tk.I	2	
3	Penata	2	
4	Penata Muda Tk.I	6	
5	Penata Muda	1	
6	Pengatur	3	
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	

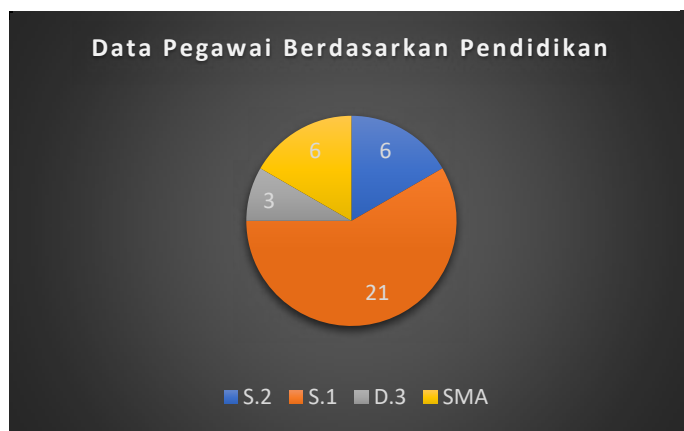
Grafik Data Pegawai PNS berdasarkan Golongan



Tabel 3.8.7 Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	5	1	-	6
2.	S-1	6	10	5	21
3.	D-3	-	3	-	3
4.	SMA	1	1	4	6
Jumlah		12	15	9	36

Grafik Data Pegawai berdasarkan Pendidikan



## 9. Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Tabel 3.9.1 Data rekapitulasi Personel Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Slamet Widada, S.H., M.H.	Kolonel Laut (H)	14131/P	Kepala
2	Panjaitan Hotman M.T. S.H., M.H.	Letkol Chk	11000022761076	Waka
3	Hengki Afandi S.H., M.H	Mayor Chk	11040016470180	Hakim
4	Awang Setyadi Bawana S.H.	Mayor Laut (H)	17305/P	Hakim
5	Iskandar S.H., M.H.	Mayor Chk	21960346030574	Hakim
6	Ardiansyah, S.Pd.I., S.H., M.H.	Mayor Chk	11080095210883	Hakim
7	James Chris Deweight Tetelepta, SH	Mayor Chk	11080105450585	Hakim
8	Aditya Wicaksono S.H.	Kapten Chk	11100004840584	Hakim
9	Muhammad Arfah Afendi, S.E., M.M.	IV/a	197611302006041002	Sekretaris
10	Belum terisi	Belum terisi	Belum terisi	Kasub Bagian Kepegawaian dan Ortala
11	Lilik Ernawati, S.E., M.Ak.	III/c	198506242009042005	Kasub Umum dan Keuangan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILT I III SURABAYA TAHUN 2024

12	Marthen Toding, S.H.	III/c	197507271998031002	Kasub PTIP
13	Indra Sudarta, S.H.	Kapten Chk	21950302891173	Panitera
14	Ali Yusuf, S.H	Lettu Chk	21980253770977	Panmud Hukum
15	Juspindeli Girsang, S.H.	Lettu Chk	21010017470281	Panmud Pidana
16	Jasri	III/b	197306081998031002	Pengolah Informasi dan Komunikasi
17	Alen Farlianso, S.E	III/b	199406232020121004	Penata Layanan Operasional
18	Jhon Meris Nainggolan S.H., M.H	Letda Chk	21050308250583	Panitera Pengganti
19	Muhammad Zainuddin Nasution S.H.	Letda Chk	21050025350285	Panitera Pengganti
20	Angger Irwanto, S.Kom	III/a	198802182021011001	Penata Layanan Operasional
21	Wahyu Jatmiko	Peltu Bah	88925	Panitera Pengganti
22	Irson Jaya, S.H.	Serma	21050275730484	Pengelola Penanganan Perkara
23	Boy Irianto Jaya	Serma	21050275990286	Pengelola Penanganan Perkara
24	Gatot Endro Darminto	Serka	31970156580975	Pengelola Penanganan Perkara
25	Eva Mutiara Sembiring, A.Md.	II/c (CPNS)	199611132022032013	Pengelola Penanganan Perkara
26	Jihan Rahayu Ningsih, A.Md	II/c (CPNS)	199701072022032016	Pengelola Penanganan Perkara
27	Godfrits Maradona Raubun	PPNPN	-	Pengemudi
28	Febriyanti Pengulu	PPNPN	-	Pramubakti
29	Aris Lamidi	Pratu	31200557060298	Bantuan Personil
30	Ahmad	Prada	1722103030012389	Bantuan Personil
31	Reynald Wenseslaus Kalangi	Prada	1722111010015405	Bantuan Personil

- Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	HAKIM MILITER	Kolonel Laut (H) Slamet Widada, S.H., M.H. NRP .14131/P
2		Letkol Chk Panjaitan Hotman M.T., S.H.,M.H. NRP 11000022761076
3		Mayor Chk Hengki Afandi, S.H., M.H NRP. 11040016470180

4		Mayor Laut (H) Awang Setyadi Bawana S.H. NRP. 17305/P
5		Mayor Chk Iskandar, S.H., M.H. NRP . 21960346030574
6		Mayor Chk Ardiansyah, S.Pd.I., S.H., M.H. NRP. 11080095210883
7		Mayor Chk James C.D Tetelepta, SH NRP. 11080105450585
8		Kapten Chk Aditya Wicaksono, S.H. NRP. 11100004840584
9	PANITERA	Kapten Chk Indra Sudarta, S.H. NRP. 21950302891173
10	PANITERA MUDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H. NRP. 21010017470281</li> <li>- Lettu Chk Ali Yusuf, S.H NRP. 21980253770977</li> </ul>
11	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letda Chk Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H NRP. 21050308250583</li> <li>- Letda Chk M. Zainuddin Nasution, S.H. NRP. 21050025350285</li> <li>- Peltu Bah Wahyu Jatmiko NRP 88925</li> </ul>
12		Serma Irsan Jaya, S.H. NRP 21050275730484
13	PROVOST	Serma Boy Irianto Jaya NRP 21050275990286
14		Serka Gatot Endro Darminto NRP 31970156580975



**A. Mutasi**

Mutasi masuk dan keluar di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 secara keseluruhan sebanyak 70 orang dengan rincian sebagai berikut:

Data Mutasi Masuk Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya.

No	Nama/pangkat/ NRP/NIP	Jabatan		No.tgl. Surat
		Lama	Baru	
1	2	3	4	5
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya				
1	Mayor Chk Sugandi, S.H	Pamen Mabes TNI AD	Panitera Pengganti Dilmilti III Surabaya	Sprin Kadilmiltama No : 70/KPMU/SP.KP4.1.3/II/2024, 1 Februari 2024
2	Kolonel Laut (H) Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H	Hakim Militer Tinggi Dilmilti I Medan	Hakim Militer Tinggi Dilmilti III Surabaya	Sprin Kadilmiltama Nomor: 129/KPMU/S.P.KP1.2.2/II2024, 21 Februari 2024
3	Nonikca Frence Tiara, S.H.	-	CPNS Analis Peradilan Militer Dilmilti III Surabaya	SK CPNS Nomor 963/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024, 25 April 2024
4.	Reza Aziz Pasya, S.H	-	CPNS Analis Peradilan Militer Dilmilti III Surabaya	SK CPNS Nomor 962/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024, 25 April 2024
5.	Kolonel Kum Dr. Tri Ahmad B, S.H.,M.H	Waka Dilmilti II Medan	Waka Dilmilti III Surabaya	Kep KMA No : 113/KMAIV/2024, 26 April 2024
6.	Kolonel Pom Djati Santoso, SH, MH	Sekretaris Dilmilti I Medan	Sekretaris Dilmilti III Surabaya	Skep Sekretaris MARI Nomor 3428/SEK/SK.KP4.1.3/VII/2024, 15 Juli 2024
7.	Letkol Chk Dearby Tatulus Peginusa, SH	Panmud Pidana Dilmilti I Medan	Panmud TUM Dilmilti III Surabaya	Skep Dirjen Nomor 116/DJMT/SK.KP.4.1.3/VIII/2024, 1 Agustus 2024
8.	Serka Bagus Ramdhani	Ba Mabes TNI AD	Pengolah Data Informasi Dilmilti III Surabaya	Skep Sekretaris MARI Nomor 4169/SEK/S.K.KP\$.1.3/IX/2024, 27 September 2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILT III SURABAYA TAHUN 2024

9.	Sertu Muhammad Arief Al Hafids	Ba Mades TNI AU	Pengadministrasi Perkantoran Dilmilti III Surabaya	Skep Sekretaris MARI Nomor 4171/SEK/S K.KP4.1.3/IX/2024, 27 September 2024
10.	Kolonel Kum Muh. Nirwan Said, SH, MH	Panitera Dilmiltama	Panitera Dilmilti III Surabaya	Skep Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 181/DJMT/S K.KP4.1.3/X/2024, 3 Oktober 2024
Pengadilan Militer III-12 Surabaya				
1.	M. Arif Sunarso, S.H., M.H. Letkol Chk 110200065710974	Hakim Militer Dilmil III-19 Jayapura	Anggota Pokkimmil Gol. V Dilmil III-12 Surabaya	203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 24 24-10-2024
2.	Lidya, S.H., M.H. Mayor Laut (H/W) 17323/P	Hakim Militer Dilmil I-06 Banjarmasin	Anggota Pokkimmil Gol. V Dilmil III-12 Surabaya	203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 24-10-2024
3.	Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) 17599/P	Hakim Militer III-17 Manado	Anggota Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-12 Surabaya	203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 24-10-2024
4.	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum		Panitera Muda Pidana	191/DJMT/S K/KP.4.1.3/X/2024  24-10-2024
Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1.	Lettu Kum Gatot Robby Bhaskara, S.H. NRP 544096	Panitera	Panitera Penganti II-02 Jakarta	Keputusan Dirjenbadilmiltun MARI Nomor 25/DJMT/SK. KP4.1.3/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Tugas Dirbinganismil Nomor 40/DJMT.2/K P1.2.2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
2	Mayor ChkHadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. NRP 11030043370581	Waka	Angpokkimmil Gol V Dilmil III-18 Ambon	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 203/KMA/SK. KP1.2.2/IX/2024 tanggal 24 september 2024 dan Surat Tugas Dirjen

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

				Badilmiltun MARI Nomor 294/DJMT/S P.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 25 september 2024.
3	Mayor Laut (H) Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H., NRP 18883/H	Angpokimmil Gol VI	Angpokimmil Gol V Dilmil II-10 Semarang	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 294/DJMT/S P.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 25 September 2024
Pengadilan Militer III-14 Denpasar				
1	Muhammad Rizal, S.,H.,M.H Letkol Chk NRP 1101003680078	Angpokimmil Gol. IV Dilmil II-08 Jakarta	Waka Dilmil III-14 Denpasar	Miltama/Sprin/378/KP.04.1/V III/2023
2	Kus Indrawati, S.H.,M.H Letkol Chk (K) NRP 11980036240871	Angpokimmil Gol. V Dilmil II-12 Surabaya	Angpokimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar	Miltaama/Sprin/167/KP.04.6 /IV/2023
3	Dianing Lusiasukma, S.H..M.H Kapten Chk (K) NRP 21980349810277	Pama MA	Angpokimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar	Miltama/Sprin/165/KP.04.6/I V/2023
4.	Johanes S, Taruk, S.H.,MH Letkol Chk 2910010890171	Angpokimmil Gol. V Dilmil mIII-16 Makassar	Angpokimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar	W3.Mil03/936/ Sprin/VII/2023
5	Viktor Januaris Berutu Pratu NRP 31170218440198	Ta Mabes TNI	Pengadministrasi register Perkara Dilmil III-14 Denpasar	480/SEK/KP.I/ iv/2023
6	Ketut Gede Wiguna, S.IP Penata Muda/ 199640615202012100	Analisis SDM Dilmil III-16 Makassar	Analisis SDM Dilmil III-14 Denpasar	KEP/479/SEK/ KP.I/SK/IV/2023
Pengadilan Militer III-15 Kupang				
1	Mayor Chk Nandar Fransiska, S.H	Analisis Perkara Peradilan Dilmil III-16 Makassar	Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-15 Kupang	27/DJMT/KP1.2.2/I/2024
2	Kapten Chk Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I.	Analisis Perkara Peradilan Dilmil III-16 Makassar	Pokkimmil Gol. VII Dilmil III-15 Kupang	27/DJMT/KP1.2.2/I/2024
3	Mayor Chk Hendro Cahyono, S.H., M.H.	Wakil Kepala Pengadilan Militer III-15	Pokkimmil gol. VI Dilmil I-05 Pontianak	203/KMA/SK.K P1.2.2/IX/2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

			Kupang		
4	Mayor Chk Kurniawan Setyanto, S. H., M.I.P.		Pokkimmil Gol. VI Dilmil III-15 Kupang	Pokkimmil Gol. VI Dilmil II-10 Semarang	203/KMA/SK.K P1.2.2/IX/2024
5	Mayor Chk Subiyatno, S.H., M.H.		Pokkimmil Gol. VI Dilmil II-08 Jakarta	Waka Dilmil III-15 Kupang	203/KMA/SK.K P1.2.2/IX/2024
6	Letnan Kolonel Chk Agustono, S.H., M.H.		Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang	Pokkimmil Gol. V Dilmil II-08 Jakarta	203/KMA/SK.K P1.2.2/IX/2024
7	Letnan Kolonel Joko Trianto, S.H., M.H.		Pokkimmil Gol. V Dilmil III-18 Ambon	Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang	203/KMA/SK.K P1.2.2/IX/2024
8	Kapten Chk Irwan Idris, S.H.		Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang	Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar	191/DJMT/SK.KP4.1.3/X/2024
9	Kopda Yanus Dangu		TA Mahkamah Agung	Pengadministrasi Perkantoran Dilmil III-15 Kupang	4883/SEK/SK.KP4.1.3/XI/2024
<b>Pengadilan Militer III-16 Makassar</b>					
1	Mayor Chk Yanuar Dwi Prasetyo, S.H. NRP 11060023120185		Analisis Perkara Peradilan	Pokkimmil Gol VI Dilmil III-16	16/KMA/SK.KP 1.2.2/II/202401-02-2024
2	Mayor Laut (H) Juliansyah, S.H., M.H. NRP 18888/P		Analisis Perkara Peradilan	Pokkimmil Gol VI Dilmil III-16	16/KMA/SK.KP 1.2.2/II/202401-02-2024
3	Letkol Chk Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H. NRP 11010026970679		Hakim Gol V Dilmil MA	Pokkimmil Gol V Di;mi; III-16 Makassar	16/KMA/SK.KP 1.2.2/II/202401-03-2024
4	Muhammad Imam, S.H. NIP 199205302019031006		Klerek - Analisis Perkara Peradilan	2895/SEK/SK.KP4.1.3/IV/202	01-05-2024
5	Jacob Madeira Amaral, Serka NRP 31960282310177		Pengolah Data dan Informasi	4170/SEK/SK.KP4.1.3/IX/2024	01-10-2024
6	Tamrin, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 21960347280475		Panitera	116/DJMT/SK.KP4.1.3/VIII/2024	9-12-2024
<b>Pengadilan Militer III-17 Manado</b>					
1	Kapten Chk Adrianus, S.H		Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado	Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1162/IX/2024
2	Letda Chk Amiruddin, S.H		Panitera Pengganti Gol. VIII Pengadilan Militer III-19 Jayapura	Panitera Pengganti Gol. VIII Pengadilan Militer III-17 Manado	Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

				Kep/1162/IX/2024
<b>Pengadilan Militer III-18 Ambon</b>				
1	Erlangga Prasady, S.H., M.H. Letda Chk/ 21080618760289	Panitera Pengganti Gol. XI Dilmil III-18 Ambon	Kep/723/VII/2023 Tgl. 7 Juli 2023	18 Januari 2024
2	Kiki Parlaungan Lubis, S.H. Mayor Chk /11040007551078	Anggota Pokkimmil Gol.V Dilmil III-18 Ambon	16/KMA/SK.KP1.2.2/I/2024 Tgl. 17 Januari 2024	1 Februari 2024
3	Hadiriyanto, SIP., S.H., M.H. Mayor Chk/ 11030043370581	Anggota Pokkimmil Gol.V Dilmil III-18 Ambon	203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 Tgl. 4 November 2024	24 September 2024
4	Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk/ 21990110790279	Panitera Dilmil III-18 Ambon	191/DJMT/SK.KP4.1.3/IX/2024 Tgl. 24 Oktober 2024	6 Desember 2024
<b>Pengadilan Militer III-19 Jayapura</b>				
1	Hengky Afandi, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11040016470180	Pamen Dilmil MA	Anggpokimmil Gol VI Dilmil III-19 Jayapura	61/KMA/SK/IV/ 2023 tanggal 03 April 2023
2	Awang Setyadi Bawana, S.H., Mayor Laut (H) NRP. 17305/P,	Pamen Dilmil MA	Anggpokimmil Gol VI Dilmil III-19 Jayapura.	61/KMA/SK/IV/ 2023 tanggal 03 April 2023
3	Iskandar, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 21960346030574	Pamen Dilmil MA	Anggpokimmil Gol VI Dilmil III-19 Jayapura	61/KMA/SK/IV/ 2023 tanggal 03 April 2023
4	Aditya Wicaksono S.H., Kapten Chk NRP. 11100004840584	Pamen Dilmil MA	Anggpokimmil Gol VI Dilmil III- 19 Jayapura	61/KMA/SK/IV/ 2023 tanggal 03 April 2023
5	Panjaitan Hotman M.T, S.H., M.H Letkol Chk NRP. 11000022761076	Kadilmil III-15 Kupang	Wakadilmil III-19 Jayapura	284/DjMT /KEP /KP.00.3/ VII/2022 tanggal 08 Juli 2022
6	Ali Yusuf, S.H., LettuChk NRP 21980253770977	Pama MA	Panitera Pengganti Gol.VIII Dilmil III-19 Jayapura.	302/ DjMT /KEP /KP.00.3/ VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022.
7	Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H Letda Chk NRP. 21050308250583	Pama Mabes TNI	Panitera Pengganti Gol IX Dilmil III-19 Jayapura	455/KPMU/SP. KP4.1.3/IX/2023 tanggal 25 September 2023
8	Muhammad Zainuddin Nasution, S.H. Letda Chk NRP. 21050025350285	Pama Mabes TNI	Panitera Pengganti Gol IX Dilmil III-19 Jayapura	455/KPMU/SP. KP4.1.3/IX/2023 tanggal 25 September 2023

Data Mutasi Keluar pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya.

No	Nama/Pangkat/ NRP/NIP	Jabatan		No.Tanggal surat
		Lama	Baru	
1	Letkol Chk Reza Yanuar, S.E.,S.H	Panmud TUM Dilmilti III Surabaya	Panmud Pidana Dilmilti I Medan	603/KPMU/S P.KP4.1.3/VI II/2024, 28 Agustus 2024
2	Kolonel Chk Anwar, S.H.,M.H	Sekretaris Dilmilti III Surabaya	Dilmilti I Medan	3428/SEK/S K.KP4.1.3/VI I/2024, 15 Juli 2024
3	Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H.,M.H	Panitera Dilmilti III Surabaya	Panitera Dilmilti I Medan	181/DJ MT/SK. KP4.1.3/X/2024, 3 Oktober 2024
4	Mayor Chk Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H	Panitera Pengganti Dilmilti III Surabaya	Panmud Pidana Dilmilti II Jakarta	603/KP MU/SP. KP4.1.3/VIII/2024, 28 Agustus 2024
<b>Pengadilan Militer III-12 Surabaya</b>				
1	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 544097	Panitera Pengganti Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Panitera Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun	25/DjMT/SK. KP4.1.3/I/2024 19-01-2024
<b>Pengadilan Militer III-13 Madiun</b>				
1	Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Kum NRP 544096	Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun	Panitera Pengganti Pengadilan Militer II – 02 Jakarta	40/DJMT.2/KP1.2.2/I/2024 tanggal 31 Januari 2024
2	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581	Wakadilmil Pengadilan Militer III-13 Madiun	Angpokkimmil Gol V Dilmil III-18 Ambon	203/KMA/S K.KP1.2.2/I X/2024 tanggal 24 september 2024
<b>Pengadilan Militer III-14 Denpasar</b>				
1	Mahpul Saepuloh, S.H Mayor Chk	Panitera Dilmil III-14 Dps	Panitera Dilmil Balikpapan	116/Djmt/SK.KP 4.1.3/VII I/2024, tgl 01-8-2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

2	Irwan Idris, S.H. Kapten Chk	Panitera Dilmil III-15 Kupang	Panitera Dilmil III- 14 Denpasar	191/Djm t/SK.KP 4.1.3/X/ 2024, tgl 24- 10-2024
3	I Wayan Parna, S.H. MH. Pembina IV A	Sekretaris Dilmil III-14 Dps	Analias perkara peradilan PTUN Mataram	112/Djm t/SK.KP 4.1.3/VII / 2024, tgl 26 - 7-2024
<b>Pengadilan Militer III-15 Kupang</b>				
1	Mayor Chk Hendro Cahyono, S.H., M.H.	Wakil Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang	Pokkimmil gol. VI Dilmil I-05 Pontianak	203/KMA /SK.KP1. 2.2/IX/20 24 04-11- 2024
2	Letnan Kolonel Chk Agustono, S.H., M.H.	Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang	Pokkimmil Gol. V Dilmil II-08 Jakarta	203/KMA /SK.KP1. 2.2/IX/20 24 28-11- 2024
3	Kapten Chk Irwan Idris, S.H.	Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang	Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar	191/DJM T/SK.KP 4.1.3/X/2 024 29-11- 2024
<b>Pengadilan Militer III-16 Makassar</b>				
1	Ayik Triandi Asmara, S.H Kapten Chk NRP 21990110790279	Panitera	191/DJMT/SK/KP4.1.3/ X/2024	6-12-2024
<b>Pengadilan Militer III-17 Manado</b>				
1	Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H.,	Waka Dilmil III-17 Manado	Angpokkimmil Gol.VI Pengadilan Militer III- 16 Makassar.	Sprin Kadilmil III- 17 Manado Nomor : W3- Mil.06/136/ KP.001/II/2 023
<b>Pengadilan Militer III-18 Ambon</b>				
1	Muhammad Imam S., S.H. 1992053020190310 06	Penata Muda Tk. I / III/b	25/KPM.W3- Mil07/SPRIN/V/2024 Tgl. 16 Mei 2024	21 Mei 2024
2	Joko Trianto, S.H., M.H. Letkol Chk/ 11020016150177	Anggota Pokkimmil Gol.V Dilmil III-18 Ambon	203/KMA/SK.KP1.2.2/I X/2024 Tgl. 24 September 2024	22 November 2024
3	Juspindeli Girsang, S.H. Lettu Chk/ 21010017470281	Panitera Pengganti Gol. VIII Dilmil III-18 Ambon	191/DJMT/SK.KP4.1.3/ X/2024 Tgl. 24 Oktober 2024	22 November 2024

Pengadilan Militer III-19 Jayapura				
1	Dandi Andreas Sitompul, S.H. Letkol Chk NRP. 11000036211078	Hakim Dilmil III-19 Jayapura	Angpokkimmil Pengadilan Militer II - 10 Semarang	16/KMA/SK. KP1.2.2/I/2024 tanggal 17 Januari 2024
2	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11020006580974	Hakim Militer Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	Angpokkimmil Pengadilan Militer III - 12 Surabaya	203/KMA/SK .KP1.2.2/IX/2024 tanggal 06 September 2024
3	Alep Priyoambodo, S.H, Kapten Chk NRP. 11120031550786	Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura	Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Militer I - 04 Palembang	4160/SEK/SK.KP4.1.3 /IX/2024 tanggal 26 September 2024
4	Amiruddin, S.H. Lettu Chk NRP. 21080776820786	Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-19 Jayapura	Panitera Pengganti Pengadilan Militer III - 17 Manado	322/DJMT/SP.KP1.2.9 /X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024



**B. Promosi**

Promosi merupakan salah satu cara agar Organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan Pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan Pangkat dan kenaikan Jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan Pangkat, dibedakan kewenangannya atas Personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan kebutuhan Pegawai dalam jabatan tertentu.

1. Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya pada Tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:

*Data Kenaikan pangkat Personel TNI dan PNS Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer di bawahnya Tinggi III Surabaya*

No	Nama/Pangkat/ NRP	Pangkat		TMT	Dasar
		Lama	Baru		
<b>Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya</b>					
1	Peltu Adi Sukadar	Pelda	Peltu	1-10-2024	Kep/843-33/IX/2024, 3 -9-2024
2	Kopda Deddi Pradana S NRP 31130165410494	Praka	Kopda	1-10-2024	Kep /843-33/IX/2024, 3 -9-2024
3	Afni Syafaatun, S.A.P NIP 199609182020122 005	Penata Muda Gol. III/a	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	1 Desember 2024	Kep Kadilmilti III Surabaya Nomor 735 /KPMT.W3.MH/KP2.1.1/XI/2024, 28 November 2024
4	Fajar Eka Pratomo, S.E NIP 199201152020121 006	Penata Muda Gol. III/a	Penata Muda Tk. I Gol. III/b	1 Desember 2024	Kep Kadilmilti III Surabaya Nomor 734/KPMT.W3.MH/KP2.1.1/XI/2024, 28 November 2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

Pengadilan Militer III-12 Surabaya					
1	Suhendra, S.H. Pelda / 21010150930781	Pelda	Peltu	Kep/191- 33/III/2024 6 Maret 2024	01-04-2024
2	Nuryati, S.H., M.H. Serma (Hum/W) / 104997	Serma	Pelda	Kep/596/III/20 24 20 Maret 2024	01-04-2024
3	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/a	Penata Muda (III/a)	Penata Muda TK I (IIIb)	736/KPMT.W 3.Mil/KP2.1.1 /XI/2024	01-12-2024
4	Safri Adi Husada, A.Md. PNS Ilc	Pengatur (II/c)	Pengatur Tk I (IId)	737/KPMT.W 3.Mil/KP2.1.1 /XI/2024	01-12-2024
Pengadilan Militer III-13 Madiun					
1	Ahmad Faizal, Pelda NRP 1940155520273	Pelda	Peltu	1/4/2024	Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/93- T.III/III/2024 tanggal 6 Maret 2023
2	Dodik Sugeng Prasetyo Serma NRP 531770	Serma	Pelda	1/4/2024	Keputusan Kasau Nomor Kep/93- T.III/III/2024, 21 Maret 2024
3	Catur Yulianto Kopda NRP 529007	Kopda	Koptu	1/4/2024	Keputusan Kasau Nomor Kep/94- T.III/III/2024, 21 Maret 2024
4	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. NRP 544097	Lettu	Kapten	1/4/2024	Keputusan Kasau Nomor Kep/258- T.III/IX/2024, 26 September 2024
5	Mulyono, S.H. NRP 31970176050877	Serka	Serma	1/4/2024	Keputusan Kasad Nomor Kep/843- 33/IX/2024, 03 September 2024
6	Zakiah, S.E. NIP 1991100820201220 07	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	1/12/2024	Sk Kadilmilti III Surabaya Nomor 739/KPMT.W3.Mil/ KP.1.1/XI/2024, 28 November 2024
7	Raudya Rifka Zahra, A.Md.	Pengatur II/c	Pengatur II/d	1/12/2024	738/KPMT.W3.Mil/ KP.1.1/XI/2024 tanggal 28 November 2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

Pengadilan Militer III-14 Denpasar					
1	Kus Indrawati, SH.,MH	Kolonel Chk (K)	Sprin: 207/KPMU/SP.KP. 2.1.1/III/2024	Kolonel Chk (K)	01-06-2024
2	I.G.A.N Wahyu Permadi, S.H.	Penata Tk I III/d	SK/693/KPMT. W3.Mil/KP2.1.1/XI/ 2024	Penata Tk I III/d	01-06-2024
3	Ketut Suriani, SH.	Penata Muda TK I III/b	SK/553/KPMT. W3.Mil/SK.KP 2.1.1/IX/2024.	Penata III/c	01-06-2024
4	Ketut Gede Wiguna, S.IP.	Penata Muda TK I III/b	SK/740/KPMT. W3Mil/KP2.1.1 /XI/2024	Penata Muda Tk I III/b	01-06-2024
5	Ni Kade Yuliantini, A.Md,	Pengatur TK I II/d	SK/741/KPMT. W3.Mil/KP2.1.1/ XI/2024	Pengatur TK I II/d	01-06-2024
6	Victor Januaris	Praka	Kep/843-33/IX/ 2024	Praka	01-06-2024
Pengadilan III-15 Kupang					
1	Marloyati Lado, S.H.	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk. I III/b	247/KPMT. W3.MIL/KP 2.1.1/V/2024	01-06-2024
2	Mayor Chk Nandar Fransiska, S.H.	Kapten Chk	Mayor Chk	KEP/1140/IX/2024	01-10-2024
3	Ridwan Permana Putra, S.E.	Pengatur II/c	Penata Muda III/a	554/KPMT. W3.Mil/SK. KP2.1.1/IX/ 2024	01-10-2024
4	Serka Hasbi Pasolo, S.H., M.H.	Sertu	Serka	Kep/843-33/IX/2024	01-10-2024
5	Ridwan Permana Putra, S.E.	Pengelola Penanganan Perkara	Penata Layanan Operasional	4862/SEK/S K.KP4.1.3/X II/2024	15-11-2024
6	Muhammad Ghyats Lizuardi, A.Md	Pengatur II/c	Pengatur Tk. I II/d	742/KPMT. W3.Mil/KP2.1.1/XI/2024	01-12-2024
7	Tia Agustina Murtiani, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Pengolah Data dan Informasi	4923/SEK/S K.KP4.1.3/X II/2024	18-12-2024
8	Serka Hasbi Pasolo, S.H., M.H.	Pengadministrasi Perkantoran	Pengolah Data dan Informasi	4922/SEK/S K.KP4.1.3/X II/2024	18-12-2024
Pengadilan Militer III-16 Makassar					
1	Victor Virganthara Taunay, S.H., Letkol Chk NRP 11030045350981	Mayor Chk	Letkol Chk	KEP/1139/IX/2024	1-10-2024
2	Erna Dwi Astuti Letda Har (K) NRP 21930148301271	Peltu (K)	Letda Har (K)	KEP/588/IX/ 2024	1-10-2024
Pengadilan Militer III-18 Ambon					
1	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda Tk. I / III/b	Penata / III/c	246/KPMT. W3.MIL/KP	01 Juni 2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

	199005182009041001			2.1.1/V/2024 4 13 Mei 2024	
2	Rina Deby J. Wattimury, S.H., M.H. 197304012006042001	Penata / III/c	Penata Tk. I / III/d	555/KPMT. W3.Mil/SK. KP2.1.1/IX/2024 7 September 2024	01 Oktober 2024
3	Stany Raprap, S.H., M.H. 198712022006042001	Penata Muda Tk. I / III/b	Penata / III/c	556/KPMT. W3.Mil/SK. KP2.1.1/IX/2024 7 September 2024	01 Oktober 2024
4	Dicky Dharma Saputra, S.Ak. 199606222022031007	Pengatur / II/c	Penata Muda / III/a	557/KPMT. W3.Mil/SK. KP2.1.1/IX/2024 7 September 2024	01 Oktober 2024
5	Hendra Yanto, S.H. 21080776901187	Sersan Mayor	Letnan Dua	Kep/696/XI/2024 12 November 2024	14 November 2024
<b>Pengadilan Militer III-19 Jayapura</b>					
1	James Chris Deweight Tetelepta, SH	Kapten Chk	Mayor Chk	1/10/2024	322/djmt/SP.KP1.2.9/X/2024

2. Kenaikan Jabatan

Pegawai Dilmilti III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya, pada Tahun 2023 secara keseluruhan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut;

No	Nama / NRP/ NIP	Jabatan lama	Jabatan baru	TMT
<b>Pengadilan Militer III-12 Surabaya</b>				
1	Nuryati, S.H., M.H. Pelda (Hum/W) / 104997	Pengelola Perkara	Panitera Pengganti Gol. IX	08-07-2024
2	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata (III/c) NIP 197608251998032002	Pengadministrasi Perkantoran Panmud Hukum	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum	06-06-2024
3	Suryono, Koptu NRP 31060143880985	Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum dan Keuangan	Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum	06-06-2024
<b>Pengadilan Militer III-13 Madiun</b>				

Pengadilan Militer III-16 Makassar				
1	Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. / 110300045350981	Pokimmil Gol VI Dilmil III-16 Makassar	Pokkimmil Gol V Dilmil III-16 Makassar	17-01-2024
Pengadilan Militer III-17 Manado				
1	Mayor Chk Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H.	Klerek – Analisis Perkara Dilmil I-02 Medan	Anggota Pokkimmil Gol.VI Pengadilan Militer III-17 Manado	72/KPMU/SP.KP4.1.3/I/2024
2	Mayor Chk Patta Imang, S.H.	Angpokkimmil Gol. VI Pengadilan Militer III-17 Manado	Angpokkimmil Gol. V Pengadilan Militer III-17 Manado	72/KPMU/SP.KP4.1.3/I/2024
3	Kapten Chk Adrianus, S.H.	Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	menjadi Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado	Kep/1162/IX/2024
Pengadilan Militer III-18 Ambon				
1	Muhammad Adib Hadriansyah, S.E. Penata Muda / III/a 199207192020121006	Penata Layanan Operasional	Pranata Keuangan APBN Mahir	3175/SEK/SK.KP4.1.3/VI/2024 Tgl 14 Juni 2024
2	Stany Raprap, S.H Penata / III/c 198712022006042001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	3398/SEK/SK.KP4.1.3/VII/2024 Tgl 8 Juli 2024
3	Dicky Dharma Saputra, S.Ak. Penata Muda III/a 199606222022031007	Pengelola Penanganan Perkara	Penata Layanan Operasional	4924/SEK/SK.KP4.1.3/XII/2024 Tgl. 9 Desember 2024

**C. Pensiun**

Data Pensiun di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se-Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada Tahun 2023 Personil TNI maupun PNS sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

*Daftar pensiun TNI dan Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer di bawahnya.*

No	Nama/Pangkat/ NRP/NIP	Jabatan	Nomor dan tanggal Skep	TMT
Pengadilan Militer III-12 Surabaya				
1	Suwoko Serka NRP 31950160391072	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	01-11-2024	01-11-2024
Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1	Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 1984021320092003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	00277/13001/AZ/V/24 02-05-2024	Meninggal Dunia
Pengadilan Militer III-16 Makassar				

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

1	Bagiyo, S.H. Penata Tk.I III/d NIP 196603151992031 002	Kasubbag PTIP	00252/13001/AZIV/2024	01-04-2024
2	Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H. NRP 21000075960980 (Pensiun Meninggal Dunia)	Panitera Muda Pidana (BP di Dilmil III-12 Surabaya)	Kep/582/IX/2024	21-05-2024
<b>Pengadilan Militer III-15 Kupang</b>				
1	Sertu Daud Ena	Pengadministrasi Perkantoran	KEP/238-44/18-V/2024	29-02- 2024

**D. Diklat**

Data Diklat Teknis maupun Non Teknis di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se-Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2024 sebanyak 79 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

*Data Diklat/Bintek/Sosialisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya*

NO 1	Diklat/Bintek/Sosialisasi 2	Penyelenggara 3	Tempat/Waktu 4	Peserta 5
1.	Deklerasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BP HPI)	Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BP HPI)	Zoom Meeting, Dilmilti III Surabaya 12 Januari 2024	Kolonel Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H
2.	Rapart Koordinasi Refleksi Kinerja Tahun 2023 serta Pembinaan dan Pengarahan Rencana Kerja Tahun 2024	Dilmiltama	Zoom Meeting, Dilmilti III Surabaya 22 Januari 2024	Kolonel Chk Esron Sinambela. S.S.S.H.,M.H -Kolonel Chk Anwar, S.H.,M.H -Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H.,M.H
3.	Pertandingan Olah Raga dalam rangka HUT ke 72 Korps Hukum Tahun 2024	Dilmiltama	Dilmiltama, 29 Januari 2024 s.d 1 Februari 2024	Kolonel Kum Muhammad Idris, S.H.,M.H
4.	Pelantikan PD IKAHI Serentak dan Rapat Koordinasi IKAHI	IKAHI Pusat	Pengadilan Tinggi Jakarta tgl 30 Jan 2024	Brigjen TNI Kirto, S.H.,M.H
5.	Pelantikan PD IKAHI Serentak dan Rapat Koordinasi IKAHI	IKAHI Pusat	Pengadilan Tinggi Surabaya tgl 30 Jan 2024	Hakim Militer Tinggi III Surabaya
6.	Bintek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2024	Dilmiltama	Online, Dilmilti III Surabaya 5 s.d 7 Pebruari 2024	Letkol Chk Reza Yanuar. SE.,SH -Mayor Chk Dedi Wigandi, S.Sos.,S.H
7.	Bintek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2024	Dilmiltama	Hotel Mercure Ancol Jakarta 12 s.d 14 Juni 2024	Kolonel Chk rendra Apri Sadewa, S.H.,M.H - Letkol Chk lyahSyafriyah, S.H.,M.H
8.	Bintek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2024	Dilmiltama	Online, Satker 12 s.d 14 Juni 2024	PNS Nila Rukhama, Amd
9.	Rapat Finalisasi Penyusunan Kurikulum Pimpinan Pengadilan, Panitera Pengadilan Peradilan Militer	Diklat MARI	26 s.d 29 Juni 2024 Grand Aston Puncak Hotel & Resort Cianjur-Jawa Barat	Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H
10.	Assesment Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Banding	Dirjen Badilmiltun MARI	10 s.d 11 Juli 2024	Kolonel Kum Muhammad Idris, S.H., M.H
11.	Sosialisasi dan Monitoring	Kepaniteraan	11 Juni 2024	- Brigadir Jenderal Dr. Esron

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

	Penyelesaian Perkara Elektronik	MARI	Hotel Movenpick Surabaya	Sinambela, S.S., S.H., M.H. - Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H. PNS Nila Rukhama, A.Md
12.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Angkatan II Tahun 2024	Mandiri - Satker	24 Juni s.d 11 Juli 2024	-Fahrudin, SE.
13.	Zoom Webinar dengan tema "Kebijakan Lembaga Untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan"	Zoom - Satker	25 Juni 2024	Kolonel CHK (K) Prastiti Siswayani, S.H.
14.	Rapat Finalisasi Penyusunan Kurikulum Pimpinan Pengadilan, Panitera Pengadilan Peradilan Militer	Diklat Kumdil MARI	26 s.d 29 Juni 2024, Grand Aston Puncak Hotel & Resort Cianjur – Jawa Barat	Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
15.	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Angkatan II Tahun 2024	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Peradilan	23 September s.d 2 Oktober 2024	-Fahrudin, SE.
16.	Rapat Koordinasi Kesekretariatan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Ditjen Badilmiltun MARI	23 s.d 25 Oktober 2024 Hotel Platinum Tunjangan Surabaya	Kolonel Pom Djati Santoso, S.H.,M.H
17.	Konsolidasi Tingkat Banding untuk Pengusulan (RKBMN) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 melalui Aplikasi e-Sadewa	Pengadilan Negeri Malang	5 s.d 9 Agustus 2024	- PNS Tubagus Maulana Arief Darma, S.H., M.H Sersan Mayor Nanang Candra Trisnianto, S.H
18.	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Gelombang I dan II secara <i>Blended Learning</i> Tahun 2024	Belajar Mandiri - Satker	5 September s.d 23 Nov 2024	- CPNS Nonikca Florence Tiara, S.H. CPNS Reza Aziz Pasya, S.H
19.	Rapat Koordinasi Kesekretariatan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Ditjen Badilmiltun MARI	23 s.d 25 Oktober 2024 Hotel Platinum Tunjangan Surabaya	Kolonel Pom Djati Santoso, S.H.,M.H
20.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Zoom- Satker	13 s.d 15 November 2024	- PPPK Yusuf Kurniawan, S.E. PPNPN Faisal Dwicky Koco Nugroho
21.	Pelatihan Dasar CPNS (Latsar)	On Campus Balai Diklat	25 s.d 30 Nov	- CPNS Nonikca Florence Tiara,



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

	Golongan III Gelombang I dan II secara <i>Blended Learning Tahun 2024</i>	keagamaan Surabaya	2024	S.H. - CPNS Reza Aziz Pasya, S.H
22.	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian Periode November 2024	Zoom - Satker	22 s.d 29 November 2024 dan 2 Desember 2024	PNS Afni Syafaatun, S.A.P
23.	Pelaksanaan kegiatan Pemetaan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya	Zoom-Satker	25 s.d 28 November 2024	PNS Angga Permana Putra, A.Md.,S.H
24.	Ditunjuk sebagai Mentor/Pembimbing aktualisasi CPNS Mahkamah Agung RI Tahun 2024	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	3 Desember 2024	- Kolonel Pom Djati Santoso, S.H.,M.H Letkol Chk Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
25.	Edukasi Perpajakan tentang Pengenalan Coretax bagi Instansi Pemerintah	Aula KPP Pratama Sidoarjo	4 Desember 2024	- Sersan Mayor Nanang Candra Trisnianto, S.H PNS Angga Permana Putra, A.Md.,S.H.

Daftar Diklat Pegawai / Pelatihan Pegawai Dilmil III-12 Surabaya

No	Diklat / Pelatihan	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Susjabkimmil XXV Tahun 2024	Pusdikbangpers Kodiklat TNI Serpong Tangerang	Pembukaan pendidikan pada tanggal 24 April 2024 dan Penutupan pada tanggal 23 Juli 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I secara <i>blended learning</i> Tahun 2024	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	tanggal 22 April s.d 23 Agustus 2024 dengan system on-off.	Melanti Puspara, S.E. PNS III/c
3	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 Tahun Anggaran 2024	Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI	Pusdiklat Kumdil, 24 Juni s.d. 5 Juli 2024	Safiril Adi Husada, A.Md. PNS IIc Anggraini Esti Rahayu, A.Md. PNS IIc
4	Pelatihan dan Uji Kompetensi Bendahara	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Online 22 s.d. 26 Juli 2024	Dina Astari, A.Md. PNS II/c

	Pengeluaran Tahun Anggaran 2024	(BPPK)		
5	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Sekretaris Pengadilan,	Balitbang Kumdil MARI	Balitbang Kumdil MARI 26 Agustus s.d. 29 November 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS IV/a
6	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan	Balitbang Kumdil MARI	Balitbang Kumdil MARI 26 Agustus s.d. 29 November 2024	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.
7	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Panitera Pengadilan	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	26 Agustus s.d. 29 November 2024	Kapten Kum Kholip, S.H.
8	Pelatihan online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	Online 28 s.d. 30 Oktober 2024	Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d
9	Pelatihan online Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Online 4 s.d. 6 November 2024	- Letkol Chk Arif Sudibya, SH, MH. - Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d
10	Pelatihan Singkat Terkait Paradigma Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Hakim Tingkat Pertama Dan Hakim Tingkat Banding Militer	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	Lombok Tahap I (Mandiri E-learning) 13 s.d. 15 November 2024 Tahap II (Penyampaian materi): 18 s.d. 22 November 2024	Kolonel CHK Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Tabel 13 Daftar Bimtek Pegawai

No	Bimtek	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimbingan Teknis Hakim Militer “Penyelenggaraan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer “.	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring Tanggal 26 s.d 28 Juni 2024	- Letnan Kolonel Chk Muhamad Saleh, S.H., M.H. - Letnan Kolonel Chk Musthofa, S.H., M.H.
2	Bimtek Hakim Militer TA. 2024. “ Bimbingan Penyelesaian Perkara Restorative Justice”	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta 15 s.d. 17 September 2024	Kolonel CHK Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. Letkol Kum Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Mayor Chk Musthofa, S.H., M.H.

3	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 “Penyelarasan dan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Menuju Terwujudnya Pengadilan Yang Tangguh”	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring 9 s.d. 11 September 2024	1. Peltu Rudianto, S.H. 2. Pelda (Hum/W) Nuryati, S.H., M.H.
4	Peran Pengawasan dan Pembinaan Pimpinan Satker	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta 13 s.d. 15 September 2024	Kolonel CHK Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
5	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer “Pelaksanaan Pidana Bersyarat”	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online 13 s.d. 15 November 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H.
6	Bimbingan Tehnis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online 13 s.d. 15 November 2024	Hando Falfalah PPNPN

Tabel 14 Daftar Sosialisasi Pegawai

No	Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik	Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia	Movenpick Hotel Surabaya City Tanggal 11 Juni 2024	Kapten Kum Kholip, S.H. Fransisca Anggelia R, S.H. Koptu Mus Marzuki,
2	Sosialisasi tata cara pemotongan iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain kepada instansi vertikal	BPJS Cabang Sidoarjo	Sidoarjo Tanggal 20 Juni 2024	1. PNS. Setijo Utomo PNS III d 2. Kopda Wahyu Ari Wijaya
3	Sosialisasi pengenalan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2),	Kanwil DJKN Jawa Timur	Surabaya Tanggal 20, 21 Juni 2024	PNS Ainur Rofiq PNS III d Serka Feri Afzudi
4	Sosialisasi Sakti Modul LPJ Bendahara, Penerapan Digital Payment dan Sosialisasi Anti Gratifikasi	KPPN Surabaya II	Surabaya Tanggal 20 Juni 2024	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/a

5	Sosialisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta 15 s.d. 17 September 2024	Letnan Kolonel Kum Jonarku, S.H., M.H.
6	Kegiatan pembekalan kepada Perwira Korps Hukum TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya	Kepala Staf Angkatan Laut	Aula Pusdikbanmin Kodiklatal 28 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H.</li> <li>- Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.</li> <li>- Mayor Laut (H) Tono Novianto, S.H., M.H.</li> <li>- Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H.</li> </ul>

Tabel 15 Daftar Peserta Ujian/Test Kenaikan golongan

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Tes Casis Diktupa TNI AD TA. 2025	KASAD	Malang, 30 Oktober s.d. 2 November 2024	Serka Aji Wibayu, S.H., M.H.

Tabel 16 Daftar Pengembangan Kompetensi SDM

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Fit and Proper test calon Hakim Militer Utama dan Calon Hakim Militer Tinggi Banding dan Eksaminasi Calon Hakim Militer Tinggi dan Calon Wakil Kepala Pengadilan Militer Type B	Dirjen Badilmiltun MA RI	Jakarta Timur, 29 s.d. 31 Juli 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
2	Susjabkimmil XXV Tahun 2024	Pusdikbangpers Kodiklat TNI Serpong Tangerang	Pembukaan pendidikan pada tanggal 24 April 2024 dan Penutupan pada tanggal 23 Juli 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
3	Pemetaan Pegawai di Lingkungan MA RI	Badan Strajak, Pusdiklat Menpim MA RI	Virtual 25 November 2024	PNS Ratih Dina Agustin, S.H. PNS III/c

Tabel 17 Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan

No	Jenis Pembinaan / Rakor	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	HUT ke-72 Korps Hukum TNI Angkatan Darat	Kumdam V/Brawijaya	Malang, 4 Maret 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILT I III SURABAYA TAHUN 2024

	Tahun 2024			
2	Seminar Aksi Perubahan Pelayanan Publik	Balitbang Kumdil MA RI	Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 21 dan 22 Agustus 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
3	Release APBN bulan Agustus 2024	Kepala KPPN Surabaya II	Surabaya, 14 Agustus 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b
4	Penyusunan Pedoman Implementasi <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MA RI	Yogyakarta 15 s.d. 17 September 2024	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.,M.A.P.
5	Peran Pengawasan dan Pembinaan Pimpinan Satker	Dirjen Badilmiltun MA RI	Yogyakarta, 13 s.d. 15 September 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
6	Asistensi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 Korwil Jawa Timur	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 27 September 2024	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b Serka Feri Afzudi
7	Rapat Koordinasi Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	Dirjen Badilmiltun MA RI	Surabaya, 23 s.d. 25 Oktober 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d
8	Pengawasan dan pengamatan hasil putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Lemasmil III Surabaya dan pembacaan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Lemasmil III Surabaya, 16 Oktober 2024	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H. Mayor Chk Reza Faisal, S.H., M.H. Mayor Laut (H) Tono Novianto, S.H., M.H. Kapten Chk Dennis Carol Napitupulu, S.E., S.H., M.M. Kapten Kum Andrie Gunawan, S.H. Peltu Rudianto, S.H. Pelda (Hum/W) Nuryati, S.H., M.H. Koptu Mus Marzuki
9	Pembekalan kepada Perwira Korps Hukum TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya	Kasal	Aula Pusdikbanmin Kodiklatal, 28 Oktober 2024	Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.,M.A.P. Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H. Mayor Laut (H)

				Tono Novianto, S.H., M.H.
10	Pembinaan Kesekretariatan	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Yogyakarta, 31 Okt 2024 s.d. 2 Nov 2024	Mayor Laut Mirza Ardiyansah, SH, MH, MAP.
11	Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil Kajian	Kabadan Strajak Diklat Kumdil MA RI	Kampus III Universitas Malang	- Kolonel CHK Sugeng Aryanto, S.H., M.H. M.H. - Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H - Mayor Laut (H) Ruslan, S.H., M.H.

**KEGIATAN MAGANG CALON HAKIM MILITER**

Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil MARI Nomor 386/Bld.3/Dik/S/3/2023 tanggal 14 Maret 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima Magang Diklat PPCH Terpadu Peradilan Militer Angkatan V sebanyak lima orang 5 (lima) orang atas nama :

1. Kasman Yori Harefa, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 17817/P;
2. Reza Faisal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080091820582;
3. Tono Novianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 17829/P;
4. Dennis Carol Napitupulu, S.E., S.H., M.M. Kapten Chk NRP 11110032300584;
5. Andrie Gunawan, S.H. Kapten Kum NRP 543272.

**Tabel 8 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa**

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Penelitian dan wawancara	20 Mei 2024	24 orang mahasiswa
2	Univ. Widyagama Malang	Kunjungan Akademik	13 Juni 2024	5 orang mahasiswa
3	Univ. Hang Tuah Surabaya	Nota Kesepahaman Bersama	3 Juli 2024	Dekan Fakultas
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magang	8 Juli s.d. 3 Agustus 2024	6 orang mahasiswa
5	Univ. Hang Tuah Surabaya	Magang	8 Juli s.d. 30 Agustus 2024	6 orang mahasiswa
6	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	29 Juli 2024	Siswa Dikmaba XLIII/2 TA 2023 Jur Pomal
7	UIN Walisongo Semarang	Riset Penelitian	5 Juli 2024	1 Orang Mahasiswa
8	Univ. Muhammadiyah Malang	Observasi	30 Juli 2024	2 Orang Mahasiswa
9	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	23 dan 24 September 2024	Siswa Dispespa Hukum TA 2024
10	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	4 September 2024	Siswa Dispespa Pomal TA 2024
11	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	12 dan 19 Oktober 2024	Peserta lomba Persidangan Semu Final National Moot Court

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

	Timur			Competittion (NMCC)
12	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	2 dan 3 Nopember 2024	Peserta lomba Persidangan Semu delegasi kompetensi "NMCC BULAKSUMUR VI"
13	Univ. Kediri	Izin Penelitian	29 November 2024	1 Orang Mahasiswa
14	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Izin Penelitian	29 November 2024	1 Orang Mahasiswa

## Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-13 Madiun

## 1. Tenaga Teknis

- a. Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972, Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H., Kapten Kum NRP 544097 dan Hilmi Azis Raihan, A.Md. II/C NIP 199510062022031009 mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik serta Kelengkapan Berkas Perkara yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 bertempat di Movenpick Hotel Surabaya City sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 89/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 06 Juni 2024.
- b. Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti kegiatan Bimtek Penyelesaian Perkara *Restorative Justice* yang diselenggarakan pada hari Minggu-Selasa tanggal 15-17 September 2024 bertempat di Sahid Yogyakarta sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 131/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
- c. Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI yang diselenggarakan pada hari Minggu-Selasa tanggal 15-17 September 2024 bertempat di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 134/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2024 tanggal 2 September 2024.
- d. Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 mengikuti kegiatan bimbingan teknis meningkatkan kompetensi dan integritas Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Militer tahun anggaran 2024 yang diselenggarakan pada 5 s.d. 7 Februari 2024 secara daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 22/KP-M.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 5 Februari 2024.
- e. Febi Ramona, Serma NRP 31940520920274, Yohanes Hartono, Serka NRP 31960641781076 dan Hilmy Aziz Raihan, Amd, II/ C NIP 199510062022031009 Mengikuti bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama tahun 2024 dengan tema “Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu” dalam rangka ,mewujudkan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum yang diselenggarakan pada 12 s.d. 14 Juni 2024 secara Daring dan Luring sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 84/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024.
- f. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972, Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Bimtek Penyelesaian Perkara Koneksitas yang diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Maret 2023 secara Hybrid sesuai dengan surat Perintah Kadilmil



III-13 Madiun Nomor 98/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

g. Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti Bimtek Penyelesaian Perkara *Restorative Justice* yang diselenggarakan pada 15 s.d. 17 Agustus 2024 bertempat di Hotel Sahid Yogyakarta Jl. Babarsari No 2 Janti Catur Tunggal, Depok, Sleman Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 131/KPM.W3-MIL02/KP7.1/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

h. Ahmad Efendi, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11020002860972 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 mengikuti kegiatan pelaksanaan Program kerja Bimtek Kopetensi Hakim di lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan pada hari Rabu s.d Jumat tanggal 13 s.d 15 November 2024 Dilaksanakan di Hotel Sunlake Waterfornt Resort & Convention JL. Danau Permai Raya Blok C1 Jakara Utara. sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 202/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 06 November 2024.

i. Ahmad Efendi, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Kegiatan Singkat terkait paradikma pembaruan Hukum Pidana bagi Hakim TK pertama dan Banding Peradilan Militer yang diselenggarakan pada hari Rabu-Jumat tanggal 13-15 November 2024 dan Senin - Jumat tanggal 18-22 November 2024 dilaksanakan di Golden Palace Hotel Lombok Jl. Sriwijaya No 38 Kec Cakranegara Kota Mataram NTB sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 204/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 11 November 2024.

## 2. Tenaga Non Teknis

a. Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Pembinaan dan Pengarahan oleh KADILMILTAMA yang diselenggarakan pada hari Senin-Rabu tanggal 22-24 Maret 2024 bertempat di Pengadilan Militer Utama sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 71/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

b. Dodit Puguh Prasetyo, Serma NRP 531806, mengikuti kegiatan Sosialisasi Implementasi NPWP 16 pada Aplikasi gaji yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 09/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2024 tanggal 23 Januari 2024.

c. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 mengikuti

kegiatan asistensi Penyusunan LK Satker Tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis 25 Januari 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 10/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2024 tanggal 25 Januari 2024.

d. Dodit Puguh Prasetyo, Serma NRP 531806 mengikuti kegiatan Sosialisasi penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan PP Nomor 58 TA 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168 Tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari Kamis 1 Februari 2024 bertempat di Aula KPP Pratama Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 14/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2024 tanggal 29 Januari 2024.

e. Dodit Puguh Prasetyo, Serma NRP 531806 mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan *Roll-Out* Penyampaian dan Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran melalui SAKTI yang diselenggarakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 45/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.

f. Gatot Suprpto, Penata Tk I III/d NIP 196805031991031009 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNNP, mengikuti kegiatan Pendampingan Penyelesaian Penertiban BMN secara Luring dalam rangka Implementasi SIMAN V2 yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 bertempat di Aula Lantai 3 Pengadilan Militer Tinggi Surabaya sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 80/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 22 Mei 2024.

g. Zakiah, S.E., Penata Muda III/a mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran/IKPA Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 82/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IV/2024 tanggal 27 Mei 2024.

h. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNNP mengikuti kegiatan asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I tahun 2024 Korwil Jawa Timur yang diselenggarakan pada hari Selasa-Kamis tanggal 25-27 Juni 2024 bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 97/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2024 tanggal 25 Januari 2024.

i. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNNP mengikuti kegiatan asistensi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2024 Korwil Jawa Timur yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 153/KPM.W3-

Mil02/KP7.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024.

j. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti tahapan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 29 Februari 2023 bertempat di Gedung Sekretariat MA Lt. 12 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 32/KPM.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024.

k. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti kegiatan tahapan Seleksi Kopetensi Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 28 Maret 2023 secara daring sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 57/KPM.W3-Mil02/KP7.1/III/2024 tanggal 19 Februari 2024.

l. Samian, S.H., M.M., IV/ A NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan tahun 2024 secara *Blended Learning* tahun 2024 yang diselenggarakan pada 26 Februari s.d. 30 Agustus 2024 secara Mandiri/*Self Learning* dan *Distance Learning* sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 128/KPM.W3-MIL02/KP7.1/VIII/2024W3-Mil02/149/Sprin/II/2023 tanggal 22 Agustus 2024.

m. Samian, S.H., M.M., IV/ A NIP 197002211992031001 Mengikuti Pelatihan Manajemen dan kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan tahun 2024 secara *Blended Learning* tahun 2024 yang diselenggarakan pada 2 s.d. 14 September 2024 secara Mandiri/*Self Learning* dan *Distance Learning*, tanggal 18 s.d 27 September 2024 secara Klasikal 1/Tatap Muka bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni Jl. Hayam Wuruk No. 36-37 Gambir Jakarta dan tanggal 27 s.d. 30 september 2024 dilaksanakan secara off kampus di satker masing-masing sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 128/KPM.W3-MIL02'KP7.1/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024.

n. Dodit Puguh Prasetyo, S.H., Serma NRP 531806 Mengikuti kegiatan Bimtek Platform pembayaran Pemerintah untuk Transaksi *Common Expenses* yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2024 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun Jl Salak No 52 Madiun. sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 150/KPM.W3-MIL02/KP7.1/IX/2024 tanggal 18 September 2024.

o. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti Mengikuti kegiatan Pembinaan kesekretariatan yang diselenggarakan pada 31 oktober s.d. 2 November 2024 dilaksanakan di Hotel INNSiDE by melia Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 184/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2024

tanggal 28 Oktober 2024.

p. Mulyono, S.H. Serma NRP 31970176050877 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan BMN melalui Aplikasi SIMAN V2 yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dilaksanakan di Aula BPKAD Kab Bojonegoro Jl. Imam Bonjol No. 48 Kab Bojonegoro sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 201/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 06 November 2024.

q. Sriyani Penata Muda TK 1 NIP 197210041994032001 mengikuti Kegiatan Penilaian Kompetensi (Assessment Center) yang diselenggarakan pada hari Senin 25 November 2024 dilaksanakan secara Daring di Ruang Command Center Dilmil III-13 Madiun sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 211/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

r. Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031002 mengikuti tahapan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan pada 26 s.d. 29 Februari 2024 bertempat di Gedung Sekretariat MA Lt. 12 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 32/KPM.W3-MIL02/KP7.1/II/2024 tanggal 22 Februari 2024

Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-14 Denpasar

No	Bimtek/Diklat/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Sosialisasi Rekonsiliasi Eksternal	KPPN Denpasar	Denpasar, 16 Januari 2024	Igusti Agung Ayu Nyoman Giri Sundari, SE, M.M
2	Bimtek Administrasi Yudisial	Ketua Mahkamah Agung RI	Jakarta, 20 Februari 2024.	Kolonel Chk Dedy Darmawan, SH., MH.
3	Sosialisasi Teknis Penginputan Aplikasi eMonev Bapennas	Biro Perencanaan dan Organisasi MARI	Denpasar, 21 Maret 2024	Sekretaris, Kasubbag PTIP, staf Keuangan dan pejabat Fungsional
4	Pelatihan FGD Proposal	Pustrajak MA RI	Virtual, 17 Mei 2024	Kapten Chk (K) Dianing Lusiasukma, SH.MH.
5	Pelatihan SIMAN V.2	KPPN Denpasar	Denpasar, 8 Juli 2024	Serka Mus Henricus Ardyas.
6	Bimtek Kepaniteraan	Dilmiltama	Virtual, 9-11 September 2024	Mayor Chk Mahpul S, S.H dan Lettu Chk Damai Chrisdianto, SH
7	Bimtek Hakim	Dirjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta, 15-17 September 2024	Para Hakim.
8	Bimtek Aplikasi SIMAN V.2.	Dilmil III-14 Dempasar	Denpasar, 8-7 Oktober 2024	Serka Mus Henricus Ardyas
9	Kegiatan Bimtek Pelatihan Penghapusan kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum	Dirjen Badilmiltun MARI.	Virtual, 7-10 Oktober 2024, Jakarta, 16-21 Oktober 2024	Kapten Chk (K) Dianing L, SH.
10	Bimtek Kompetesi Hakim.	Dirjen Badilmiltun MARI.	Virtual, 13-15 November 2024	Letkol Chk I Gd Made Suryawan, S.H, M.H Cq 2 orang.
11	Bimtek Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dirjen Badilmiltun MARI	Virtual, 13-15 November 2024	Gisca Pravita Auliya, A.Md.M Cq 1 Orang
12	Pelatihan Singkat terkait Paradigma Pembaharuan Hukum Pidana	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	Virtual, 13-15 November 2024	Kol. Chk Dedy Darmawan, S.H., M.H. Cq 2 Orang
13	Bimtek Pelaksanaan Sertifikat Aset Tanah Pemerintah secara elektronik	Pengadila Tinggi Denpasar	Denpasar, 28 November 2024	Katharina, S.H Cq 2 orang
14	Pelatihan Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan	Dilmilti III Surabaya	Surabaya, 11-13 Desember 2024	Serma Puwodiyanto, SH. Cq 1 Orang

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

### Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-15 Kupang

No	Nama NRP/NIP	Jabatan	Nama Kegiatan	Nomor Skep	TMT
1	Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H. Kaptan Kum NRP 537313	Anggota Pokkimmil Gol. VII	Bimbingan Teknis Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Lingkungan Peradilan Militer	7/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/II/2024	Daring 5 s.d. 7 Februari 2024
2	I Nyoman Dharma Setyawan, S.H. Letda Chk NRP 210502603690586	Panitera Muda Pidana	Bimbingan Teknis Panitera "Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Kepaniteraan di Lingkungan Perdilan Militer"	8/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/II/2024	Daring 5 s.d. 7 Februari 2024
3	Marloyati Lado, S.H. NIP 198710082009122003	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelatihan <i>Daring</i> Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Batch II	17/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/IV/2024	Daring 22 s.d. 24 April 2024
4	Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H. Kaptan Kum NRP 537313	Anggota Pokkimmil Gol. VII	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim dengan tema "Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer".	28/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/VI/2024	Daring 26 s.d. 28 Juni 2024
5	Alexander, S.E. NIP 197609082009121002	Sekretaris	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Sekretaris Pengadilan secara <i>Blended Learning</i> Tahun 2024	33/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/VIII/2024	<i>Blended Learning</i> g26 Agustus s.d. 29 November 2024
6	Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P Mayor Chk NRP 11080095390983 Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H. Kaptan Kum NRP 537313 Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I. Kaptan Chk NRP 21980220931177	Anggota Pokkimmil Gol. VI Anggota Pokkimmil Gol. VII Anggota Pokkimmil Gol. VII	Bimbingan Teknis Hakim Militer dengan tema "Bimbingan Tenkis enyelesaian Perkara <i>Restorative Justice</i> ".	37/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/VIII/2024	Yogyak arta 15 s.d. 17 September 2024
7	Irwan Idris, S.H. Kaptan Chk NRP 2160348011275 Ridwan Permana Putra, A.Md NIP 199109122002031008 Benyamin Giri	Panitera  Pengelola Penanganan Perkara PPNPN	Bimbingan Teknis Kepaniter	40/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/IX/2024	Daring 9 s.d. 11 September 2024
8	Alexander, S.E. NIP 197609082009121002	Sekretaris	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Sekretaris Pengadilan	45/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/IX/2024	Jakarta 18 s.d. 27 September 2024
9	Muhammad Ghiyats Lizuardi, A.Md. NIP 199406202020121007	Teknisi Sarana dan Prasarana	Pelatihan Konfigurasi Dasar Mikrotik	54/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/X/2024	Kupang 1 November 2024
10	Muhammad Ghiyats Lizuardi, A.Md. NIP 199406202020121007 Jidon Anton Balla	Teknisi Sarana dan Prasarana  PPNPN	Bimbingan Teknis Optimalisasi teknologi dan Informasi dan Komunikasi	57/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/XI/2024	Daring 13 s.d. 15 November 2024



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

					er 2024
11	Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H. Kapten NRP 537313 Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H., M.H.I. Kapten Chk NRP 21980220931177	Anggota Pokkimmil Gol. VII Anggota Pokkimmil Gol. VII	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2024	58/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/XI/2024	Daring 13 s.d. 15 November 2024
12	Agustono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 21960080960873	Kadilmil	Pelatihan singkat Terkait Paradigma Pembaruan hukum Pidana Bagi Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding Peradilan Militer Seluruh Indonesia	61/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/XI/2024	Daring dan Mataram 13 s.d. 22 November 2024
13	Alexander, S.E. NIP 197609082009121002	Sekretaris	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Sekretaris Pengadilan Tahap II secara Klasikal	63/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/XI/2024	Bogor 24 s.d. 29 November 2024
14	Jidon Anton Balla	PPNPN	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara	66/SKP.W3.Mil04/SP.DL.1.10/XII/2024	Kupang 4 Desember 2024

Daftar Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-16 Makassar

Tabel Daftar Diklat Pegawai

No	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Waktu	Peserta
<b>DIKLAT TEKNIS</b>			
1.	Pendidikan Sesko AU A-61 TA 2024	Januari s.d November 2024	Mayor Kum Anna Murdoko, S.H.
2.	Bimtek Panitera Daring meningkatkan kompetensi dan profesioanlisme kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2024	5 s.d 7 Februari 2024	1. Peltu (K) Erna Dwi A 2. Pelda Rustan, S.H., M.H.
3.	Pembinaan dan Pengarahan oleh Kadilmiltama	22 s.d 24 April 2024	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.
4.	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama 2024 tema "Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu dalam rangka mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana serta integritas berkas pidana antar penegak hukum" secara online/daring	12 s.d 14 Juni 2024	1. Kapten Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. 2. Pelda Rustan, S.H., M.H.
5.	Sosialisasi dan monitoring penyelesaian perkara elektronik	24 Juni 2024	1. Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H. 2. Kapten Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. 3. Serma Samsuddin, S.H.
6.	Bimtek Hakim Militer TA 2024 tema " Penyelesaian perkara koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer"	26 s.d 28 Juni 2024	1. . Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H. 2 Mayor Chk farid Iskandar, S.H., M.H.
7.	Eksaminasi Calon Hakim Militer Tinggi	29 s.d 31 Juli 2024	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.
8.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara <i>Restorative Justice</i>	15 s.d 17 September 2024	1. Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H.,M.H. 2. Letkol Chk Rhubi Iswandai Trinaron, S.H., M.H. 3. Mayor Chk Victor Virganthara Taunay, S.H.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

			4. Mayor Chk Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.
9.	<i>Bimtek Kepaniteraan “Penyelarasan dan Harmonisasi Perjanjian Kerjasama Aplikasi e-Berpadu Dalam Rangka Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Menuju Terwujudnya Pengadilan Yang Tangguh”</i> ,	9 s.d 11 Septemeber 2024	1. Kapten Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. 2. Peltu Nurman, S.H.
10.	Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan dan Pendamping dengan Perspektif HAMBG dan SPPT-PKKTP	7-21 Okt 2024	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.
11.	Seleksi Casis Diktukpa TNI AD Gelombang I TA 2025	4 s.d 7 November 2024	Serka Noris Mbotengu, S.H., M.H.
12.	Bimtek Hakim Militer TA 2024 dengan tema “Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Lingkungan Peradilan Militer TA 2024” secara Daring	13 s.d 15 November 2024	1. Letkol Chk Victor Virganthara Taunay, S.H. 2. Mayor Chk Farid Iskandar, S.H., M.H.
13.	Bimtek Hakim Militer TA 2024 dengan tema “Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Lingkungan Peradilan Militer TA 2024” secara Luring	13 s.d 15 November 2024	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.
14.	Pelatihan Singkat Terkait Paradigma Pembaruan Hukum Pidana bagi Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding Peradilan Militer Seluruh Indonesia, Daring dan Luring	13 s.d 22 November 2024	Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H.
15.	Ujian Akademik Seleksi Casis Diktukpa TNI AD Gelombang I TA 2025	28 s.d 29 November 2024	Serka Noris Mbotengu, S.H., M.H.
<b>DIKLAT NON TEKNIS</b>			
1.	Asistensi Laporan Keuangan Semester II Ta 2023	10 s.d 12 Januari 2024	1. Serma Riyanto 2. ASN Aqifah FM
2.	Bimtek Lanjutan Digitalisasi Pembayaran	6 Februari 2024	ASN Aqifah Febriani Muhtar, A.Md.A.B
3.	Sosialisasi Pelaksanaan Piloting Validasi LPJ Bendahara pada aplikasi Sakti	29 Februari 2024	ASN Aqifah Febriani Muhtar, A.Md.A.B
4.	Pembekalan Pensiun Edukasi Manfaat Taspen Grup dan Perekaman Data bagi Calon Purna Bhakti	7 Maret 2024	ASN Bagiyo, S.H.
5.	Tindak penyelesaian pnerbitan BMN dalam rangka implementasi SIMAN V2	20 s.d 22 Mei 2024	1. ASN Sukmawaty Rasjid, S.Sos., M.Si. 2. Serma Riyanto
6.	Bimtek Aplikasi SIMAN V2 Batch II	12 s.d 13 Juni 2024	1. ASN Sukmawaty Rasjid, S.Sos., M.Si. 2. PPNPN A. Asadi I
7.	Monev Alumni Pasca Pelatihan Tahun 2024	13 Juni 2024	ASN Dhanang Sri A
8.	Asistensi Laporan Keuangan dalam rangka persiapan penyusunan laporan keuangan MARI semester I Tahun 2024	27 s.d 29 Juni 2024	1. ASN Aqifah FM 2. PPNPN A.Asadi I
9.	Press Release APBN Evaluasi perksanaan anggaran dan persiapan penyusunan laporan keuangan semester I TA 2024	15 Juli 2024	ASN Aqifah FM
10.	Stakeholder Day evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran TA 2024	19 Juli 2024	ASN Aqifah FM
11.	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan II Secara Online	11 s.d 24 Oktober 2024	ASN Dhanang Sri Anunggita, S.Sos.
12.	Pelatihan Online Manajemen Pengelolaan BMN Batch IV Bekerjasama dengan Balai Diklat PKN BPK RI Secara Online	28 s.d 30 Oktober 2024	Kapten Kum Andi Dala Ulang, S.H.
13.	Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer secara Online/Daring	13 s.d 15 November 2024	PPNPN A. Asadi Indrawan, S.ST
14.	Pemetaan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya	25 s.d 28 November 2024	1. Ramlah Majid, S.h. 2. Amiruddin, S.Pd. 3. Nasriani



*Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-17 Manado*

1. Kapten Chk Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han., mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Angkatan V di Badan Litbang, Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI TA.2024/2025
2. Mayor Chk Patta Imang, S.H., mengikuti Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Februari 2024
3. Kapten Chk Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., mengikuti Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Februari 2024
4. Letda Chk M. Sopian Dalimunthe, S.H., mengikuti Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 Februari 2024
5. Dharmawati Rahayu, S.E., M.E., mengikuti Pelatihan Online Manajemen Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Batch III yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Mei 2024.
6. Kapten Chk Procleo F. Simamora, S.H., mengikuti Bimbingan Teknis Panitera Pengganti Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 Mei 2024
7. Meldi M.A.S Seon, S.Pi, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I secara Blended Learning TA.2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 juni s.d 20 Oktober 2024
8. Dharmawati Rahayu, S.E., M.E., mengikuti Pelatihan SPIP Integratif Gelombang II Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 14 Juni 2024
9. Kapten Chk Procleo F. Simamora, S.H., mengikuti Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Juni 2024
10. Riri Agustina, A.md.AB., mengikuti Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 14 Juni 2024
11. Kapten Chk Soniardhi, S.H., M.H., Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Juni 2024
12. Kapten Chk Niko Yoga Satria, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., mengikuti Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 Juni 2024
13. Sertu Abdullah Rahan Yamtel, mengikuti Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Gelombang VI Secara Online Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 08 s.d. 12 Juli 2024
14. Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H., mengikuti Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 17 September 2024
15. Kolonel Laut (H) Amriandie, S.H., M.H., mengikuti Pelatihan Singkat Pembaruan Hukum Pidana Bagi Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Peradilan Militer Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 22 November 2024

16. Letkol Chk Patta Imang, S.H., mengikuti Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2024

17. Kapten Chk Soniardhi, S.H., M.H., mengikuti Bimbingan Teknis Hakim Militer Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2024

18. Sertu Rodi Salmon, mengikuti Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2024

19. Zuhri Zain Purwanto, S.Tr.Kom., mengikuti Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2024

20. Indahwaty Agus, S.Tr.Kom., mengikuti Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2024

21. Sertu Rusdi Rahman, mengikuti Bimbingan Teknis Koordinasi Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan di Jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2024

22. Zuhri Zain Purwanto, S.Tr.Kom., mengikuti Bimbingan Teknis Koordinasi Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan di Jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2024.

*Daftar Diklat Bimtek dan Sosialisasi Pegawai Dilmil III-18 Ambon*

No	Bimtek/Diklat/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	Pembinaan dan Pengarahan oleh Kadilmiltama	Kepala Pengadilan Militer Utama	Jakarta / 11 s.d. 15 Januari 2023	Mayor Chk Dani Subroto, S.H., M.H.
2	Rapat Koordinasi Refleksi Kinerja 2023 dan Pembinaan, Pengarahan Rencana Kerja Th 2024	Kepala Pengadilan Militer Utama	Jakarta / 20 s.d 23 Januari 2024	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
3	Bimtek Panitera secara daring/online	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	5 s.d 7 Februari 2024	Mayor Chk Purwadi, S.H., M.H.
4	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti daring/online	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	5 s.d 7 Februari 2024	Letda Chk Syaiful Adhi B., S.H. -Letda Chk Erlangga Prasady, S.H., M.H.
5	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial	Ketua Mahkamah Agung RI	18 s.d 21 Februari 2024	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
6	Rapat Koordinasi Kesamaptaan Jasmani Periodik I TA 2024	Kepala Jasmani Kodam XVI/Pattimura	18 April 2024	Lettu Chk Riska Dori, S.H. Asis, S.Kom., S.H.
7	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I TA 2024	Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	22 April s.d 20 Juni 2024, dan 21 s.d 22 Agustus 2024	Rina Deby Jean Wattimury, S.H., M.H.
8	Pembinaan dan Pengarahan	Kepala Pengadilan Militer	21 s.d 25 April	- Kolonel Chk R. Ach. Agus

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

		Utama	2024	Purno Wijoyo, S.H.
9	Pendidikan Susjabkimmil XXV TA 2024	Panglima TNI	24 April s.d 23 Juli 2024	Mayor Chk Kiki Parlaungan Lubis, S.H., dan Mayor Chk Purwadi, S.H., M.H.
10	Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) TA 2024 Batch I Tahap 3 dan 4	Kepala Biro Kepegawaian MA RI	8 Mei 2024	Dicky Dharma Saputra, A.Md., Ak.
11	Sosialisasi Antikorupsi dan Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon	8 Mei 2024	Muhammad Adib Hadriansyah, S.E.
12	Focus Group Discussion (FGD) Proposal	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan	17 Mei 2024	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
13	Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2024	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	20 s.d 22 Mei 2024	Lettu Chk Riska Dori, S.H. Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H.
14	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama TA 2024 secara online/zoom meeting	Kepala Pengadilan Militer Utama	12 Juni s.d 14 Juni 2024	Lettu Chk Riska Dori, S.H. Letda Chk Erlangga Prasady, S.H., M.H. -
15	Reuni 25 Tahun Pengabdian Alumni Akabri 1998 TA 2024	Akademi Militer	20 s.d 24 Juni 2024	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
16	Mentor Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan MA RI	18 s.d 19 juni 2024	Hendri Dunan Muskitta, S.H.
17	Pelatihan SPIP Integratif Gel. III Th 2024	Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	24 s.d 28 Juni 2024	Nova Prihastuti, S.H.
18	Bimtek Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer TA 2024	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	26 s.d 28 Juni 2024	Letkol Chk Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
19	Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data III secara online/zoom meeting	Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI	11 Juli 2024	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H. Letkol Chk Joko Trianto, S.H., M.H. Letkol Chk Magdial, S.H., M.H. Myor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
20	Pelatihan SPIP Integratif Gel. VI secara online	Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil MA RI	15 s.d. 19 Juli 2024	Stany Raprap, S.H.
21	Legal Corps Call TA 2024	Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	12 Juli 2024	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
22	Eksaminasi Calon Hakim Militer Tinggi di Lingkungan Peradilan Militer TA 2024	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	29 s.d. 31 Juli 2024	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
23	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama TA 2024	Kepala Pengadilan Militer Utama	9 s.d. 11 September 2024	Lettu Chk Riska Dori, S.H. Lettu Chk Juspindeli Girsang, S.H.
24	Bimtek Teknis Hakim Militer TA 2024	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	15 s.d. 18 September 2024	Kolonel Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
25	Pelatihan Penghapusan Kekerasan Seksual bagi Aparat Penegak Hukum, Pengada Layanan, dan Pendamping dengan Perspektif HMBG dan SPPT-PKKTP	Ketua Sub Komisi Pendidikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Kmnas Perempuan)	7 & 10 Oktober 2024 15 s.d. 22 Oktober 2024 12 Desember 2024	Mayor Chk Samsul Hadi, S.H., M.H.
26	Rapat Koordinasi Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	23 s.d. 26 Oktober 2024	Henry Dunan Muskitta, S.H.

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

27	Bimtek Hakim Militer TA 2024	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	13 s.d. 15 November 2024	Magdial, S.H., M.H. Purwadi, S.H., M.H.
28	Pelatihan Singkat Paradigma Pembaruan Hukum Pidana bagi Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Peradilan Militer	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI	13 s.d. 15 November 2024	R. Ach. Agus Purno Wijoyo, S.H.
29	Bimtek Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Dirjen Badilmiltun MA RI	13 s.d. 15 November 2024	Ade Widiyanto, A.Md.
30	Pemetaan Pegawai di Lingkungan MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya	Sekretaris MA RI	25 November 2024	Rio Matauseja, S.H. Richardo Thenu
31	Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Negara	22 November s.d. 2 Desember 2024	Arfyan Wigga Juladha, S.H.
	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan MA RI	25 November s.d. 15 Desember 2024	Mayor Chk Kiki Parlaungan Lubis, S.H.
32	Koordinasi Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan di Jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	11 s.d. 13 Desember 2024	Ade Widiyanto, A.Md. Andra Abdul Rahman, A.Md.
33	Pelatihan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan APBN dan Pranata Keuangan APBN Periode II Tahun 2024	Direktur Sistem Perbendaharaan	12 Desember 2024	Nova Prihastuti, S.H.

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan keuangan negara, pengelola keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan Keuangan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris dibantu Kasub Keuangan dan Pelaporan, namun secara khusus telah dibentuk pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung jawab kegiatan yang dijabat oleh Kasub Rencana Program dan Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM/ Penguji SPD yang dijabat oleh Kasub keuangan dan pelaporan, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta staf Pengelola Keuangan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam Tahun anggaran 2024 sesuai DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mencairkan dana sebagai berikut :

**1. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

**a. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)**

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) awal nomor : SP DIPA-005.01.2.663300/2024 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 10,412,490,000,- (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) dan telah mengalami revisi sebanyak 10 kali dengan perubahan jumlah menjadi sebesar Rp. 10.245.472,- (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), terdiri dari: Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 10.245.472.000,- (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

- 1) Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi, terdiri dari:
  - a) Layanan perkantoran (gaji dan tunjangan) sebesar Rp. 6,298.565,000,- (*Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - b) Layanan Umum (operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar Rp. 2.601.925.000,- (*Dua Milyar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI (layanan sarana dan prasarana internal) sebesar Rp. 1.344.982.000,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*), terdiri dari:

*Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01*

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase (%)</b>
pagu	Rp. 10.245.472.000,-	100 %
realisasi	Rp. 9.910.411.331 ,-	96.73 %
sisa	Rp. 335.060.669 ,-	3.27 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 96.73 %.

**b. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)**

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) nomor : DIPA-SP DIPA- 005.05.2.663301/2024 tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 409.430.000,- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah ) dan mengalami revisi sebanyak 5 kali tanpa ada perubahan besaran pagu, yang terdiri dari:

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum, sebesar Rp. 409.430.000,- ( Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari:

*Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05*

Uraian	Jumlah	Presentase (%)
pagu	Rp. 409.430.000,-	100 %
realisasi	Rp. 400.770.230,-	97,88 %
siswa	Rp. 8,659.770,-	212 %

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 97.88 %

**2. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya**

**a. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)**

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA 2024 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya 1/SEK.W3-Mil01/KU1.1.1/II/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2024. DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024, DIPA 01 mengalami lima kali revisi meliputi revisi pergeseran anggaran dalam POK dan pagu minus. Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp.6.150.453.000,- (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp.4.869.715.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Pulun Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Sedangkan DIPA 05 dari Direktorat Jenderal Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024, DIPA 01 mengalami dua kali revisi yaitu revisi pergeseran anggaran dalam POK. Pagu anggaran awal dalam DIPA 05 sebesar Rp.181.780.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir tidak berubah yaitu sebesar Rp.181.780.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Adapun realisasi belanja tahun 2024 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 96,32% dan DIPA 05 sebesar 98,48%.

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase realisasi DIPA 01	Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.690.625.628 atau sebesar 96,32% dari total anggaran sebesar Rp.4.869.715.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan halaman III Dipa dan koordinasi dengan Eselon 1 terkait adanya kelebihan pagu anggaran.
2. Persentase realisasi DIPA 05	Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp.179.014.195 atau sebesar 98,48% dari total anggaran sebesar Rp.181.780.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan dan eksekusi halaman III Dipa agar mencapai nilai kinerja yang optimal.

Revisi dipa 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 07 Juni 2024	<b>Belanja Tunjangan PPh PNS 511125</b> (Pengembalian Kelebihan Pag uke Eselon 1)	Rp.383.690.000	Rp.7.340.000	(Rp.376.350.000)
	<b>Belanja Uang Makan PNS 511129</b> (Pengembalian Kelebihan Pag uke Eselon 1)	Rp.224.664.000	Rp.105.614.000	(Rp.119.050.000)
	<b>Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224</b> (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.2.776.440.000	Rp.2.271.840.000	(Rp.504.600.000)



	<b>Belanja Sewa 522141</b> (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Eselon 1)	Rp.155.520.000	Rp.181.440.000	Rp.25.920.000
Revisi Kedua 11 Juli 2024	<b>Belanja Gaji Pokok PNS 511111</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.864.922.000	Rp.859.013.000	(Rp.5.909.000)
	<b>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.46.526.000	Rp.52.026.000	Rp.5.500.000
	<b>Belanja Tunj. Anak PNS 511122</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.12.426.000	Rp.12.835.000	Rp.409.000
Revisi Ketiga 16 Oktober 2024	<b>Belanja Sewa 522141</b> (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Eselon 1)	Rp.181.440.000	Rp.194.400.000	Rp.5.909.000
Revisi Keempat 04 November 2024	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111</b> (Penambahan Pagu ke Eselon 1)	Rp.0	Rp.17.982.000	Rp.17.982.000
	<b>Belanja Keperluan Perkantoran 521111</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.486.475.000	Rp.487.641.000	Rp.1.166.000
	<b>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.12.228.000	Rp.6.996.000	(Rp.5.232.000)
	<b>Belanja Langganan Telepon 522112</b> (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.4.491.000	Rp.1.200.000	(Rp.3.291.000)
	<b>Belanja Langganan Air 522113</b> (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.7.509.000	Rp.8.400.000	Rp.891.000
	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121</b> (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.177.831.000	Rp.184.297.000	Rp.6.466.000
Revisi Kelima 04 Desember 2024	<b>Belanja Gaji Pokok PNS 511111</b> (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.859.013.000	Rp.600.700.000	(Rp.258.313.000)
	<b>Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224</b> (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.309.736.000	Rp.230.449.000	(Rp.79.287.000)

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.379.769.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.471.964.000
53	Belanja Modal	Rp. 17.982.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.869.715.000</b>

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2024 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 194.711.280	Rp. 69.952.726	Rp. 0
Februari	Rp. 244.776.148	Rp. 77.796.155	Rp. 0
Maret	Rp. 438.472.064	Rp. 138.117.523	Rp. 0
April	Rp. 204.541.692	Rp. 123.162.201	Rp. 0
Mei	Rp. 239.017.230	Rp. 77.798.285	Rp. 0
Juni	Rp. 404.248.089	Rp. 102.363.484	Rp. 0
Juli	Rp. 238.501.242	Rp. 145.200.062	Rp. 0
Agustus	Rp. 206.186.166	Rp. 77.800.150	Rp. 0
September	Rp. 206.314.166	Rp. 264.920.250	Rp. 0
Oktober	Rp. 206.110.354	Rp. 147.104.076	Rp. 0
November	Rp. 297.188.764	Rp. 83.646.112	Rp. 0
Desember	Rp. 333.498.386	Rp. 151.638.224	Rp. 17.560.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.213.565.5</b>	<b>Rp. 1.459.499.248</b>	<b>Rp. 17.560.000</b>

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.869.715.000	100
Realisasi	Rp. 4.690.624.829	96,32
Sisa	Rp. 179.090.171	3,68

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 96,32%

**b. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)**

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024 setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.181.780.000.

Dari DIPA 05 tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 181.780.000, yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan

belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel IV.5 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama Tanggal 11 Juli 2024	<b>Belanja Bahan 521211</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Tingkat Pertama)	Rp.10.800.000	Rp.12.600.000	Rp.1.800.000
	<b>Surat Dinas POS Pusat 521114</b> (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Penetapan Hari Sidang)	Rp.500.000	Rp.1.040.000	Rp.540.000
	<b>Belanja Bahan 521211</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK Konsumsi Makan Pengamanan dari POM)	Rp.8.640.000	Rp.5.400.000	(Rp.3.240.000)
	<b>Belanja Bahan 521211</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Minutasi/Upaya Hukum)	Rp.10.800.000	Rp.12.600.000	Rp.1.800.000
	<b>Surat Dinas POS Pusat 521114</b> (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara)	Rp.34.200.000	Rp.33.300.000	(Rp.900.000)
	Revisi Kedua 08 Oktober 2024	<b>Belanja Bahan 521211</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Tingkat Pertama)	Rp.12.600.000	Rp.16.200.000
<b>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)		Rp.14.760.000	Rp.22.320.000	Rp.7.560.000
<b>Belanja Bahan 521211</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK Konsumsi Terdakwa)		Rp.14.580.000	Rp.9.720.000	(Rp.4.860.000)
<b>Belanja Bahan 521211</b> (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Minutasi/Upaya Hukum)		Rp.12.600.000	Rp.16.200.000	Rp.3.600.000
<b>Surat Dinas POS Pusat 521114</b> (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara)		Rp.33.300.000	Rp.23.400.000	(Rp.9.900.000)

Anggaran dalam DIPA 05 Pengadilan Militer III-12 Surabaya hanya terdiri dari belanja barang. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 05 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.6 Pagu Anggaran DIPA 05

Kode	Uraian	Jumlah
52	Belanja Barang	Rp. 181.780.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 181.780.000</b>

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 5.994.850	Rp. 0
Februari	Rp. 5.991.500	Rp. 22.580.000
Maret	Rp. 5.993.750	Rp. 0
April	Rp. 11.920.250	Rp. 0
Mei	Rp. 5.985.500	Rp. 0
Juni	Rp. 11.962.700	Rp. 22.580.000
Juli	Rp. 11.986.700	Rp. 0
Agustus	Rp. 11.994.375	Rp. 0
September	Rp. 5.994.720	Rp. 0
Oktober	Rp. 11.984.555	Rp. 23.380.000
November	Rp. 10.416.705	Rp. 0
Desember	Rp. 10.248.590	Rp. 0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 110.474.195</b>	<b>Rp. 68.540.000</b>

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 181.780.000	100
Realisasi	Rp. 179.014.195	98,48
Sisa	Rp. 2.765.805	1,52

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 tahun 2024 sebesar 98,48%

Tabel III.28 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.851.733.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 17.982.000

Tabel III.30 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA
Belanja Pegawai	Rp. 3.379.769.000	Rp. 3.213.565.581	Rp. 166.203.419
Belanja Barang	Rp. 1.471.964.000	Rp. 1.459.499.248	Rp. 12.464.752
Belanja Modal	Rp. 17.982.000	Rp. 17.560.000	Rp. 422.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.869.715.000</b>	<b>Rp. 4.690.624.829</b>	<b>Rp. 179.090.171</b>

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.31 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA
Belanja Pegawai	Rp. 4.851.733.000	Rp. 4.673.064.829	Rp. 178.668.171
Belanja Barang	Rp. 17.982.000	Rp. 17.560.000	Rp. 422.000

Tabel III.32 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.869.715.000	100
Realisasi	Rp. 4.690.624.829	96,32
Sisa	Rp. 179.090.171	3,68

Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2024, didapatkan realisasi dari DIPA 01 sebesar 96,32 %.

Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2024 yaitu :

- 1) Adanya perencanaan anggaran yang optimal
- 2) Adanya koordinasi antar pengelola keuangan yang baik dalam hal realisasi anggaran
- 3) Adanya koordinasi yang baik dengan pihak eksternal KPPN dan Eselon 1 dalam rangka monitoring kinerja anggaran sepanjang tahun 2024

Tabel III.35 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	181.780.000	179.014.195	2.765.805

Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.36 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Penegakan dan Pelayanan Hukum	181.780.000	179.014.195	98,48	2.765.805	1,52

Realisasi belanja DIPA 05 tahun 2024 sebesar 98,48%. Realisasi DIPA 05 ini selaras dengan jumlah perkara putus yang dikelola oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2024 yaitu 179 perkara putus dari 180 target perkara.

**3. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-13 Madiun**

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

**a. DIPA 01 (663321)**

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.3.328.376.920,- atau mencapai 98.69% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.372.486.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	3.372.486.000	3.328.376.920	98.69	44.109.080

**b. DIPA 05 (663322)**

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.59.123.000,- atau mencapai 97.17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.60.845.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	60.845.000	59.123.000	97.17 %	1.722.000

#### 4. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar

##### a. DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663335/2024 tanggal 30 November 2023. Sepanjang tahun 2023, DIPA 01 ini mengalami 7 (tujuh) kali revisi, yaitu :

1) Revisi pertama yaitu revisi halaman III DIPA. Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.

2) Revisi kedua yaitu revisi pagu anggaran, pergeseran antar Akun belanja pegawai dan belanja barang dengan pagu awal sejumlah Rp. 4.507.126.000,- (empat milyar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah). Revisi pagu ini disebabkan adanya pengurangan pagu anggaran pada belanja pegawai pada Gaji dan tunjangan dan penambahan dan pengurangan pagu anggaran pada belanja barang.

3. Revisi ketiga yaitu revisi pagu anggaran dengan pagu sejumlah Rp. 4.552.486.000,- (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Revisi pergeseran antar akun pada belanja Operasional dan Pemeliharaan kantor.

4. Revisi keempat yaitu Revisi Pagu Anggaran pergeseran antar akun pada belanja Operasional dan Pemeliharaan kantor dan Revisi Hal III DIPA dengan pagu sejumlah Rp. 4.665.786.000,- (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

5. Revisi kelima yaitu Revisi Pagu Anggaran pergeseran/penarikan antar akun pada belanja Pegawai, belanja operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu sejumlah Rp. 4.384.491.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

6. Revisi keenam yaitu Revisi POK dan hal III DIPA dengan tidak merubah jumlah pagu.

7. Revisi ketujuh yaitu Revisi POK dan Hal III DIPA dengan tidak merubah jumlah pagu.

Setelah melalui 7 (tujuh) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-14 Denpasar di tahun 2023 menjadi sejumlah Rp. 4.384.491.000,- (empat milyar tiga ratus delapan

puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal digunakan untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah nilai aset. Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel di bawah :

*Tabel Pagu Anggaran DIPA 01*

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.777.636.000,-
52	Belanja barang & non	Rp. 1.407.805.000,-
53	Operasional	Rp. 367.045.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 4.552.486.000,-</b>

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 yang terealisasi sepanjang tahun 2024 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

*Tabel Pengelolaan DIPA 01*

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 163.914.309,-	Rp. 43.495.166,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 196.803.375,-	Rp. 133.330.165,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 184.044.887,-	Rp. 99.881.593,-	Rp. 314.400.000
April	Rp. 373.657.993,-	Rp. 114.602.175,-	Rp. -
Mei	Rp. 196.782.648,-	Rp. 109.124.666,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 305.715.062,-	Rp. 111.860.156,-	Rp. 41.814.000,-
Juli	Rp. 139.729.511,-	Rp. 119.350.439,-	Rp. 0,-
Agustus	Rp. 140.619.561,-	Rp. 106.977.229,-	Rp. 0,-
September	Rp. 163.878.986,-	Rp. 137.744.414,-	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 183.210.837,-	Rp. 127.802.814,-	Rp. 0,-
November	Rp. 184.163.837,-	Rp. 123.949.691,-	Rp. 171.814.680,-
Desember	Rp. 177.369.119,-	Rp. 124.077.099,-	Rp. 0,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.409.520.125,-</b>	<b>Rp. 1.402.359.452,</b>	<b>Rp. 528.028.680,-</b>

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01*



Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.384.491.000,-	100
Realisasi	Rp. 4.345.080.257,-	99,10
Sisa	Rp. 39.410.743,-	0,90

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 99,10 %

**b. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)**

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663336/2024 tanggal 30 November 2024. Sepanjang tahun 2024, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu revisi untuk Perubahan Halaman III DIPA.

Dari DIPA 05 di tahun 2024, Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 78.165.000,- (Tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Realisasi DIPA Dirjen pada sidang diluar gedung bulan April 2024 sebesar Rp 29.389.200,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan pada bulan Juli 2024 sebesar Rp. 26.055.600,- (dua puluh enam juta lima puluh lima ribu enam ratus rupiah). Sehingga realisasi pagu pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. 55.444.800,- (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel Pengelolaan DIPA 05*

Bulan	Belanja Barang	
	Belanja Barang Persediaan dan Jasa Pos	Belanja Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Februari	Rp. 2.882.100,-	Rp. 0,-
Maret	Rp. 2.809.250,-	Rp. 0,-
April	Rp. 936.000,-	Rp. 29.389.200,-
Mei	Rp. 2.215.250,-	Rp. 0,-
Juni	Rp. 1.826.500,-	Rp. 0,-
Juli	Rp. 2.868.000,-	Rp. 26.055.600,-
Agustus	Rp. 3.798.700,-	Rp. 0,-
September	Rp. 1.946.600,-	Rp. 0,-
Oktober	Rp. 822.000,-	Rp. 0,-
November	Rp. 1.725.000,-	Rp. 0,-
Desember	Rp. 885.600,-	Rp. 0,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 22.715.000,-</b>	<b>Rp. 55.444.800,-</b>

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel Realisasi anggaran DIPA 05*

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 78.165.000,-	100
Realisasi	Rp. 78.159.800,-	99,99
Sisa	Rp. 5.200,-	0,01

Dari tabel terlihat bahwa prosentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 99,99 %

**c. Keuangan dari Perkara**

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-14 Denpasar.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2024 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

*Tabel Jumlah Biaya Perkara dan denda*

No	Kategori Perkara	Jumlah
1.	Kejahatan	Rp. 245.000,-
2.	Pelanggaran	Rp. 3.570.000,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 50.000.000,-
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 2.417.500,-
Jumlah total		Rp. 56.232.500,-

**5. Pengelolaan keuangan Dilmil III-15 Kupang.**

**Pengelolaan Keuangan**

Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah melaksanakan realisasi dana sebagai berikut :

**a. DIPA 01**

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) Nomor SP DIPA-005.01.2.663342/2024 tanggal 24 November 2023, telah dilakukan revisi sebanyak 11 (sebelas) kali, terdiri dari :

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>99,902,000</b>	<b>0</b>	<b>96,517,400</b>	<b>1,935,500</b>	<b>98,452,900</b>	<b>98.55 %</b>	<b>1,449,100</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	99,902,000	0	96,517,400	1,935,500	98,452,900	98.55 %	1,449,100
BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	99,902,000	0	96,517,400	1,935,500	98,452,900	98.55 %	1,449,100
<b>BCA Perkara Hukum Perseorangan</b>	<b>32,140,000</b>	<b>0</b>	<b>28,755,400</b>	<b>1,935,500</b>	<b>30,690,900</b>	<b>95.49 %</b>	<b>1,449,100</b>
<b>BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18</b>	<b>31,300,000</b>	<b>0</b>	<b>28,715,400</b>	<b>1,768,000</b>	<b>30,483,400</b>	<b>97.39 %</b>	<b>816,600</b>
<b>051 Pendaftaran Berkas Perkara</b>	<b>12,570,000</b>	<b>0</b>	<b>11,225,250</b>	<b>1,323,000</b>	<b>12,548,250</b>	<b>99.83 %</b>	<b>21,750</b>
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	12,570,000	0	11,225,250	1,323,000	12,548,250	99.83 %	21,750
521211 Belanja Bahan	4,800,000	0	4,778,750	0	4,778,750	99.56 %	21,250
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,770,000	0	6,446,500	1,323,000	7,769,500	99.99 %	500
<b>052 Penetapan Hari Sidang</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>389,000</b>	<b>0</b>	<b>389,000</b>	<b>97.25 %</b>	<b>11,000</b>
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	400,000	0	389,000	0	389,000	97.25 %	11,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	400,000	0	389,000	0	389,000	97.25 %	11,000

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTII III SURABAYA TAHUN 2024

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	16,397,000	0	15,279,730	44,300	15,324,030	93.46 %	1,072,970
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	4,580,000	0	4,035,190	8,860	4,044,050	88.30 %	535,950
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	29,400,000	0	27,440,000	0	27,440,000	93.33 %	1,960,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,392,000	0	1,719,647	0	1,719,647	39.15 %	2,672,353
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	14,884,000	0	14,194,320	0	14,194,320	95.37 %	689,680
511129 Belanja Uang Makan PNS	61,155,000	0	50,609,000	4,880,000	55,489,000	90.74 %	5,666,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	12,178,000	0	10,155,000	10,000	10,165,000	83.47 %	2,013,000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113,400,000	0	106,650,000	2,700,000	109,350,000	96.43 %	4,050,000
511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1,476,207,000	0	1,371,020,000	9,720,000	1,380,740,000	93.53 %	95,467,000

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTII III SURABAYA TAHUN 2024

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	16,397,000	0	15,279,730	44,300	15,324,030	93.46 %	1,072,970
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	4,580,000	0	4,035,190	8,860	4,044,050	88.30 %	535,950
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	29,400,000	0	27,440,000	0	27,440,000	93.33 %	1,960,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	4,392,000	0	1,719,647	0	1,719,647	39.15 %	2,672,353
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	14,884,000	0	14,194,320	0	14,194,320	95.37 %	689,680
511129 Belanja Uang Makan PNS	61,155,000	0	50,609,000	4,880,000	55,489,000	90.74 %	5,666,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	12,178,000	0	10,155,000	10,000	10,165,000	83.47 %	2,013,000
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	113,400,000	0	106,650,000	2,700,000	109,350,000	96.43 %	4,050,000
511224 Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1,476,207,000	0	1,371,020,000	9,720,000	1,380,740,000	93.53 %	95,467,000
511225 Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	120,894,000	0	117,423,582	0	117,423,582	97.13 %	3,470,418
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1,237,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,101,561,046</b>	<b>131,023,123</b>	<b>1,232,584,169</b>	<b>99.62 %</b>	<b>4,715,831</b>
002.0A Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	387,163,000	0	354,555,850	31,954,500	386,510,350	99.83 %	652,650
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	368,203,000	0	336,673,350	30,908,500	367,581,850	99.83 %	621,150
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,960,000	0	17,882,500	1,046,000	18,928,500	99.83 %	31,500
002.0B Langganan Daya dan Jasa	197,236,000	0	170,843,392	24,892,600	195,735,992	99.24 %	1,500,008
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	162,436,000	0	144,240,000	17,737,200	161,977,200	99.72 %	458,800
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11,400,000	0	6,507,600	4,032,100	10,539,700	92.45 %	860,300
522112 Belanja Langganan Telepon	3,000,000	0	2,575,792	243,300	2,819,092	93.97 %	180,908
522113 Belanja Langganan Air	14,400,000	0	11,520,000	2,880,000	14,400,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
002.0C Pemeliharaan Gedung dan Halaman	181,640,000	0	144,047,900	37,592,100	181,640,000	100.00	0
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181,640,000	0	144,047,900	37,592,100	181,640,000	100.00	0
002.0D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155,587,000	0	141,596,215	12,997,850	154,594,065	99.36 %	992,935
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155,587,000	0	141,596,215	12,997,850	154,594,065	99.36 %	992,935
002.0E Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	85,902,000	0	75,010,000	10,892,000	85,902,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	20,550,000	0	20,550,000	0	20,550,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	65,352,000	0	54,460,000	10,892,000	65,352,000	100.00	0



## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTII III SURABAYA TAHUN 2024

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0F Koordinasi	15,392,000	0	15,379,750	0	15,379,750	99.92 %	12,250
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,392,000	0	15,379,750	0	15,379,750	99.92 %	12,250
002.0G Konsultasi	39,540,000	0	30,117,939	7,864,073	37,982,012	96.06 %	1,557,988
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,540,000	0	30,117,939	7,864,073	37,982,012	96.06 %	1,557,988
002.0H Perjudin ke KPPN dan Kanwil	2,040,000	0	1,530,000	510,000	2,040,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,040,000	0	1,530,000	510,000	2,040,000	100.00	0
002.0I Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	172,800,000	0	168,480,000	4,320,000	172,800,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	172,800,000	0	168,480,000	4,320,000	172,800,000	100.00	0

### b. DIPA 05

DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI) Nomor : SP DIPA-005.05.2.663343/2024 tanggal 24 November 2023,, telah dilakukan revisi sebanyak 5 (lima) kali, yang terdiri dari:

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>99,902,000</b>	<b>0</b>	<b>96,517,400</b>	<b>1,935,500</b>	<b>98,452,900</b>	<b>98.55 %</b>	<b>1,449,100</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	99,902,000	0	96,517,400	1,935,500	98,452,900	98.55 %	1,449,100
BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	99,902,000	0	96,517,400	1,935,500	98,452,900	98.55 %	1,449,100
BCA Perkara Hukum Perseorangan	32,140,000	0	28,755,400	1,935,500	30,690,900	95.49 %	1,449,100
BCA.U03 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	31,300,000	0	28,715,400	1,768,000	30,483,400	97.39 %	816,600
051 Pendaftaran Berkas Perkara	12,570,000	0	11,225,250	1,323,000	12,548,250	99.83 %	21,750
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	12,570,000	0	11,225,250	1,323,000	12,548,250	99.83 %	21,750
521211 Belanja Bahan	4,800,000	0	4,778,750	0	4,778,750	99.56 %	21,250
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,770,000	0	6,446,500	1,323,000	7,769,500	99.99 %	500
052 Penetapan Hari Sidang	400,000	0	389,000	0	389,000	97.25 %	11,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	400,000	0	389,000	0	389,000	97.25 %	11,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	400,000	0	389,000	0	389,000	97.25 %	11,000

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILT I III SURABAYA TAHUN 2024

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	12,730,000	0	11,582,000	375,000	11,957,000	93.93 %	773,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	12,730,000	0	11,582,000	375,000	11,957,000	93.93 %	773,000
521211 Belanja Bahan	11,430,000	0	10,782,000	375,000	11,157,000	97.61 %	273,000
522151 Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0	500,000	0	500,000	50.00 %	500,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
054 Minutasi/Upaya Hukum	4,800,000	0	4,721,150	70,000	4,791,150	99.82 %	8,850
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,800,000	0	4,721,150	70,000	4,791,150	99.82 %	8,850
521211 Belanja Bahan	4,800,000	0	4,721,150	70,000	4,791,150	99.82 %	8,850
055 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	800,000	0	798,000	0	798,000	99.75 %	2,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	800,000	0	798,000	0	798,000	99.75 %	2,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	800,000	0	798,000	0	798,000	99.75 %	2,000
BCA.U05 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	840,000	0	40,000	167,500	207,500	24.70 %	632,500
051 Pendaftaran Berkas Perkara	510,000	0	40,000	167,500	207,500	40.69 %	302,500
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	510,000	0	40,000	167,500	207,500	40.69 %	302,500
521211 Belanja Bahan	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	210,000	0	40,000	167,500	207,500	98.81 %	2,500
052 Penetapan Hari Sidang	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
053 Minutasi	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
521211 Belanja Bahan	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
054 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000
QCA Perkara Hukum Perseorangan	67,762,000	0	67,762,000	0	67,762,000	100.00	0
QCA.001 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	67,762,000	0	67,762,000	0	67,762,000	100.00	0
051 Sidang di Luar Gedung Pengadilan	67,762,000	0	67,762,000	0	67,762,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	67,762,000	0	67,762,000	0	67,762,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,162,000	0	67,162,000	0	67,162,000	100.00	0

## 6. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-16 Makassar

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 2 (dua) orang Staf Pengelola Keuangan. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 63/PA/SK/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Adapun Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas pengelola Anggaran Belanja pegawai (PPABP) dan Petugas Pengantar SPM & Pengambil SP2D di Pengadilan Militer III-16 Makassar ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 02/SEK.PM.W3.Mil05/SK.KU1.1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Sedangkan penunjukan Bendahara Pengeluaran dan bendahara Penerimaan Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 01/KPM.W3.Mil05/SK.KU1.1.1/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2024, Pengadilan Militer III-16 Makassar didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.



a. **DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)**

DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663356/2024 tanggal 24 November 2023. Pada tahun 2024 Pagu Anggaran DIPA 01 sebesar Rp3.903.085.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian mengalami 7 (Tujuh) kali revisi anggaran sehingga Pagu Anggaran DIPA 01 menjadi sebesar Rp4.320.447.000,- (Empat miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran.

Pada tahun 2024, DIPA 01 telah dilakukan revisi sebanyak 7 (Tujuh) kali seiring dengan perubahan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian revisi DIPA 01 yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dilihat dengan tabel berikut:

Tabel IV. 1 Revisi DIPA 01 Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tanggal	Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)	Jumlah (Rp)
1	DIPA awal	24-11-2023	2.704.580.000	1.198.505.000	-	<b>3.903.085.000</b>
2	Revisi 1	20-02-2024	2.704.580.000	1.198.505.000	-	<b>3.903.085.000</b>
3	Revisi 2	24-04-2024	2.704.580.000	1.198.505.000	-	<b>3.903.085.000</b>
4	Revisi 3	07-06-2024	2.704.580.000	1.287.385.000	-	<b>3.991.965.000</b>
5	Revisi 4	08-07-2024	2.704.580.000	1.287.385.000	-	<b>3.991.965.000</b>
6	Revisi 5	27-09-2024	2.829.580.000	1.287.385.000	-	<b>4.116.965.000</b>
7	Revisi 6	23-10-2024	2.829.580.000	1.287.385.000	17.982.000	<b>4.134.947.000</b>
8	Revisi 7	15-11-2024	3.015.080.000	1.287.385.000	17.982.000	<b>4.320.447.000</b>

1) Revisi Ke-1 Tanggal 20 Februari 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana;

2) Revisi Ke-2 Tanggal 24 April 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana;

3) Revisi Ke-3 Tanggal 07 Juni 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan rencana penarikan dana;

4) Revisi Ke-4 Tanggal 08 Juli 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan rencana penarikan dana;

5) Revisi Ke-5 Tanggal 27 September 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk menginput Anggaran Belanja Tambahan Gaji Dan Tunjangan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan memperbaiki rencana penarikan dana;

6) Revisi Ke-6 Tanggal 23 Oktober 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk menginput Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.17.982.000,00 (Tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan memperbaiki rencana penarikan dana.

7) Revisi Ke-7 Tanggal 15 November 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk menginput Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.185.500.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memperbaiki rencana penarikan dana.

Rincian masing-masing pagu belanja sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV. 2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.015.080.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.287.385.000
53	Belanja Modal	Rp. 17.982.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 4.320.447.000</b>

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 pada tahun 2024 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai (Rp)	Barang (Rp)	Modal (Rp)
Januari	152.253.858	141.137.283	0
Februari	200.137.686	85.096.300	0
Maret	373.665.133	149.902.700	0
April	207.226.958	94.727.141	0
Mei	205.974.958	90.863.377	0
Juni	380.990.745	119.959.593	0
Juli	210.600.480	90.754.400	0
Agustus	212.099.480	128.709.132	0
September	211.821.480	57.135.250	0
Oktober	210.787.480	103.634.500	0
November	269.097.480	66.804.600	17.982.000
Desember	242.623.426	136.632.550	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.877.279.164</b>	<b>1.265.356.826</b>	<b>17.982.000</b>

tuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Pagu	Rp. 4.320.447.000	100
Realisasi	Rp. 4.160.618.148	96.30
Sisa	Rp. 159.828.852	3.70

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi pada Tahun 2024 sebesar 96.30% atau Rp. 4.160.618.148,00 (Empat miliar seratus enam puluh juta enam ratus delapan belas ribu seratus empat belas rupiah).

**b. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)**

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663357/2024 tanggal 24 November 2023. Pada tahun 2024 Pagu Anggaran DIPA 05 sebesar Rp. 179.004.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah).

Pada tahun 2024, DIPA 05 telah dilakukan revisi sebanyak 5 (Lima) kali seiring dengan perubahan kebutuhan dan target yang telah ditetapkan. Rincian revisi DIPA 05 yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berikut:

- 1) Revisi Ke-1 Tanggal 20 Februari 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi

halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana;

2) Revisi Ke-2 Tanggal 24 April 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana;

3) Revisi Ke-3 Tanggal 07 Juni 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana;

4) Revisi Ke-4 Tanggal 08 Juli 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana;

5) Revisi Ke-5 Tanggal 08 Oktober 2024 adalah Revisi Halaman III DIPA (Revisi kewenangan Kanwil DJPB) Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 5 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang			
	Belanja Barang Persediaan dan Jasa Pos		Belanja Perjalanan Sidang Keliling	
Januari	Rp.	0	Rp.	0
Februari	Rp.	6.076.500	Rp.	0
Maret	Rp.	4.810.000	Rp.	44.736.900
April	Rp.	4.094.500	Rp.	0
Mei	Rp.	13.754.100	Rp.	0
Juni	Rp.	5.360.600	Rp.	0
Juli	Rp.	6.944.000	Rp.	25.450.000
Agustus	Rp.	5.766.600	Rp.	0
September	Rp.	6.996.500	Rp.	0
Oktober	Rp.	3.695.900	Rp.	0
November	Rp.	0	Rp.	0
Desember	Rp.	25.558.600	Rp.	25.530.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>83.057.300</b>	<b>Rp.</b>	<b>95.716.900</b>

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 6 Realisasi Anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pagu	179.004.000	100
Realisasi	178.774.200	99.87
Sisa	229.800	0.13

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 99.87% atau sebesar Rp.178.774.200,00 (Seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).

**c. KEUANGAN DARI PERKARA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara karena pengelolaan biaya perkara dikelola oleh Oditurat Militer.

**d. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Sumber dana untuk melaksanakan belanja negara dalam APBN, adalah pendapatan dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP mempunyai peran yang cukup besar dalam APBN dari tahun ke tahun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yg dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

Obyek PNBP adalah Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah. Pada tahun 2024, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Militer III-16 Makassar nihil.

**7. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-17 Manado**

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana

disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-17 Manado yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-17 Manado beserta satker secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibantu oleh Kepala Sub Bagaian Umum dan Keuangan, PPK, PPSPM dan Bendahara.

Adapun Realisasi penyerapan danggaran dalam Tahun 2024 di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah sebagai berikut:

- a. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIPA BUA Nomor: 005.01.2.663360/2024 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

### **1) Belanja Pegawai**

Pagu awal	: Rp.2.286.140.000 (Dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)
Pagu Setelah Revisi	: Rp.2.136.140.000 (Dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah)
Realisasi	: Rp. 2.077.240.693 (Dua milyar tujuh puluh tujuh Juta dua ratus empat puluh enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah)
Sisa Anggaran	: Rp.58.899.307 (Lima puluh delapan juta Delapan ratus sembilan puluh Sembilan ribu Tiga ratus tujuh rupiah)
Persentase	: 98,12 %

### **2) Belanja Barang**

Pagu awal	: Rp. 1.463.367.000 (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
Pagu Setelah Revisi	: Rp. 1.530.087.000 (Satu milyar lima ratus tiga Puluh juta delapan

	puluh tujuh ribu rupiah)
Realisasi	: Rp. 1.518.777.747 (Satu milyar lima ratus Delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah)
Sisa Anggaran	: Rp. 11,309,253 (Sebelas juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah)

**3) Belanja Modal**

Pagu Awal	: -
Setelah Revisi	: Rp. 62.982.000 (Enam puluh dua juta sembilan delapan puluh dua ribu rupiah)
Realisasi	: Rp. 62.950.000 (Enam puluh dua juta Sembilan Ratus lima puluh ribu rupiah)
Sisa Anggaran rupiah)	: Rp. 32.000 (Tiga puluh dua ribu

b. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia

DIPA Ditjen Badilmiltun Nomor: 005.01.2.663361/2024 Tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

**1) Belanja Barang**

Pagu awal	: Rp. 233.930.000 (Dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
Realisasi	: Rp. 231.603.915 (Dua ratus tiga puluh satu juta Enam ratus tiga ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)
Sisa Anggaran	: Rp. 2.326.085 (Dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah)
Persentase	: 99,01 %

## 8. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-18 Ambon

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 93/SEK/SK.KU1.1/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan para Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 08/SEK.W3-Milo7.KU.01/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2024.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2024, Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun anggaran 2023, anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada TA 2024 terbagi



atas dua DIPA yakni DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 4.698.062.000- (Empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu rupiah) dan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun sebesar Rp 194.521.000 (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dimana jika dibandingkan dengan TA. 2023 pada DIPA 01 mengalami kenaikan, pada DIPA 05 Ditjen Badilmiltun kinerja indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan mengalami penurunan.

- a. DIPA -005.01.2.663377/2024 tanggal 28 Nopember 2023
- b. DIPA -005.05.2.663378/2024 tanggal 28 Nopember 2023

Pada awal tahun anggaran 2024, jumlah anggaran dalam DIPA-005.01.2.663377/2024 tanggal, 28 Nopember 2023 seluruhnya adalah sebesar Rp. 4.698.062.000- (Empat milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh dua ribu rupiah). Sedangkan dalam DIPA-005.05.2.663378/2024 tanggal 28 Nopember 2023 seluruhnya adalah sebesar Rp.194.521.000 (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2024, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

**a. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	3.278.162.000	3.278.162.000	3.225.045.503	98.38
2	Belanja Barang	1.401.918.000	1.401.918.000	1.366.281.917	97.26
3	Belanja Modal	17.982.000	17.982.000	17.982.000	100
<b>JUMLAH</b>		<b>4.698.062.000</b>	<b>4.698.062.000</b>	<b>4.609.309.420</b>	<b>98.11</b>

*Tabel 4.1 Data Pagu dan Realisasi DIPA 01*

Untuk diketahui bersama bahwa dalam Tahun Anggaran 2024 DIPA 01 mengalami revisi tingkat kewenangan esalon-1 dengan (DJA) sebanyak 2 (dua) kali dan revisi pada tingkat kewenangan Satker dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan sebanyak 3 (tiga) kali dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Revisi ke-1, 4.130.080.000 tanggal 19 Februari 2024 (revisi halaman III DIPA)
- 2) Revisi ke-2, 4.130.080.000 tanggal 18 April 2024 (revisi halaman III DIPA)
- 3) Revisi ke-3, 4.130.080.000 tanggal 04 Juli 2024 (revisi halaman III DIPA)
- 4) Revisi ke-4, 4.520.080.000 tanggal 16 Oktober 2024 (pengurangan belanja pegawai) revisi eselon I.
- 5) Revisi ke-5, 4.538.062.000 tanggal 04 Nopember 2024 (Penambahan anggaran belanja modal) revisi eselon I.
- 6) Revisi ke-6, 4.698.062.000 tanggal 04 Desember 2024 (Penambahan anggaran belanja kenaikan tunjangan Hakim) revisi eselon I.

### **1). Belanja Pegawai**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;

- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;
- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
- e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
- f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;
- i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan

- j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon Belanja Pegawai diperuntukan sebagai berikut :

- a) Belanja Gaji Pokok PNS;
- b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
- d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
- e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
- f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
- g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
- h) Belanja Uang Makan PNS;
- i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
- j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
- k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.

Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.

- a). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi pagu awal belanja pegawai yang tertuang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2024 pada satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp 2.728.162.000-** (Dua milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dan setelah mengalami revisi anggaran tingkat esalon I sebanyak 3 (Tiga) kali sehingga pagu anggaran belanja pegawai menjadi **Rp 3.278.162.000-** (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah).

- b). Pelaksanaan Anggaran

Dari alokasi pagu anggaran belanja pegawai TA 2024 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.3.225.045.503,- (Tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta empat puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah) atau 98.38% dari pagu anggaran, sedangkan pada TA 2023 realisasi belanja pegawainya sebesar **Rp 2.502.763.391,-** (Dua milyar lima ratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 92.41 % dari pagu anggaran.

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp. 722.282.112,-** (Tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus dua belas ribu rupiah) atau (28.86 %) dibandingkan realisasi belanja pegawai pada TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu anggaran belanja pegawai antara TA 2024 dengan TA 2023 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer III-18 Ambon per 31 Desember TA 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2023. Terjadinya kenaikan persentase realisasi anggaran belanja pegawai sebesar 28.86 % ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah personel Hakim Militer dan staf pada tahun 2024 sehingga bertambah realisasi belanja pegawai. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2. Data Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
<b>Belanja Gaji Pokok PNS</b>	<b>741.648.000</b>	<b>723.337.000</b>	<b>715.884.100</b>	<b>98.97</b>
<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	10.418	<b>65.11</b>
<b>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</b>	<b>20.600.000</b>	<b>50.499.000</b>	50.425.560	<b>99.85</b>
<b>Belanja Tunj. Anak PNS</b>	<b>6.982.000</b>	<b>13.378.000</b>	<b>13.083.912</b>	<b>97.80</b>
<b>Belanja Tunj. Struktural PNS</b>	<b>20.220.000</b>	<b>40.320.000</b>	<b>40.320.000</b>	<b>100</b>
<b>Belanja Tunj. Fungsional PNS</b>	<b>19.000.000</b>	<b>21.720.000</b>	<b>21.720.000</b>	<b>100</b>

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTII III SURABAYA TAHUN 2024**

<b>Belanja Tunj. PPh PNS</b>	<b>88.000.000</b>	<b>202.038.000</b>	<b>201.021.293</b>	<b>99.50</b>
<b>Belanja Tunj. Beras PNS</b>	<b>20.000.000</b>	<b>39.769.000</b>	<b>39.179.220</b>	<b>98.52</b>
<b>Belanja Uang Makan PNS</b>	<b>155.696.000</b>	<b>129.000.000</b>	<b>118.661.000</b>	<b>91.99</b>
<b>Belanja Tunjangan Umum PNS</b>	<b>35.000.000</b>	<b>21.765.000</b>	<b>21.080.000</b>	<b>96.85</b>
<b>Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</b>	<b>1.477.000.000</b>	<b>1.837.120.000</b>	<b>1.804.460.000</b>	<b>98.22</b>
<b>Belanja Tunj. Kemahalan Hakim</b>	<b>144.000.000</b>	<b>199.200.000</b>	<b>199.200.000</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.728.162.000</b>	<b>3.278.162.000</b>	<b>3.225.045.503</b>	<b>98.38</b>

Tabel 4.3. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2024  
(dalam satuan rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>Naik/Turun</b>	<b>%</b>
<b>Belanja Gaji Pokok</b>	693.276.690	715.884.100	22.607.140 (Naik)	
<b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>	12.464	10.418	2.046 (Turun)	
<b>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</b>	42.073.348	50.425.560	8.352.212 (Naik)	
<b>Belanja Tunj. Anak PNS</b>	11.750.540	13.083.912	1.333.372 (Naik)	
<b>Belanja Tunj. Struktural PNS</b>	36.000.000	40.320.000	4.320.000 (Naik)	
<b>Belanja Tunj. Fungsional PNS</b>	18.840.000	21.720.000	2.880.000 (Naik)	
<b>Belanja Tunj. PPh PNS</b>	170.787.475	201.021.293	30.233.818 (Naik)	
<b>Belanja Tunj. Beras PNS</b>	38.744.700	39.179.220	434.520 (Naik)	
<b>Belanja Uang Makan PNS</b>	119.008.000	118.661.000	347.000 (Turun)	
<b>Belanja Tunjangan Umum PNS</b>	26.060.000	21.080.000	4.980.000 (Turun)	
<b>Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI</b>	1.210.520.000	1.804.460.000	593.940.000 (Naik)	
<b>Belanja Tunj. Kemahalan Hakim</b>	136.800.000	199.200.000	62.400.000 (Naik)	
<b>Jumlah</b>	<b>2.503.873.487</b>	<b>3.225.045.503</b>	<b>721.172.016 (Naik)</b>	

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 53.116.497 (Lima puluh tiga juta

seratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari total pagu yang dialokasikan, (sisa anggaran tersebut dapat dilihat pada table diatas).

## 2). Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

### a). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Alokasi pagu awal belanja barang dalam DIPA 01 BUA MA RI tahun anggaran 2024 pada satker Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar **Rp. 1.401.918.000,-** (Satu milyar empat ratus satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

### b). Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja barang per 31 Desember T.A 2024 adalah sebesar **Rp. 1.366.281.917,-** (Satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), atau sebesar 97.46 % dari pagu anggaran, sedangkan pada T.A 2023 adalah sebesar **Rp. 1.335.194.432,-** (Satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh

empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau 95.79 % dari pagu anggaran.

Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp 31.087.485,- (Tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah)** atau **(2.33%)** dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2023. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2023, Hal ini disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Realisasi Belanja Barang TA 2024 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
<b>Belanja Keperluan Perkantoran</b>	375.708.000	387.708.000	383.098.700	98.81
<b>Belanja Barang Konsumsi</b>	96.621.000	96.621.000	87.974.800	91.05
<b>Belanja Langganan Internet</b>	264.000.000	264.000.000	259.740.000	98.39
<b>Belanja Lisensi Video Conference</b>	6.000.000	6.000.000	4.468.500	74.48
<b>Belanja Sewa Web Hosting</b>	4.000.000	4.000.000	3.360.000	84.00
<b>Belanja Pengiriman Surat Dinas</b>	12.000.000	6.000.000	5.749.500	95.82
<b>Belanja Langganan Telepon</b>	38.000.000	9.320.000	6.127.200	65.74
<b>Belanja Pemeliharaan Gedung</b>	198.520.000	198.520.000	<b>198.520.000</b>	100
<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	131.810.000	131.810.000	128.120.500	97.20
<b>Belanja Honor Operasional</b>	38.544.000	38.544.000	38.544.000	100
<b>Belanja Pakaian Dinas</b>	25.595.000	25.595.000	25.595.000	100
<b>Belanja Perjadin ke Pusat</b>	79.200.000	114.280.000	113.023.717	98.90



<b>Belanja Perjadin Telaah RKAKL</b>	-	-	-	-
<b>Belanja Perjadin Rakernas</b>	41.200.000	6.120.0000	6.120.000	100
<b>Belanja Sewa Rumdis Hakim</b>	90.720.000	113.400.000	105.840.000	93.33
<b>Jumlah</b>	<b>1.401.918.000</b>	<b>1.401.918.000</b>	<b>1.366.281.917</b>	<b>97.46</b>

Tabel 4.5. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan TA 2024 (dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2024	NAIK/TURUN	%
<b>Belanja Keperluan Perkantoran</b>	365.492.200	383.098.700	17.606.500 (Naik)	
<b>Belanja Barang Konsumsi</b>	64.299.800	87.974.800	23.675.000 (Naik)	
<b>Belanja Langganan Internet</b>	259.740.000	259.740.000	-	
<b>Belanja Lisensi Video Conference</b>	1.412.000	4.468.500	3.056.500 (Naik)	
<b>Belanja Sewa Web Hosting</b>	2.880.000	3.360.000	480.000 (Naik)	
<b>Belanja Pengiriman Surat Dinas</b>	5.529.500	5.749.500	220.000 (Naik)	
<b>Belanja Langganan Telepon</b>	6.959.729	6.127.200	832.529 (Turun)	
<b>Belanja Pemeliharaan Gedung</b>	198.520.000	198.520.000	-	
<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	118.776.500	128.120.500	9.344.000 (Naik)	
<b>Belanja Honor Operasional</b>	67.726.000	38.544.000	29.182.000 (Turun)	
<b>Belanja Pakaian Dinas</b>	29.708.000	25.595.000	4.113.000 (Turun)	
<b>Belanja Perjadin ke Pusat</b>	107.067.343	113.023.717	5.956.374 (Naik)	
<b>Belanja Perjadin Telaah RKAKL</b>	10.157.360	0	10.157.360 (Turun)	
<b>Belanja Perjadin Rakernas</b>	0	6.120.000	6.120.000 (Naik)	
<b>Belanja Sewa Rumdis Hakim</b>	86.940.000	105.840.000	18.900.000 (Naik)	
<b>Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19</b>	5.000.000	0	5.000.000 (Turun)	
<b>Belanja Pengadaan inventaris CPNS</b>	3.986.000	0	3.986.000 (Turun)	
<b>Belanja Alat Bantu Jalan</b>	1.000.000	0	1.000.000 (Turun)	
<b>Jumlah</b>	<b>1.335.194.432</b>	<b>1.366.281.917</b>	<b>31.087.485 (Naik)</b>	

c). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa

anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 35.636.083 (Tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh tiga rupiah) atau sebesar 2.54 % dari total pagu yang dianggarkan.

### 3) Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi.

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 17.982.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 100 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan, sedangkan realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 126.988.000,- (Seratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 100 % dari total pagu anggaran yang dianggarkan.

Jika dicermati terlihat bahwa realisasinya belanja modal mengalami penurunan pada tahun anggaran 2024 dari tahun 2023, Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh alokasi pagu anggaran belanja modal yang kecil dibandingkan TA 2023.

Tabel 4.6. Realisasi Belanja Modal TA 2024  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi)</b>	<b>17.982.000</b>	<b>17.982.000</b>	<b>17.982.000</b>	<b>100</b>
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>	<b>17.982.000</b>	<b>17.982.000</b>	<b>17.982.000</b>	<b>100</b>

Tabel 4.7. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2024  
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2024	Kenaikan /Penurunan	%
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>126.988.000</b>	<b>17.982.000</b>	<b>Penurunan</b>	<b>606</b>
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Jumlah</b>	<b>126.988.000</b>	<b>17.982.000</b>	<b>Penurunan</b>	<b>606</b>
---------------	--------------------	-------------------	------------------	------------

**b. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI**

Pagu alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA. 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	194.521.000	193.083.000	99.26
<b>JUMLAH</b>		<b>194.521.000</b>	<b>193.083.000</b>	<b>99.26</b>

Tabel 4.8. Daftar Pagu dan Realisasi DIPA 05

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI sepanjang tahun anggaran 2023 mengalami revisi 3 (tiga) kali revisi Kanwil Anggaran, namun pagu anggaran tetap yakni sebesar Rp 187.771.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Revisi ke I, 194.521.000 tanggal 19 Februari 2024 (revisi halaman III DIPA)

Revisi ke II, 194.521.000 tanggal 18 April 2024 (revisi halaman III DIPA)

Revisi ke III, 194.521.000 tanggal 04 Juli 2024 (revisi halaman III DIPA)

1) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada tahun anggaran 2024 Satker Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebesar Rp 194.521.000- (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya hukum.

2) Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per 31 Desember T.A 2024 adalah sebesar Rp. 193.083.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 99.26 % sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 186.625.000,- (Seratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99.39%.

Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang TA 2023. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang pagu anggaran TA 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2023, namun besaran pagu anggaran pada TA 2024 lebih meningkat/lebih besar dibandingkan pagu anggaran TA 2023.

Tabel 4.9. Realisasi Belanja Barang TA 2024 (dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Realisasi	%
<b>Belanja Pendaftaran Berkas Perkara</b>	13.950.000	24.613.500	<b>99.97</b>
<b>Belanja Peneetapan Hari Sidang</b>	200.000	201.500	<b>95.95</b>
<b>Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</b>	31.250.000	24.654.000	<b>96.27</b>
<b>Belanja Minutasi / Upaya Hukum</b>	5.400.000	350.000	<b>97.22</b>
<b>Belanja pengiriman dokumen penyelesaian perkara</b>	4.200.000	4.187.000	<b>75.00</b>
<b>Belanja Penyelesaian Perkara Lalu lintas</b>	1.680.000	1.236.000	<b>73.57</b>
<b>Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan</b>	137.841.000	137.841.000	<b>100</b>
<b>Jumlah</b>	<b>194.521.000</b>	<b>193.083.000</b>	<b>99.26</b>

Tabel 4.10. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2024 (dalam satuan rupiah).

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rupiah	%
<b>Belanja Pendaftaran Berkas Perkara</b>	24.613.500	24,632,000	(18.500)	
<b>Belanja Penetapan Hari Sidang</b>	201.500	105.000	96.500	
<b>Belanja Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</b>	24.654.000	25,597,000	(943.000)	
<b>Belanja Minutasi / Upaya Hukum</b>	350.000	1.650.000	1.300.000	
<b>Belanja pengiriman dokumen penyelesaian perkara</b>	4.187.000	4.800.000	(613.000)	

<b>Belanja Penyelesaian Perkara Lalu lintas</b>	1.236.000	0	1.236.000	
<b>Belanja Sidang diluar Gedung Pengadilan</b>	137.841.000	129,841,000	8.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>193.083.000</b>	<b>186.625.000</b>	<b>6.458.000</b>	

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan alokasi pagu anggaran yang diterima pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada TA 2024 yakni sebesar Rp. 194.521.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 193.083.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) atau sebesar 99.26% sehingga sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 1.438.000,- (Satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau sebesar 0.74 %.

**c. KEUANGAN DARI PERKARA**

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2024 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

*Tabel 4. 1 Jumlah biaya perkara*

No.	Perkara	Jumlah Rp.
1.	Kejahatan	Rp. 450.000,-
2.	Pelanggaran	Rp. 135.000,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 100.000.000,-
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 2.800.000,-
<b>Jumlah</b>		Rp. 103.385.000.-

**9. Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura**

**a. DIPA 01 (663381)**

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 17.899.938.058,- atau mencapai 99,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 17.956.813.000,-

*Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-19 Jayapura*

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6
1.	17.956.813.000	17.899.938.058		99,68	56.874.942

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

**1) Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III – 19 Jayapura adalah:

- a) BRI Cab. Jayapura 653246633811000 a.n. BPg 063 PENGADILAN MILITER III 19 JAYAPURA (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.
- b) BRI Cab. Jayapura 651556633821000 a.n. BPg: 063 PENGADILAN MILITER III 19 JAYAPURA (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

**2) Revisi DIPA**

- a) Revisi DIPA kesatu oleh Eselon 1 tanggal 28 Desember 2024.
- b) Revisi DIPA kedua oleh Eselon 1 tanggal 17 Januari 2024.
- c) Revisi DIPA ketiga oleh Eselon 1 tanggal 14 Februari 2024.

- d) Revisi DIPA keempat oleh Eselon 1 tanggal 13 April 2024.
- e) Revisi DIPA kelima oleh Eselon 1 tanggal 13 Juli 2024.
- f) Revisi DIPA keenam oleh Eselon 1 tanggal 1 September 2024.
- g) Revisi DIPA ketujuh oleh Eselon 1 tanggal 23 Oktober 2024.
- h) Revisi DIPA kedelapan oleh Eselon 1 tanggal 01 Desember 2024.
- i) Revisi DIPA kesembilan oleh Eselon 1 tanggal 05 Desember 2024.

**3) Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

- a) Koreksi Data/Pembetulan SPM (Nihil)
- b) SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tahun 2024 yang di setor melalui BRI sejumlah Nihil.

**b. DIPA 05 (663382)**

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 355.989.049,- atau mencapai 97.67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 364.490.000,-.

*Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-19 Jayapura*

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1	364.490.000	355.989.049	97.67	8.500.951

## **B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.**

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, wajib dilakukan pemeliharaan dan pengamanan agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek Kelembagaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Fasilitas kerja lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Militer, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menunjang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi: perencanaan, penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI) pada seluruh aset tetap Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer Se-Wilayah Hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Aplikasi SAKTI Modul Aset telah dijalankan di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku UAKPB dan laporannya disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 meliputi :



1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penggunaan;
4. Pemanfaatan;
5. Pengamanan dan pemeliharaan;
6. Penilaian;
7. Penghapusan;
8. Pemindahtanganan;
9. Penatausahaan; dan
10. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila sepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

1. Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
2. Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
3. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar- besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur bahwa Menteri Keuangan RI adalah sebagai Pengelola Barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga adalah sebagai Pengguna Barang.

## 1. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA.

### a. Sarana Dan Prasarana.

Pada Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.663300/2024 tanggal 24 November 2023 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan belanja modal yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi sebesar Rp17.982.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) untuk pembelian 2 unit Printer dan 2 unit Scanner. Rincian pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

*Tabel Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana*

No	Uraian Pengadaan	Banyaknya	Nilai
1.	Pengadaan Printer	2 unit	Rp. 3.423.424,-
2.	Pengadaan Scanner	2 unit	Rp. 10.810.810,-
<b>Total Nilai</b>			<b>Rp. 14.234.234,-</b>

**b. Tanah Dan Gedung Kantor.**

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.663300/2024 tanggal 24 November 2023 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mendapat anggaran belanja modal Pengadaan Renovasi Gedung Kantor sebesar Rp.1.327.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengadaan perbaikan atap/plafon gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, realisasi pelaksanaan perbaikan atap/plafon sebesar Rp.971.615.474 (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah). Sisa anggaran dari perbaikan atap/plafon gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (adendum) sebesar Rp.98.307.564,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) dengan melaksanakan Pembangunan Teras Anti Gratifikasi.

*Tabel Daftar Gedung dan Bangunan*

No	Uraian	Jumlah (M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1.	Perbaikan ATAP Gedung Kantor Dilmilti III Surabaya	1.429	971.615.474,-
2	Pembangunan Teras	16.8	98.307.564,-
<b>Total Nilai</b>			<b>1.069.923.038,-</b>

Kedudukan kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berlokasi di jalan Ir. H. Juanda No. 87 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dimana masing-masing tahap pembangunan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, yaitu di tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2010 dengan total nilai aset sebesar Rp.6.267.714.000,- (enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Pada tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 903/DjMT.1/B/PL.04/6/2022 tanggal 29 Juni 2022 telah dilaksanakan acara penyerahan barang milik negara berupa sertifikat tanah dari Dirjen Badilmiltun MA RI kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima dua sertifikat tanah dengan Nomor 00052 seluas 3.844 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan sertifikat tanah Nomor 00054 seluas 212 m<sup>2</sup> yang dipergunakan sebagai jalan umum warga Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kedua sertifikat tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada bulan Desember tahun 2022 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima transfer masuk aset tetap berupa tanah dari Ditjen Badilmiltun MA RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 2064a/DjMT.1/B/PL.04/12/2022 tanggal 26 Desember 2022, sehingga aset tetap berupa tanah yang semula tercatat pada Data Aset Ditjen Badilmiltun MARI sekarang tercatat sebagai aset tetap berupa tanah dalam Data Aset Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

*Tabel Daftar Tanah*

No	Uraian	Jumlah (M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.844	3.697.749.000,-
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	212	50.447.887.264,-

*Tabel Daftar Gedung dan Bangunan*

No	Uraian	Jumlah (M <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.499	3.727.649.000,-
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	120	359.129.000,-

**c. Peralatan Dan Mesin.**

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dibedakan menjadi:

- 1) kendaraan dinas
- 2) alat pengolah data dan komunikasi
- 3) inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang

dimiliki Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam tahun 2024 yaitu:

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 9 (sembilan) unit, dimana 3 (tiga) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan, 2 (dua) unit merupakan transfer masuk dari Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI, sedangkan kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit yang semua perolehannya merupakan hasil pembelian melalui pengadaan.

*Daftar Rincian Kendaraan Dinas*

No	Uraian	Merk/Type	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Randis R-4	Toyota Camry	2023	1 unit	digunakan untuk operasional KA
2.	Randis R-4	Mitsubishi Pajero Sport	2023	1 unit	digunakan untuk operasional Waka
3.	Randis R-4	Toyota Corolla Altis	2006	1 unit	digunakan untuk operasional Panitera
4.	Randis R-4	Toyota Innova Zenix	2023	1 unit	digunakan untuk operasional Sekretaris
5.	Randis R-4	Toyota Corolla Altis	2008	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
6.	Randis R-4	Toyota Vios	2009	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
7.	Randis R-4	Toyota Kijang Innova	2009	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
8.	Randis R-4	Toyota New Avanza	2011	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
9.	Randis R-4	Toyota Hiace	2020	1 unit	digunakan untuk operasional Kantor
10.	Randis R-2	Honda Supra Fit	2006	1 unit	digunakan untuk operasional
11.	Randis R-2	Honda GL Max125	2006	1 unit	digunakan untuk operasional
12.	Randis R-2	Honda Mega Pro CW	2007	1 unit	digunakan untuk operasional
13.	Randis R-2	Honda MegaPro CW	2008	1 unit	digunakan untuk operasional kantor
14.	Randis R-2	Honda Blade	2011	1 unit	digunakan untuk operasional

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

*Tabel Nilai Aset Kendaraan Dinas*

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	5 unit	1.143.726.500,-
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	4 unit	Sewa
3.	Kendaraan Dinas Roda 2	5 unit	82.767.000,-
<b>Total</b>			<b>1.226.493.500,-</b>

Tabel Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
1.	PC Unit	36 unit	377.296.613
2.	Lap Top	22 unit	270.125.176
3.	Note Book	5 unit	77.459.500
4.	CPU	4 unit	59.400.000
5.	Monitor	1 unit	4.500.000
6.	Printer	40 unit	119.468.040
7.	Scanner	4 unit	39.668.698
8.	External/PortableHarddisk	1 unit	1.500.000
9.	Server	2 unit	182.399.250
10.	Router	1 unit	8.899.000
11.	Hub	3 unit	30.000.000
12.	Modem	1 unit	3.960.000
13.	Rak server	2 unit	18.314.590
<b>Nilai Total</b>			<b>1.192.990.867</b>

**d. Pemeliharaan Sarana Dan Prasana.**

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun, upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, pemeliharaan yang dilakukan berupa pemeliharaan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.619.606.000,- (*enam ratus sembilan belas juta enam ratus enam ribu rupiah*) terdiri dari:

- 1) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dengan anggaran sebesar Rp282.212.000,- (*dua ratus delapan puluh dua dua ratus dua belas ribu rupiah*), berupa:
  - a) Pemeliharaan Gedung Kantor
  - b) Pemeliharaan Halaman Kantor
  - c) Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor.
  - d) Pemeliharaan rumah genzet.
  - e) Pemeliharaan rumah dinas.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dengan anggaran sebesar Rp.337.394.000,- (*tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), berupa:

- a) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4.
- b) Pemeliharaan Kendaraan roda 4 (sewa).
- c) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2.
- d) Pemeliharaan Sound System.
- e) Pemeliharaan mesin fotocopy.
- f) Pemeliharaan PC, Laptop/Notebook dan Printer.
- g) Pemeliharaan AC Split Portable AC.
- h) Pemeliharaan Inventaris kantor.
- i) Pemeliharaan Genzet.
- j) Pemeliharaan mesin potong rumput.
- k) Bahan Bakar Genzet.
- l) Bahan Bakar Kendaraan Sewa.

## **2. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

**a. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA**

Di Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kegiatan belanja modal yaitu pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi berupa scanner dan printer. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 17.560.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Rincian pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel IV.8 di bawah.

Tabel IV.8 Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	4526400999-LTN-228154118 Printer HP Laserjet 108A	2	1.900.000	3.800.000
2	4526200000-LTN-228498914 Scanner Buku CZUR Aura Pro	2	6.880.000	13.760.000
<b>Total Nilai</b>				<b>17.560.000</b>

**b. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI.**

**1) Tanah dan Gedung Kantor.**

**Tanah Pengadilan Militer III-12 Surabaya.** Berdasarkan pengelompokan aset Tanah dan Gedung Bangunan yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

a) Aset tanah.

Tabel IV.9 Rincian Tanah

No	Nama Barang	Jenis Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Tanah Seluruhnya	Alamat
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	15,140,580,000	1,974	Jln. Juanda
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	46,445,128,259	3,539	No. 85 Sidoarjo

## b) Aset Gedung Bangunan.

Tabel IV.10 Rincian Aset Gedung Bangunan

No	Nama Barang	Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Bangunan	Jalan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	IMB	4,427,663,000	1,440	Jl. Raya Juanda

**2) Peralatan Dan Mesin.**

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi:

- a) Kendaraan dinas
- b) Peralatan Mesin Non Tik
- c) Peralatan Khusus Tik
- d) Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1 Unit	Rp. 1.500.000
2	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1 Unit	Rp. 2.200.000
3	Mesin Hitung Listrik	1 Unit	Rp. 9.900.000
4	Mesin Fotocopy Folio	2 Unit	Rp. 93.598.350
5	Lemari Besi/Metal	14 Unit	Rp. 33.025.000
6	Lemari Kayu	13 Unit	Rp. 53.010.660
7	Filing Cabinet Besi	20 Unit	Rp. 34.627.000
8	Brandkas	1 Unit	Rp. 4.000.000
9	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1 Unit	Rp. 990.000
10	Locker	2 Unit	Rp. 6.645.000
11	Box Printer dan Reader Smart Card	2 Unit	Rp. 10.000.000
12	Tabung Pemadam Api	4 Unit	Rp. 19.712.000
13	Rambu-Rambu	1 Unit	Rp. 1.010.000
14	CCTV - Camera Control Television System	1 Unit	Rp. 19.965.000
15	Papan Visual/Papan Nama	34 Unit	Rp. 7.050.000
16	Movitex Board	1 Unit	Rp. 17.630.000
17	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	Rp. 3.115.000
18	Hand Metal Detector	1 Unit	Rp. 1.479.500
19	Mesin Laminating	1 Unit	Rp. 2.129.050
20	LCD Projector/Infocus	1 Unit	Rp. 9.620.000
21	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6 Unit	Rp. 11.979.000
22	Alat Kantor Lainnya	1 Unit	Rp. 26.994.550
23	Meja Kerja Kayu	80 Unit	Rp. 166.083.515
24	Kursi Besi/Metal	104 Unit	Rp. 261.670.200
25	Kursi Kayu	15 Unit	Rp. 48.245.910
26	Sice	5 Unit	Rp. 34.895.000



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DILMILTI III SURABAYA TAHUN 2024

27	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp.	58.755.730
28	Meja Rapat	2	Unit	Rp.	23.679.500
29	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp.	1.630.000
30	Meja Telepon	1	Unit	Rp.	1.382.700
31	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp.	13.640.330
32	Partisi	4	Unit	Rp.	67.123.980
33	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	Unit	Rp.	1.015.650
34	Mesin Penghisap Debu /Vacuum Cleaner	2	Unit	Rp.	2.101.000
35	Mesin Pel/Poles	2	Unit	Rp.	49.896.000
36	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	Rp.	14.928.000
37	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19.772.500
38	Lemari Es	3	Unit	Rp.	13.447.500
39	A.C. Split	44	Unit	Rp.	297.078.100
40	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9.500.500
41	Televisi	5	Unit	Rp.	59.884.000
42	Loudspeaker	4	Unit	Rp.	41.736.000
43	Sound System	1	Unit	Rp.	39.999.300
44	Microphone	7	Unit	Rp.	3.296.700
45	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	7.246.000
46	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	2.970.000
47	Dispenser	7	Unit	Rp.	11.371.300
48	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	849.200
49	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14.905.000
50	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Rp.	2.155.620
51	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Unit	Rp.	990.000
52	Audio Mixing Console	1	Unit	Rp.	16.483.500
53	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Unit	Rp.	50.012.120
54	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5.447.200
55	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4.950.000
56	LCD Monitor	1	Unit	Rp.	10.644.900
57	Camera Conference	1	Unit	Rp.	25.518.900
58	Mesin Pemotong Biasa	1	Unit	Rp.	2.948.000
59	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	9.872.500
60	Alat Studio Lainnya	1	Unit	Rp.	4.950.000
61	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp.	24.915.000
62	Facsimile	2	Unit	Rp.	7.100.000
63	Genset	1	Unit	Rp.	198.969.000
64	Alat Kedokteran THT Lainnya	1	Unit	Rp.	1.692.000
65	Walker Polding	4	Unit	Rp.	4.268.600
66	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	Unit	Rp.	2.265.000
<b>Nilai Total</b>				Rp.	<b>1.992.481.715</b>

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2024 yaitu :

a) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel IV.11 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1 Unit	Sewa (Digunakan untuk operasional jabatan Kepala)
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2005	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1 Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3 Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.12 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2 Unit	Rp. 361.400.000
2.	Kendaraan dinas roda 2	5 Unit	Rp. 77.450.000
<b>Total Nilai</b>			<b>Rp. 438.850.000</b>

b) Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.13 Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

c) Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.14 Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
1.	Local Area Network (LAN)	1 Unit	Rp. 12.536.194
2.	Komputer Jaringan Lainnya	2 Unit	Rp. 115.740.000
3.	P.C Unit	39 Unit	Rp. 543.524.610
4.	Lap Top	27 Unit	Rp. 425.599.550
5.	Tablet PC	1 Unit	Rp. 4.440.000
6.	Komputer Unit Lainnya	1 Unit	Rp. 102.352.500
7.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23 Unit	Rp. 58.965.100
8.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9 Unit	Rp. 61.242.570
9.	Server	3 Unit	Rp. 223.655.000
10.	Router	1 Unit	Rp. 9.955.000
11.	Rak Server	1 Unit	Rp. 9.866.590
<b>Nilai Total</b>			<b>Rp. 1.567.877.144</b>

d) Aset tetap lainnya.

Tabel IV.15 Daftar Aset tetap lainnya

No	NUP	Nama Barang	Kondisi	Merk/ Tipe	Nilai Perolehan Pertama
1	1	Monografi	Baik	Buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	Rp. 85.000
2	2	Monografi	Baik	Buku Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas,	Rp. 85.000
<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 170.000</b>

### c. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- 1) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m<sup>2</sup> senilai Rp.197.568.000.
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp.184.297.000

**d. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA**

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2024 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

**3. PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN.**

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

**a. Kendaraan Dinas**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Jenis Kendaraan Roda 4					

1.	Mini Bus	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Sekretaris
2.	Mini Bus	2011	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil
3.	Station Wagon	2021	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Mini Bus	2023	Baik	-	-	Digunakan untuk kendaraan Waka
<b>II. Jenis kendaraan Roda 2</b>						
1.	Honda Supra X 125	2006	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Caraka Kantor
2.	Honda Mega Pro GL 160 D	2007	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
4.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor
5.	Honda GL Max II	2008	-	Rusak Ringan	-	Digunakan untuk Operasional Kantor

b. Rumah Dinas.

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak memiliki Rumah Dinas.

c. Bangunan Gedung Tempat Kerja

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bangunan Gedung Kantor	2013	Baik	-	-	
2.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	2015	Baik	-	-	

d. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Tahun Perlehan	Jumlah Barang	Jumlah Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Battery Charge	2013	1	1	-	-	
2.	Scanner	2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2024	8	8	-	-	
3.	Mesin Ketik Manual	2006	1	1	-	-	
4.	Mesin Ketik Listrik	2007	2	2	-	-	
5.	Mesin Foto Copy	2009-2010	2	-	2	-	
6.	Lemari Besi Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018.	25	25	-	-	
7.	Lemari Kayu	2011,2015,2016,2017	14	13	-	1	

8.	Rak Besi	2013	1	1	-	-	
9.	Filing Cabinet Besi	2006, 2007, 2008	9	9	-	-	
10.	Brandkas	2006	1	1	-	-	
11.	Peti Uang/Cash Box	2008	1	1	-	-	
12.	Tabung Pemadam Api	2018	2	2	-	-	
13.	CCTV – Camera Control Television System	2017	1	1	-	-	
14.	Papan Visual/ Papan Nama	2010	6	6	-	-	
15.	Alat Penghancur Kertas	2007, 2009, 2010	4	2	-	2	
16.	LCD Projector/ Infocus	2008	1	1	-	-	
17.	Alat Perekam suara	2011	1	1	-	-	
18.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023	55	31	24	-	
19.	Kursi Besi/Metal	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2022, 2023	198	195	-	3	
20.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-	
21.	Sice/ Sofa	2008, 2013, 2017	7	7	-	-	
22.	Meja Rapat	2010, 2015	6	6	-	-	
23.	Meja Komputer	2007, 2009, 2010	16	16	-	-	
24.	Meja Resepsionis	2013	1	1	-	-	
25.	Kasur/Spring Bed	2011	4	4	-	-	
26.	Partisi	2015	2	-	-	2	
27.	Publik Astari (pembatas antrian)	2010, 2015	3	3	-	-	
28.	Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	2010	2	2	-	-	
29.	Mesin Potong Rumput	2008, 2009, 2010	4	0	4	-	
30.	Lemari Es	2011	2	2	-	-	
31.	A.c. Sentral	2013, 2021	3	1	2	-	
32.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2017, 2021	24	3	21	-	
33.	Televisi	2007, 2011, 2017	4	3	1	-	
34.	Sound System	2007, 2008	2	2	-	-	
35.	Lambang Garuda Pancasila	2010	1	1	-	-	
36.	Tiang Bendera	2010	2	2	-	-	
37.	Dispenser	2007, 2011	5	5	-	-	
38.	Mimbar/Podium	2010	1	1	-	-	
39.	Lambang Instansi	2011	1	1	-	-	
40.	Handy Cam	2008	1	1	-	-	
41.	Gordyin/ Kray	2013	20	20	-	-	
42.	Kabel Roll	2017	1	1	-	-	
43.	Panggung	2010	1	1	-	-	
44.	Microphone/ Wireless Mic	2017	6	6	-	-	
45.	Microphone/ boom Stand	2017	6	6	-	-	
46.	Audio Master Control Unit	2017	1	1	-	-	
47.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2008, 2011, 2013, 2015, 2017, 2022	25	11	-	14	
48.	Microphone Cable	2017	6	6	-	-	
49.	Camera Digital	2011	1	1	-	-	

50.	Connectors	2013	1	1	-	-	
51.	Broadband Amlifier	2013	1	1	-	-	
52.	Pesawat Telephone	2013	10	10	-	-	
53.	Facsimile	2007	1	1	-	-	
54.	Finger Printer Time Attendance	2013, 2017	2	2	-	-	
55.	Genset	2013	1	-	1	-	
56.	Kursi Dorong	2018, 2022	2	2	-	-	
57.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2018	4	4	-	-	
58.	Internet	2009, 2010	2	2	-	-	
59.	P.c Unit	2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022	42	40	-	2	
60.	Lap Top	2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022	26	22	3	1	
61.	CPU (peralatan Personal Komputer)	2013	1	1	-	-	
62.	Monitor (Dell LCD)	2009	1	1	-	-	
63.	Printer (peralatan personal komputer)	2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024	27	25	-	2	
64.	Peralatan personal komputer lainnya (Pfelink Psw 161)	2009	1	1	-	-	
65.	Server	2009, 2013, 2015, 2021	5	4	-	1	
66.	Router	2013, 2016	2	2	-	-	
67.	Rak Server	2013, 2021	2	2	-	-	
68.	Kabel UTP	2013, 2017	2	2	-	-	
69.	Switch (TP link WR743ND)	2013	12	12	-	-	
70.	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2022	2	2	-	-	
71.	Microphone	2022	7	7	-	-	
72.	Loudspeaker	2022	4	4	-	-	
73.	Audio Mixing Console	2022	1	1	-	-	
74.	Camera Conference	2022	1	1	-	-	
75.	Bracket Standing Peralatan	2022	1	1	-	-	
76.	LCD Monitor	2022	1	1	-	-	

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang Prima terhadap para Pencari Keadilan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2018 telah membangun Mushola "Al-Ikhlas" dengan biaya pengadaannya berasal dari swadaya para Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

#### 4. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan seluruhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Wujud dari sarana dan prasarana

tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Sarana dan Prasarana di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tahun 2024 ada penambahan saptas berupa : 2 (dua) Unit Printer dan 2 (dua) unit Scanner serta Tambah Daya Listrik dengan jumlah sebesar Rp. 92.142.000,- (sembilan puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan mendapat tambahan anggaran berupa : belanja tunjangan Hakim dan Panitera, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 dan belanja sewa rumah dinas Hakim, hal ini dikarenakan tahun 2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapatkan anggaran biaya tambahan sejumlah Rp. 320.360.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sarana dan prasarana sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

a. Tanah dan Bangunan Gedung Kantor

No	Satker	Gedung Kantor	
		Tanah (M <sup>2</sup> )	Bangunan (M <sup>2</sup> )
1.	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	2110	1512

Tabel IV. 7 : Tanah dan Bangunan

b. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Untuk menunjang kinerja pegawai disamping sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas yang lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting, sarana dan prasarana fasilitas gedung yang terdiri dari meubelair dan alat-alat lain serta fasilitas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang ada pada Pengadilan Militer III-14 sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Kendaraan Dinas

Tabel IV. 8 : Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I.</b>	<b>Kendaraan Roda 4</b>					
	1. Toyota Kijang Innova	2009		1		
	2. Nissan Grand Livina	2011	1			
	3. Toyota/Kijang Innova	2021	1			



	4.	Toyota Avansa	2012	1	
	5.	Toyota/Inova Rebon	2011	1	Hibah
	6.	Toyota Rush	2023	1	
<b>II.</b>	<b>Kendaraan Roda 2</b>				
	1.	Honda GL Max	2007		2
	2.	Suzuki Thunder	2007		1
	3.	Honda Mega Pro	2007		2

## c. Rumah Dinas

Tabel IV. 9 : Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Kepala	0				
2.	Rumah Dinas Wakil Kepala	0				
3.	Rumah Dinas Hakim	0				
4.	Rumah Dinas Panitera	0				
5.	Rumah Dinas Sekretaris	0				

Tabel IV. 10 : Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Kantor

No	Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah	Ket/Kondisi
<b>Gedung I</b>			
<b>Lantai 1 (satu)</b>			
1	Ruang TI/ Ruang Server	1	Baik
2	Ruang Sidang	1	Baik
3	Ruang Oditur	1	Baik
4	Ruang PH	1	Baik
5	Ruang Tahanan	1	Baik
6	Ruang Perpustakaan	1	Baik
7	Ruang Laktasi	1	Baik
8	Toilet	1	Baik
9	Lobby	1	Baik
10	Ruang bermain anak	1	Baik
11	Ruang Tunggu Terbuka/Teras Imperium	1	Baik
<b>Lantai 2 (dua)</b>			
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang Wakil Kepala	1	Baik
3	Ruang Pokkimmil	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Panmud Pidana	1	Baik
6	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
7	Ruang Staf Kepaniteraan	1	Baik
8	Ruang Tamu VIP	1	Baik
9	Ruang Spri	1	Baik
10	Ruang Staf Kepaniteraan	1	Baik
11	Toilet	2	Baik
<b>Gedung II</b>			
<b>Lantai 1 (satu)</b>			
1	Ruang Arsip	1	Baik

2	Rencana Ruang Sidang Baru	1	Baik
3	Toilet	1	Baik
4	Gudang	1	Baik
<b>Lantai 2 (dua)</b>			
1	Ruang Sekretaris	1	Baik
2	Ruang Kasubbag UK dan Staf UK	1	Baik
3	Ruang Kasubbag KOTL	1	Baik
4	Ruang Coment Center	1	Baik
5	Ruang Kasubbag PTIP dan staf	1	Baik
6	Ruang Staf KOTL	1	Baik
7	Toilet	1	Baik
<b>Gedung III</b>			
<b>Lantai 1 (satu) dan 2 (dua)</b>			
1	Ruang Tamu	1	Baik
2	Kamar Tidur	5	Baik
3	Kamar Mandi	1	Baik

Tabel IV. 11 : Inventaris Kantor

<b>Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor</b>			
1	Alat Kantor Lainnya	3	Baik
	Alat Kantor Lainnya	2	Rusak Ringan
2	Rak Besi	1	Rusak Berat
3	Lemari Kayu	1	Baik
	Lemari Kayu	3	Rusak Ringan
4	Rak Kayu	2	Baik
5	Filing Cabinet Besi	9	Rusak Ringan
	Filing Cabinet Besi	2	Rusak Berat
6	Brandkas	1	Rusak Ringan
7	Buffet	1	Rusak Ringan
9	Dispenser	3	Rusak Ringan
10	Alat Penghancur Kertas	1	Rusak Berat
11	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik
	CCTV	1	Rusak Berat
12	Mesin Absensi	1	Baik
	Mesin Absensi	1	Rusak Ringan
13	LCD Projector/Infocus	1	Rusak Ringan
	LCD Proyektor	1	Baik
14	Lemari Es/Kulkas	1	Rusak Ringan
15	Meja Kerja Kayu	3	Rusak Ringan
	Meja Kerja Kayu	8	Rusak Ringan

	Meja Kerja Kayu	3 1	Baik Rusak Berat
<b>16</b>	Kursi Besi Metal Kursi Besi/Metal  Kursi Besi/Metal	3 1 0  6 0	Baik Rusak Berat Rusak Ringan
<b>17</b>	Kursi Kayu	6	Rusak Ringan
<b>18</b>	Sice Sice	3 1	Rusak Ringan Baik
<b>19</b>	Meja Rapat	1	Rusak Ringan
<b>20</b>	Meja Komputer	4	Rusak Ringan
<b>21</b>	Meja Telepon	2	Rusak Ringan
<b>22</b>	Loker	1	Baik
<b>23</b>	Pompa Air	1	Rusak Berat
<b>24</b>	Meja Makan Kayu	1	Rusak Ringan
<b>25</b>	Televisi	4	Rusak Ringan
<b>26</b>	Sound System	1	Rusak Ringan
<b>27</b>	Unit Power Supply Unit Power Supply	4 2	Baik Rusak Ringan
<b>28</b>	Jam Elektronik	1	Rusak Ringan
<b>29</b>	Tiang Bendera	2	Baik
<b>30</b>	Palu Sidang	1	Baik
<b>31</b>	Lambang Instansi	1	Baik
<b>32</b>	Internet	1	Baik
<b>33</b>	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
<b>34</b>	P.C Unit P.C Unit P.C Unit	11 15 3	Baik Rusak Ringan Rusak Berat
<b>35</b>	Laptop Laptop Laptop	10 10 1	Baik Rusak Ringan Rusak Berat
<b>36</b>	Server Server	1 2	Baik Rusak Ringan
<b>37</b>	Rak Server	1	Baik
<b>38</b>	Monografi	2	Baik
<b>39</b>	Software Komputer	8	Baik
<b>40</b>	Lemari Besi/Metal	17	Rusak

			Ringan
41	A.C Window	2	Rusak Ringan
42	A.C Split	15	Rusak Ringan
	A.C Split	3	Rusak Ringan
	AC Split	8	Rusak Berat Baik
43	Facsimile	2	Rusak Ringan
44	Monitor	1	Rusak Ringan
45	Printer	7	Baik
		9	Rusak Ringan
46	Router	3	Rusak Ringan
47	Kabel UTP	1	Rusak Ringan
48	Peralatan jaringan lainnya	2	Rusak Ringan
49	Note Book	2	Baik
50	Scanner	5	Baik
51	Camera Conference	1	Baik
52	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3	Baik
53	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
54	Genset	1	Baik
55	Microphone	7	Baik
56	Loudspeaker	4	Baik
57	Kipas Angin	2	Baik
	Kipas Angin	1	Rusak Ringan
58	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	Baik
59	Conector	1	Rusak Berat
60	Walker Polding	1	Baik
61	LCD Monitor	1	Baik
62	Wheel Chair (Alkes Rehabilitasi Medis)	1	Baik
63	Audio Mixing Console	1	Baik
64	Standing AC	5	Baik

## 5. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG.

### a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang telah dilaksanakan secara rutin untuk menjaga sarana dan prasarana agar selalu laik fungsi.

### b. Perangkat Keras

Dalam rangka mendukung penyelesaian tugas pokok, Pengadilan Militer III-15 Kupang memiliki 1 unit Server Utama dan 1 unit Server Backup, Jaringan LAN dan WiFi dengan 8 titik akses poin, 24 titik kamera CCTV, PC (*Personal Computer*) sejumlah 26 unit, Laptop sejumlah 18 unit, Printer sejumlah 14 unit

dan scanner sejumlah 5 unit. Fasilitas Layanan Publik (Desk Info) Pengadilan Militer III-15 Kupang yang tersedia berupa TV LCD 2 unit yang berada di lobby depan dan lobby belakang.

**c. Perangkat Lunak**

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam sistem operasi komputer pada Pengadilan Militer III-15 Kupang adalah Windows 10, Windows 11 dan Centos untuk Server.

Dalam rangka mendukung penyelesaian pekerjaan di bidang Keuangan menggunakan aplikasi SAKTI, e-BIMA, e-SADEWA, SatuDJA, SMART DJA, SIMAN, Komdanas, SIRUP, GajiKemenkeu, e-Monev, SIMARI, SPANIT dan e-IPLANS; di bidang Kepegawaian menggunakan aplikasi E-PUPNS, SAPK, SIMARI, SIMPEG dan Komdanas; di bidang Perencanaan menggunakan aplikasi RKAKL/SAKTI, e-SAKIP, Komdanas serta di bidang Perkara menggunakan aplikasi SIPP, Siratmil, MISS, Direktori Putusan dan e-Berpadu dan untuk bidang pengawasan menggunakan aplikasi SIWAS MARI.

Pengadilan Militer III-15 Kupang telah memiliki media elektronik sebagai sarana informasi publik melalui website dengan situs : [www.dilmil-kupang.go.id](http://www.dilmil-kupang.go.id), email dengan alamat email : [dilmil315kupang@gmail.com](mailto:dilmil315kupang@gmail.com) sosial media berupa call center melalui *Whatsapp* dengan nomor +6282138889421, *Instagram* dengan nama akun @dilmil315kupang, *Facebook* dengan nama akun Pengadilan Militer III-15 Kupang dan kanal *Youtube* dengan nama Dilmil III-15 Kupang.

**6. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR.**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-16 Makassar. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) modul Aset Tetap yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer

III-16 Makassar selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Makassar secara periodik per semester.

#### a. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

##### 1) Tanah dan Gedung Kantor

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah menempati Gedung Kantor baru di Jalan Batara Bira Km. 16 No.5 Baddoka Makassar sejak tanggal 19 Oktober 2013. Penempatan gedung kantor baru ini berdasarkan peresmian langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Tenggara Kalimantan Timur pada tanggal 22 Mei 2013. Sarana dan Prasarana Kantor Dilmil III-16 Makassar sebagian besar merupakan pengadaan sendiri dari Mahkamah Agung.

Untuk tertib pengadministrasian sarana dan prasarana Gedung Kantor Pengadilan Militer III-16 Makassar telah dilaksanakan pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara ke dalam aplikasi, Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) serta pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah.

Tabel IV. 7 Tanah Dan Bangunan Gedung Kantor

No	Satker	Gedung Kantor		
		Tanah (M <sup>2</sup> )	Bangunan (M <sup>2</sup> )	Halaman
1.	Dilmil III-16 Makassar	2.139 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>

##### 2) Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung yang meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Untuk menunjang kinerja pegawai disamping sarana dan prasarana gedung, sarana dan prasarana fasilitas yang lainnya merupakan sesuatu yang sangat penting, sarana dan prasarana fasilitas gedung yang terdiri dari Kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan rumah dinas (Pengadilan Militer III-16 Makassar belum mempunyai rumah dinas), serta sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor lainnya keadaan pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 8 Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I.</b>	<b>Kendaraan Roda 4</b>					
	1. Terios	2011	-	Rusak Ringan	-	-
<b>II.</b>	<b>Kendaraan Roda 2</b>					
	1. Nihil	-	-	-	-	-

Tabel IV. 9 Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Kepala	-	-	-	-	-
2.	Rumah Dinas Wakil Kepala	-	-	-	-	-
3.	Rumah Dinas Hakim	-	-	-	-	-
4.	Rumah Dinas Panitera	-	-	-	-	-
5.	Rumah Dinas Sekretaris	-	-	-	-	-

Tabel IV. 10 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung/Kantor

No	Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2.	Pompa Air	1	Baik
3.	Station Wagon	1	1 Rusak Ringan
4.	Kursi Roda	1	Baik
5.	Scanner (Universal Tester)	2	1 Baik / 1 Rusak Berat
6.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Rusak Berat
6.	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inchi)	1	Rusak Berat
7.	Mesin Fotocopy Electronic	1	Rusak Berat Baik
8.	Lemari Besi/Metal	22	Baik
9.	Lemari Kayu	16	Baik
10.	Rak Besi	3	Baik
11.	Filing Cabinet Besi	17	15 Baik / 2 Rusak Berat
12.	Brandkas	1	Baik
13.	Lemari Katalog	2	Baik
14.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	2	Baik
15.	Tabung Pemadam Api	5	Rusak Ringan
16.	Fire Alarm	1	Baik
17.	CCTV - Camera Control Television System	2	Baik
18.	Papan Visual/Papan Nama	46	Baik
19.	Alat Pemotong Kertas	1	Rusak Berat
20.	Penangkal Petir	2	Baik
21.	Stempel Timbul/Bulat	1	Baik
22.	LCD Projector/Infocus	1	Baik
23.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	1 Baik / 1 Rusak Berat
24.	Perkakas Kantor Lainnya	5	Baik
25.	Alat Kantor Lainnya	15	Baik
26.	Meja Kerja Kayu	45	41 Baik / 4 Rusak Berat
27.	Kursi Besi/Metal	196	159 Baik / 37 Rusak Berat
28.	Kursi Kayu	21	Baik
29.	Sice	6	Baik
30.	Meja Rapat	3	Baik
31.	Meja Komputer	6	4 Baik / 2 Rusak Berat
32.	Tempat Tidur Kayu	1	Baik
33.	Meja Resepsionis	1	Baik
34.	Partisi	4	Baik
35.	Gantungan Jas	8	Baik
36.	Meubelair Lainnya	1	Baik
37.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik

38	Mesin Pemotong Rumput	1	Rusak Berat
39	A.C. Sentral	2	Rusak Berat
40	A.C. Split	32	10 Baik/ 11 Rusak Ringan / 11 Rusak Berat
41	Kipas Angin	1	Rusak Berat
42	Rak Piring Alumunium	1	Baik
43	Televisi	4	2 Baik / 2 Rusak Berat
44	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	Rusak Berat
45	Loudspeaker	6	Baik
46	Sound System	2	1 Rusak Ringan / 1 Rusak Berat
47	Wireless	8	Baik
48	Microphone	7	Baik
49	Stabilisator	1	Rusak Berat
50	Lambang Garuda Pancasila	3	Baik
51	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	Baik
52	Pataka	2	Baik
53	Tangga Aluminium	2	1 Baik / 1 Rusak Berat
54	Dispenser	11	3 Baik / 8 Rusak Berat
55	Lambang Instansi	1	Baik
56	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
57	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9	Baik
58	Audio Mixing Console	1	Baik
59	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
60	Uninterruptible Power Supply (UPS)	18	2 Baik / 6 Rusak Berat
61	Mixer Sound Sistem	1	Baik
62	Off Air TV Monitor	1	Rusak Berat
63	Camera Electronic	1	Baik
64	Camera Digital	1	Rusak Berat
65	LCD Monitor	2	Baik
66	Camera Conference	2	Baik
67	Mesin Jilid	1	Baik
68	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	1	Baik
69	Telephone (PABX)	23	Baik
70	Facsimile	2	Baik
71	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	Baik
72	UPS 15 KVA for HUB Station	6	2 Baik / 4 Rusak Berat
73	Genset	1	Rusak Ringan
74	Walker Polding	1	Baik
75	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2	Baik
76	Desktop X-Ray	5	Baik
77	Layar Proyektor	1	Baik
78	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	Baik
79	Internet	3	Baik
80	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
81	P.C Unit	32	27 Baik / 5 Rusak
82	Lap Top	31	20 Baik / 11 Rusak Berat
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	14 Baik / 15 Rusak Berat
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
85	Server	2	Baik
86	Router	1	Baik
87	Modem	2	Baik
88	Rak Server	1	Baik
89	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
90	Gedung Pos Jaga Permanen	1	Baik
91	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	Baik
92	Pagar Permanen	1	Baik
93	Monografi	2	Baik



Tabel IV. 11 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

No	Klasifikasi Barang	Nama Barang	Jumlah	Ket
	Station Wagon	Kijang Innova	1	Rusak Berat
	Sepeda Motor	GL MAX	1	Rusak Berat
	Sepeda Motor	SUZUKI	1	Rusak Berat
	Sepeda Motor	HONDA	1	Rusak Berat
	Sepeda Motor	HONDA	1	Rusak Berat
	Sepeda Motor	HONDA	1	Rusak Berat

## 7. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO.

### a. Sarana dan Prasarana Gedung.

Bahwa sejak tanggal 5 Mei Tahun 2020 Pengadilan Militer III-17 Manado sudah menempati gedung kantor sendiri yang merupakan pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, yang terletak di Kompleks Pengadilan Terpadu Kota Manado.

#### 1) Pengadaan.

Pengadilan Militer III-17 Manado sejak bulan januari 2024 sampai dengan akhir bulan desember 2024 telah mengadakan pengadaan fasilitas perkantoran berupa 2 unit printer, 2 unit scanner, dan 1 unit Mobile File dengan Realisasi belanja modal untuk pengadaan tersebut sebesar Rp.62.950.000 (Enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserap dari Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

#### 2) Pemeliharaan.

Pengadilan Militer III-17 Manado untuk pemeliharaan Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan:

- a) Perawatan Gedung Kantor/Khusus sebanyak 1 (Satu) unit yang terdiri dari perawatan gedung kantor,
- b) Pemeliharaan Perawatan Kendaraan Dinas yang terdiri dari
  - (1) Perawatan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 unit kendaraan roda 4 dengan salah satunya merupakan kendaraan sewa.
  - (2) Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 5 unit
- c) Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor.

Sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Militer III-17 Manado sejak bulan Mei Tahun 2020 sudah memadai bila

dihubungkan dengan standarisasi kebutuhan Rencana Mahkamah Agung RI untuk semua badan peradilan, apalagi fasilitas yang tersedia sangat cukup menunjang untuk pelaksanaan tugas. Adapun fasilitas yang tersedia adalah sebagai berikut:

- a) Ruang Kepala
- b) Ruang Wakil Kepala
- c) Ruang Hakim Militer
- d) Ruang Panitera
- e) Ruang Sekretaris
- f) Ruang para Kepala Sub Bagian, Bendahara serta Ruang Kesekretariatan dan Kepaniteraan
- g) Ruang Sidang Utama
- h) Ruang Sidang Kecil
- i) Ruang Musyawarah Hakim
- j) Ruang Perpustakaan
- k) Ruang Tahanan Pria
- l) Ruang Tahanan Wanita
- m) Ruang Server
- n) Ruang Tunggu Pengunjung
- o) Ruang Tamu
- p) Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- q) Ruang Oditur Militer
- r) Ruang Penasehat Hakim
- s) Ruang Saksi
- t) Ruang Laktasi dan Kesehatan
- u) Ruang Garasi
- v) Gudang
- w) Ruang Dapur Pegawai
- x) Ruang Arsip Aktif dan Ruang Arsip Pasif
- y) Ruang Panel Kontrol (Atas dan Bawah)
- z) Ruang Rapat / Command Center
- aa) Peralatan penunjang lainnya seperti Telepon, Faksimile, Komputer, Televisi, Internet, Server, Genset dan AC.

d) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Pengadilan Militer III-17 Manado sudah dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp. 217.450.000 (Dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 217.248.585 (Dua ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima), sehingga sisa anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan kantor sebesar Rp. 201.417 (Dua ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

e) Untuk kendaraan dinas roda 4 yang terdiri dari 3 unit ditambah 1 unit kendaraan sewa dengan pagu awal sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp. 108.000.000,- dikarenakan penambahan revisi DJA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2024

sebesar Rp. 107.995.063 (Seratus tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah). Sedangkan untuk perawatan kendaraan dinas roda 2 yang terdiri dari 5 unit, untuk pagu awal Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), terealisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp. 17.497.152 (Tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah).

f) Perawatan untuk sarana dan prasarana kantor lainnya, Pagu awal sebesar Rp52.062.000 (Lima puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah) sehingga Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2024 sebesar Rp.51.766.365 (Lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), sisa anggaran sebesar Rp.295.636 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Dana tersebut adalah untuk perbaikan AC, perawatan/pemeliharaan alat pengolah data (Komputer, laptop, server, printer) mesin pompa air, mesin jenset, tabung pemadam api.

b. Penghapusan.

Bahwa selama Tahun 2024 Pengadilan Militer III-17 Manado belum melaksanakan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

## 7. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Dalam rangka pengelolaan barang milik negara agar dapat berdaya guna, wajib dilakukan pemeliharaan dan pengamanan agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan di Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Ambon.

**a. Pengadaan Sarana Dan Prasarana**

Di tahun anggaran 2024, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang Anggarannya diperoleh dari ABT sebagai berikut : .

*Tabel 4. 2 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana*

No	Uraian	Merk/Tipe	Jumlah	Harga Satuan	Total	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5		6	
1	Printer	ECOTANK 664-L121	2 PCS	Rp. 2.109.000,-	Rp. 4.218.000,-	Baik	
2	Scanner	RICOH EX-FUJITSU SP1120N	2 PCS	Rp. 6.882.000,-	Rp. 13.764.000	Baik	

**b. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki dan masih digunakan**

1) Tanah dan Gedung Kantor



a) Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, yang berdiri diatas tanah seluas 2.000 m2 . dengan nilai aset sebesar Rp. 15.350.756.700,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu

tujuh ratus rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 19 dan 20 tanggal 10 April 2007.

b) Tanah Eks Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menjadi tanah milik Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 14 Januari 2014 dengan luas 870 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Hative Kecil Ambon.

2) Peralatan dan Mesin.

Barang Milik Negara peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dibedakan menjadi :

a) Kendaraan dinas.

Kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) unit.

**Tabel 4. 3** Daftar kendaraan dinas

No	Uraian	Tipe/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional kantor
2.	Kendaraan dinas roda 4	Rush Tahun 2022	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional Kadilmil
3.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2012	1 Unit	Baik	Digunakan untuk operasional kantor

b) Peralatan dan mesin lainnya

**Tabel 4. 4** Daftar Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Pompa Air	4	4 baik
2.	Station Wagon	2	2 baik
3.	Rak -rak penyimpanan	2	2 baik
4.	Lemari penyimpanan	1	1 baik
5.	Lemari besi/metal	19	19 baik
6.	Lemari Kayu	8	8 baik
7.	Filling cabinet besi	9	9 rusak ringan
8.	Filling cabinet kayu	1	1 baik
9.	Brandkas	1	1 baik
10.	Tabung Pemadam Kebakaran	3	3 baik
11.	Cctv _ Camera Control Television System	10	10 baik
12.	Papan Visual/Papan Nama	15	15 baik
13.	White Board	6	6 baik
14.	Peta	2	2 baik

15.	Alat penghancur kertas	1	1 baik
16.	Mesin absensi	1	1 baik
17.	Mesin pemotong kertas	1	1 baik
18.	Papan gambar	1	1 baik
19.	Perkakas lainnya	1	1 baik
20.	Meja kerja kayu	39	27 baik 12 rusak ringan
21.	Kursi besi metal	117	117 baik
22.	Kursi kayu	26	26 baik
23.	Sice	6	5 baik 1 rusak ringan
24.	Meja rapat	2	2 baik
25.	Meja computer	13	13 rusak ringan
26.	Meja resepsionis	1	1 baik
27.	Kursi fiber glas/plastic	14	14 baik
28.	Partisi	2	2 baik
29.	Rak Sepatu	3	3 baik
30.	Mesin pemotong rumput	1	1 baik
31.	Lemari es	2	2 rusak ringan
32.	Ac Sentral	2	2 baik
33.	AC Split	24	24 baik
34.	Kompor Gas	1	1 rusak ringan
35.	Rak piring aluminium	1	1 baik
36.	Mixer	1	1 baik
37.	Televisi	3	3 baik
38.	Sound System	1	1 baik
39.	Microphone	9	9 baik
40.	Lambang garuda Pancasila	3	3 baik
41.	Gambar presiden	1	1 baik
42.	Tiang Bendera	6	6 baik
43.	Tangga aluminium	1	1 baik
44.	Lambang instansi	1	1 baik
45.	Asbak tinggi	6	6 baik
46.	DVD Player	1	1 baik
47.	Tangka Air	5	5 baik
48.	UPS	6	6 baik
49.	Battery Charger (peralatan studio Audio)	1	1 baik
50.	Power Amplifier	1	1 baik
51.	Digital Led Running Text	1	1 baik
52.	Digital Keyboard Technics	1	1 baik
53.	Camera Digital	1	1 baik
54.	LCD Monitor	8	3 baik 5 rusak ringan
55.	Pesawat telepon	37	37 baik
56.	Facsimile	1	1 rusak ringan
57.	Finger Print	1	1 baik
58.	Switcher Matrix And Server	1	1 baik
59.	Switcher Manual	1	1 baik
60.	Booster	1	1 baik
61.	Receiver Audio/Video	1	1 baik
63.	Internet	1	1 baik
64.	Komputer jaringan lainnya	1	1 baik

65.	P.C.Unit	22	22 baik
66.	Laptop	15	15 baik
67.	CPU (Peralatan personal computer)	5	5 baik
68.	Printer (Peralatan personal computer)	7	7 baik
69.	Scanner (peralatan personal computer)	2	2 baik
70.	Server	3	3 baik
71.	Router	1	1 baik
72.	Rak Server	1	1 baik
73.	Monografi	22	22 baik
74.	Alat music lainnya	1	1 baik
75.	Loundspeaker	4	4 baik
76.	Audio Mixing Console	1	1 baik
77.	Camera Conference	1	1 baik
78.	Bracket Standing Peralatan	1	1 baik

### c. **Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana**

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA).

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- 1) Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

### d. **Penghapusan Sarana Dan Prasarana**

Pada tahun 2024, aset Barang Milik Negara di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdapat dalam aplikasi SIMAK-BMN tidak ada barang yang diajukan untuk penghapusan.

## 9. **PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA.**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-19 Jayapura. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan,

penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Jayapura secara periodik per semester.

Setiap periode Tahun Anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-19 Jayapura senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk Tahun Anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Dalam Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Militer III-19 Jayapura melaksanakan pengadaan sarana dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.34.601.190.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Dari pagu tersebut, realisasi pengadaan sarana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 33.583.208.000
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 1.017.982.000
<b>Total Nilai</b>		<b>Rp. 34.601.190.000</b>

Di bawah ini kami sajikan seluruh BMN yang dimiliki Pengadilan Militer III-19 Jayapura:

a. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Mini Bus	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Dilmil



2.	Mini Bus	2011	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Kadilmil
<b>II. Jenis kendaraan Roda 2</b>						
1.	Honda Supra X 125	2007	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panitera
2.	Honda GI Max	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Panmud Hukum
3.	Honda Mega Pro GL 160 CW	2008	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Kantor
4.	Honda NF 125 S	2006	Baik	-	-	Digunakan untuk Kendaraan Operasional Kantor

b. Rumah Dinas

Pengadilan Militer III-19 Jayapura belum memiliki Rumah Dinas.

c. Tanah dan Bangunan

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Tanah	2006, 2016	Baik	-	-	
2.	Bangunan Lainnya	2017	Baik	-	-	

d. Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Jumlah Kondisi			Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mesin Foto Copy	2013	1	-	-	1	
2.	Lemari Besi/Metal	2008, 2019	6	6	-	-	
3.	Lemari Kayu	2008, 2011	13	12	-	1	
4.	Rak Kayu	2017	2	2	-	-	
5.	Filing Cabinet Besi	2007, 2008, 2011	10	8	-	2	
6.	Brandkas	2008	1	1	-	-	
7.	Peti Uang	2008	1	-	-	1	
8.	Tabung Pemadam Api	2009	4	4	-	-	
9.	CCTV	2009	1	-	1	-	
10.	Papan Visual	2008	3	3	-	-	
11.	Alat Penghancur Kertas	2008, 2009	2	2	-	-	
12.	Alat Pemetong Kertas	2009	1	1	-	-	
13.	LCD Projector/Infocus	2008	1	1	-	-	
14.	Acces Control System	2014	1	1	-	-	
15.	Meja Kerja Kayu	2006, 2007, 2008, 2009,	33	30	-	3	

		2010					
16.	Kursi Besi/Metal	2006, 2007, 2008, 2009, 2010	116	111	-	5	
17.	Kursi Kayu	2010	3	3	-	-	
18.	Sice	2006, 2008, 2009	5	2	-	-	
19.	Meja Komputer	2012	5	5	-	-	
20.	Kasur/Spring Bed	2009	1	1	-	-	
21.	Meubelair Lainnya	2009	1	1	-	-	
22.	Mesin Penghisap Debu	2008	1	1	-	-	
23.	A.c. Split	2006, 2007, 2008, 2009	10	10	-	-	
24.	Televisi	2007	1	1	-	-	
25.	Sound System	2008	1	1	-	-	
26.	Stabilisator	2017	1	1	-	-	
27.	Lambang Instansi	2012	1	1	-	-	
28.	Handy Cam	2008	1	-	-	1	
29.	Karpet	2014	1	1	-	-	
30.	Alat Rumah Tangga Lainnya	2008	3	3	-	-	
31.	Audio Command Desk	2010	1	1	-	-	
32.	UPS	2006, 2009, 2010, 2013	5	5	-	-	
33.	Pesawat Telephone	2008	1	1	-	-	
34.	Facsimile	2008	2	2	-	-	
35.	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2009	1	1	-	-	
36.	Switching Matrix and Server	2013	1	1	-	-	
37.	Switcher Manual	2012	1	1	-	-	
38.	Conecctor	2008	1	1	-	-	
39.	Genset	2012	1	-	-	1	
40.	Mainframe	2010	1	-	-	1	
41.	Komputer Jaringan Lainnya	2019	1	1	-	-	
42.	P.C Unit	2009, 2010, 2011, 2017, 2019, 2021, 2022	25	25	-	-	
43.	Lap Top	2009, 2010, 2011, 2022	14	14	-	2	
44.	Scanner	2016	1	1	-	-	
45.	CPU	2008	1	1	-	-	
46.	Monitor	2008	1	1	-	-	
47.	Printer	2009, 2010, 2017, 2022	12	3	5	4	
48.	Server	2013, 2015, 2019	3	3	-	-	
49.	Rak Server	2019	1	1	-	-	
50.	Kabel UTP	2012, 2013	2	2	-	-	
51.	Hubbel UTP	2016	1	1	-	-	
52.	Mixer Settler Type Adsorption Equipment	2008	1	-	-	1	

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

### 1. PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam lembaga publik merupakan suatu keniscayaan. hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan website pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi.melalui pengelolaan website yang berisikan informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparansi putusan.

#### a. Dukungan Aplikasi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Serta aplikasi yang di bangun oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri.

- 1) Di Bidang Perkara:
  - a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
  - b) Direktori Putusan
  - c) Aplikasi Opera (*Google Drive*)
- 2) Di Bidang Kepegawaian:
  - a) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
  - b) Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS)
  - c) My ASN
  - d) SIASN BKN
  - e) KOMDANAS MA RI
- 3) Di Bidang Keuangan:
  - a) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
  - b) Sistem Aplikasi Satker (SAS)
  - c) Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI).
  - d) Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi
  - e) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan

Anggaran Negara (OM SPAN).

- f) Monev DJA
  - g) KOMDANAS MA RI
- 4) Di Bidang Pelayanan Publik:
- a) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL) Elektronik Tamu Militer (*e-Tamil*).
  - b) SP4N Laporan!
  - c) SIWAS MA RI
- 5) Di Bidang Umum
- a) Aplikasi SIMAN
  - b) Aplikasi E-SADEWA
  - c) SAKTI (Persediaan)
  - d) KOMDANAS MA RI
  - e) Si Pinter (Aplikasi Perpustakaan berbasis Web)
- 6) Di Bidang Perencanaan
- a) Monev Bappenas
  - b) *e-lplans*
  - c) SAKTI
  - d) Satu DJa

#### **b. Dukungan Jaringan, Internet dan Server**

Pada tahun 2025 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menunjuk Inti Net sebagai penyedia layanan dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Kecepatan akses 120 Mbps
- 2) 14 Acces Point
- 3) Unlimited traffic and access time
- 4) IP Static / 30
- 5) Network monitoring MRTG
- 6) Support network 24 x 7
- 7) Service Level Agreement Qos 99,5 %

Adapun server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berjumlah 2 (dua) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2015 yang digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu)

unit server berstatus hibah dari Mahkamah Agung RI tahun 2019 digunakan sebagai server pendukung e-Court. Spesifikasi masing-masing server sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah.

*Data Perangkat Server*

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung gSIPP	Merk Intel Xeon 3,4 Ghz	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSIMegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		

**2. PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.  
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari

segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

**a. IMPLEMENTASI e-COURT**

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No.3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. E-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- 1) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- 2) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- 3) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- 4) e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- 1) Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- 2) Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara

dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

- 3) Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

#### **b. IMPLEMENTASI SIPP**

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 355/KPM.W3.Mil01/HK.2.3/HK.2.3/IX/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2024 adalah versi 5.6.4.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2024 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 176.92%.

#### **c. DUKUNGAN APLIKASI**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya

dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- 1) Di Bidang Perkara
  - a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
  - b) Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
  - c) Layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (E-court).
- 2) Di Bidang Kepegawaian
 

Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
- 3) Di Bidang Keuangan
 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

  - a) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
  - b) Elektronik Integrated Planning System (e-IPLANS)
- 4) Di Bidang Pelayanan Publik
  - a) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
  - b) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)
  - c) e-Survey (Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IKM)).

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- 1) Di Bidang Kepegawaian
  - a) Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
  - b) Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).
- 2) Di Bidang Perkara
  - a) Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
  - b) Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan (SIPTERA)
- 3) Di Bidang Pelayanan Publik
  - a) Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).
  - b) Chat Online berbasis Website.
  - c) Aplikasi Elitmil (Elektronil Literatur Dilmil)



- d) Layanan Civitas Akademik.
- e) Aplikasi Pintu Jelajah

Semua aplikasi yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimasukkan kedalam aplikasi Pintu Jelajah yang ada di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**d. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER**

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar computer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Selain menggunakan LAN, transmisi data juga menggunakan jaringan wifi, terdapat 9 access point yang membantu mendistribusi sinyal wifi ke seluruh gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mendukung ketersediaan jaringan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk PT Inti Data Telematika sebagai pihak ketiga penyedia layanan jaringan internet dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Kecepatan akses 130 Mbps

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant		
	OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		

	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		

- 2) Unlimited traffic and access time
- 3) IP Static / 29
- 4) Network monitoring MRTG
- 5) Support Network 24 x 7
- 6) Service Level Agreement Qos 99.5%

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki dan mengoperasikan server sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019.

### 3. PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN.

#### a. Implementasi *e-court*

**e-court** adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar/Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- 1) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- 2) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- 3) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- 4) e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah

perkara pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga akan digunakan untuk perkara pidana.

b. Implementasi SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2024 ini Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi SIPP. Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor: 1-144/KMASSK/II/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang standar Pelayanan pengadilan.

Pada Tahun 2022, versi SIPP Pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami peningkatan ke versi 5.1.0. dan pada tahun 2024 Versi SIPP mengalami 9 (sembilan) kali peningkatan versi yaitu 5.4.0, 5.5.0, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.0, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, dan yang terakhir 5.6.4. Peningkatan versi tersebut didasari adanya penyempurnaan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang terus berkembang.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi:

- 1) Komputer Server dengan spesifikasi:
  - a) Merk : Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 Server.

- b) CPU : Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1230 V2@3.30 Ghz
  - c) Memory : 8 Gb
  - d) Hard Disk : 300 Gb
  - e) OS : Linux centos 7
- 2) Router
- a) Merk : MikrotikRB1100AHX2
  - b) CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
  - c) Main Storage : 64 MB
  - d) RAM : 1,5 Gb
  - e) LAN Port : 13 Port
  - f) OS : Router OS
- 3) Bahwa dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan transparansi peradilan pada bulan November 2021 Pengadilan Militer III-13 mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung berupa :
- a) Server dengan spesifikasi:
    - (1) Merk : Fujitsu TX1330M4
    - (2) CPU : Intel Xeon E-2134
    - (3) Memory : 32 GB
    - (4) Hard Disk: 2 x 1TB
  - b) Komputer PTSP
    - (1) Merk : HP AIO ProOne 600 G5
    - (2) CPU : Intel Core i5
    - (3) RAM : 4GB
    - (4) Hard Disk : 1TB
    - (5) OS : Windows 10
  - c) UPS
    - (1) Merk : APC Back-Up BX1400U-MS
    - (2) Daya Keluar : 1400VA/700W
    - (3) Form factor : Tower
  - d) Kiosk Touchscreen
    - (1) Merk : Vestouch
    - (2) OS : Android
    - (3) Display : 21,5 Inch
  - e) Rak Server
    - (1) Merk : Indorack

- (2) Ukuran : 19 Inch
- (3) Jenis : Close rack Glass Door

4) Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau di atasnya. Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat [www.sipp.dilmil-madiun.go.id](http://www.sipp.dilmil-madiun.go.id) juga dilakukan sinkronisasi setiap hari sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

*One Day One Publish* merupakan bentuk pelayanan kepada public, dalam hal ini khususnya terhadap pencari keadilan, dimana Pengadilan militer III-13 Madiun mempublikasikan Informasi perkara maksimal 1 (satu) hari setelah perkara tersebut diputus. Akan tetapi Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini terus berupaya melaksanakan Pelayanan *Same day Publish*, yaitu mempublikasikan pada hari yang sama pada saat perkara tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 5.0.1 telah terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan.

#### 4. PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam lembaga publik merupakan suatu keniscayaan. Hal itu terkait dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Pengelolaan Website pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi. Melalui pengelolaan website yang berisikan

informasi mengenai transparansi keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA serta transparansi putusan.

Adapun data alamat website Pengadilan Militer III-14 Denpasar aktifasinya sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar di bidang Teknologi dan Informasi maka didukung berbagai perangkat teknologi yaitu :

No	Satker	Jenis barang	Tambah	Terpelihara	Rusak Berat	Total
1	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	Server		3		3
		Printer		7		7
		Laptop		20		20
		PC. Unit		29		29
		Stabilizer		2		2
		Router		3		3
		UPS		6		6

Tebal IV. 12 : Server

### **Perangkat keras**

Perangkat Keras Teknologi Informasi (Hardware) merupakan semua bagian yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam bentuk fisik. Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas agar efektif dan efisien telah menyiapkan sarana dan prasarana kinerja teknologi informasi berupa perangkat keras sebagai berikut:

No	Satker	Nama Aplikasi	Pembuat/Pengelola Aplikasi	Terpelihara	Ket
1	Pengadilan Militer III-14 Denpasar	Simak	Kemenkeu	Baik	
		BMN			
		Saiba	Kemenkeu	Baik	
		GPP Gaji	Kemenkeu	Baik	
		SPM	Kemenkeu	Baik	
		SAS	Kemenkeu	Baik	
		SAKTI	Kemenkeu	Baik	
		Sikep	Mahkamah Agung	Baik	
		Komdanas	Mahkamah Agung	Baik	
		SIPP	Mahkamah Agung	Baik	
		Simari	Mahkamah Agung	Baik	
		Siratmil	Ditjen Badilmiltun	Baik	
		Simpekip	Dilmil III-14 Denpasar	Baik	
E-Santi	Dilmil III-14 Denpasar	Baik			

Tabel IV. 13 : Aplikasi

### **Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.**

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yaitu aplikasi sistem penelusuran perkara yang dapat diakses melalui internet sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai perkara yang ada pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang perkara yang ada pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk informasi perkara. Saat ini Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Miiter III-14 Denpasar adalah SIPP Versi 5.6.4

### **5. PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG.**

Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Implementasi SIPP sudah sampai pada versi terbaru 5.6.4 dan juga aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) yang merupakan aplikasi pengawasan SIPP terdiri dari 8 (delapan) submenu, antara lain :

- a. Beranda,
- b. Data Umum,
- c. Pidana,
- d. Penetapan,
- e. Jadwal Sidang,
- f. Putus dan Minutasi,
- g. E-Doc,
- h. Kinerja.

Terdapat juga aplikasi Siratmil (Sistem Informasi Administrasi Peradilan Militer) yang merupakan aplikasi monitoring kegiatan kantor oleh Pimpinan dan Pimpinan Atas mulai dari Persuratan, Kepaniteraan, Kepegawaian, Keuangan dan BMN serta Umum dan implementasi terbaru adalah e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web untuk integrasi berkas pidana antar penegak hukum.

## 6. PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR.

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-16 Makassar bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 sejak pertama kali meluncurkan website resmi di alamat [www.dilmil-Makassar.go.id](http://www.dilmil-Makassar.go.id). Dalam website ini Pengadilan Militer III-16 Makassar menyajikan informasi yang berhubungan dengan Pengadilan Militer III-16 Makassar baik informasi yang bersifat teknis, non teknis maupun informasi umum lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-16 Makassar menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun dalam hal peningkatan bandwidth internet, sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/SEK/OT.01.1/5/2019 tanggal 1 Januari 2022 Pengadilan Militer III-16 Makassar menunjuk PT. Fibernet sebagai penyedia layanan.

Jumlah Server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-16



Makassar berjumlah 2 (dua) unit. 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019 untuk digunakan sebagai server pendukung e-court.

Adapun data alamat website Pengadilan Militer III-16 Makassar aktifasinya sebagai berikut:

Tabel IV. 12 Alamat Website Pengadilan Militer III-16 Makassar

No	Satker	Domain	Hosting Packages	Hosting Provider	Status
1.	Dilmil III-16 Makassar	www.dilmil-makassar.go.id/	-	Viber Net	Aktif

Tabel IV. 13 Perangkat Lunak Pengadilan Militer III-16 Makassar

No	Satker	Nama Aplikasi	Pembuat/Pengelola Aplikasi	Terpelihara	Ket
	Dilmil III-16 Makassar	Simak BMN	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
		SIMAN	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
		GPP Gaji	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
		OM- SPAN	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
		DIGIT	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
		SIMPONI	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
		E-Berpadu	Mahkamah Agung RI	Terpelihara	
		E-Prima	Mahkamah Agung RI	Terpelihara	
		E_Sadewa	Mahkamah Agung RI	Terpelihara	
		E-Court	Mahkamah Agung RI	Terpelihara	
		E- BIMA	Mahkamah Agung RI	Terpelihara	
		Sikep	Mahkamah Agung	Terpelihara	
		Komdanas	Mahkamah Agung	Terpelihara	
		Sipermari	Mahkamah Agung	Terpelihara	
		SIRATMIL	Ditjen badimiltun MARI	Terpelihara	
		SiRUP	LKPP	Terpelihara	
		SIPP	Mahkamah Agung	Terpelihara	
		SIMARI	Mahkamah Agung	Terpelihara	
		Sakti Web	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
		SatuDja	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
E-IPLANS	Mahkamah Agung RI	Terpelihara			
E-SPM	Mahkamah Agung RI	Terpelihara			

	Sprint	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
	E-Monev Bappenas	Bappenas	Terpelihara	
	E-Monev SMART	Kementerian Keuangan	Terpelihara	
	LHKPN	KPK	Terpelihara	
	LHASN	KPK	Terpelihara	
	E-LIHAT	Dilmil III-16 Makassar	Terpelihara	

#### a. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Juli 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 Juli 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- 1) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- 2) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- 3) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- 4) e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini tidak dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar mengingat perkara Tata Usaha Militer pada peradilan militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi.

#### b. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada

masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 26/KPM.W3Mil05/SK.TI1.1.1/II/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar di tahun 2024 adalah versi 5.6.4. Pembaruan versi ini sehubungan dengan adanya pengembangan aplikasi E-Berpadu versi 3.0.0 dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-16 Makassar menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 5.6.4.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 dapat dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 77.09%.

### **c. IMPLEMENTASI E-BERPADU**

E-Berpadu adalah kepanjangan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu. Aplikasi e-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan

pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi.

Dalam mendukung penggunaan Aplikasi e-BERPADU, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 tanggal 29 Juni 2012 tentang Implementasi Aplikasi E-Berpadu dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik di Pengadilan. Selanjutnya Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 49/KPM.W3.Mil05/SK.TI1.1.2/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Admin Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-BERPADU) pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

## **7. PENGADILAN MILITER III-17 MANADO**

### **a. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Militer**

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai mana telah diubah dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung RI membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi pencatatan dan penuluruhan perkara di pengadilan yaitu SIPP yang pada versi 5.6.4 sudah digunakan di 4 (empat lingkungan badan peradilan.

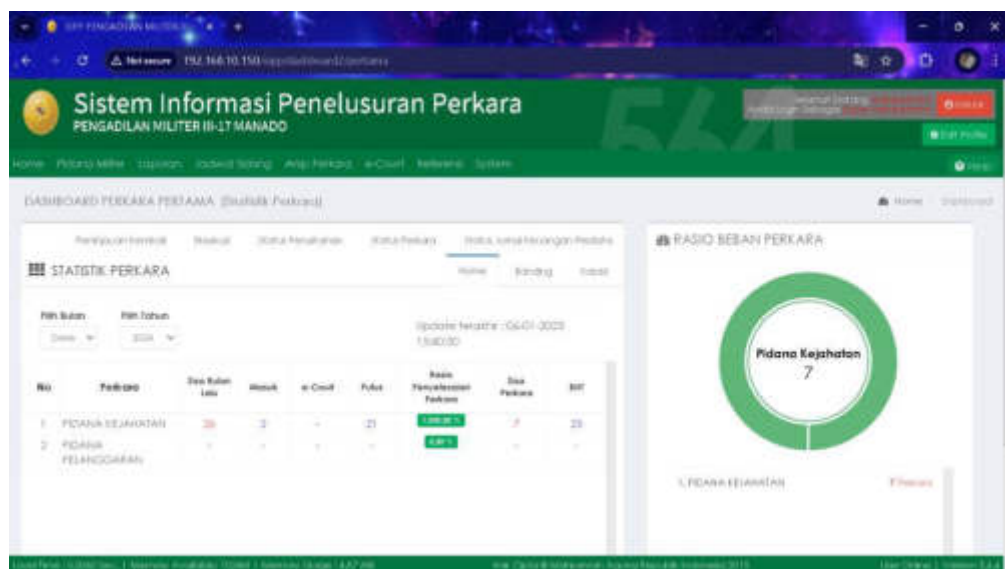
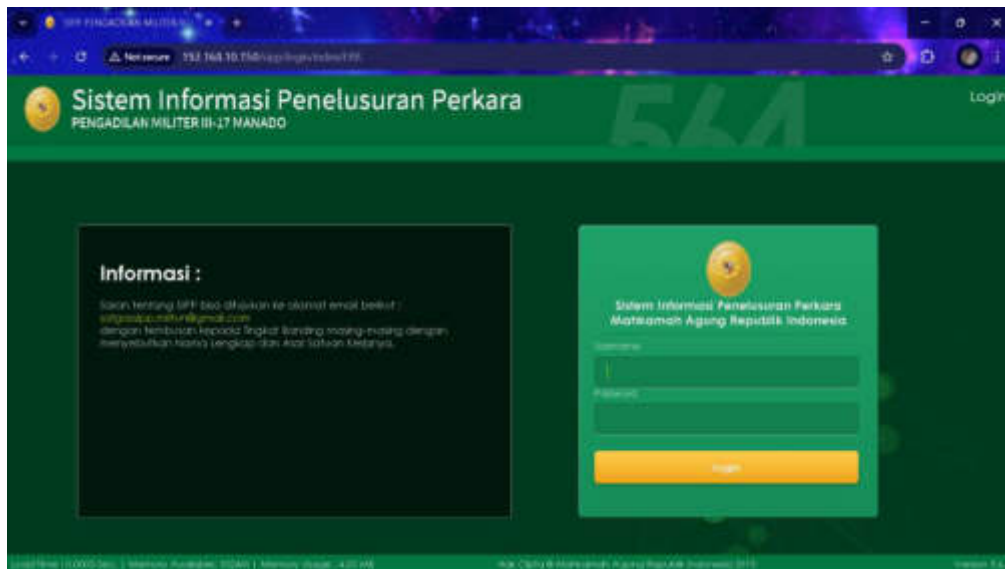
SIPP merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Penuluruhan Perkara. Aplikasi SIPP Manual Pengguna (User

Manual) Aplikasi Perangkat Lunak Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.6.4 di Pengadilan Militer Utama merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai web browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet. Contoh umum web-based aplikasi adalah Facebook, Google, dan Twitter. Dalam perkembangannya SIPP dimulai dengan versi 1 dimana hanya beberapa Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai percontohan.

Kemudian pada versi 2 SIPP diluncurkan dengan pembaharuan diantaranya jurnal keuangan perkara perdata, auto generate Template penetapan hakim, Berita Acara Persidangan dan pembaharuan fasilitas dan fungsi yang lainnya.

Kemudian pada versi 3 dimana Pengadilan Tinggi turut berperan serta dalam pencatatan perkara dengan diluncurkannya SIPP-PT. Pada versi 3 ini juga mencakup perbaikan-perbaikan pada versi SIPP untuk Pengadilan Negeri. Versi berikutnya dari SIPP adalah versi 3.1.1 dimana aplikasi SIPP untuk Pengadilan Negeri dibangun ulang menjadi SIPP untuk Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat mencakup 4 (empat) lingkungan peradilan. Versi selanjutnya 3.1.1 dari SIPP adalah versi 3.1.2. Versi paling akhir dari SIPP yang digunakan di Pengadilan Militer III-17 Manado adalah versi 3.3.0.1. Pada tahun 2020 SIPP yang digunakan Pengadilan Militer III-17 Manado mengalami dua kali update yaitu versi 4.0.0. kemudian diupdate pada bulan November 2020 dengan Versi 4.01 sampai dengan akhir tahun 2021.

Kemudian pada Tahun 2022 diupgrade kedalam versi 5.1.0 sampai dengan ditahun 2024 diupgrade kembali menjadi versi yang terbaru yaitu versi 5.6.4. Implementasi SIPP di Pengadilan Militer III-17 Manado sampai dengan akhir Tahun 2024 sudah mencapai 100%.



## 8. PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

Penerapan pengelolaan teknologi informasi merupakan kebutuhan di setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan public mengingat peran teknologi informasi yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya termasuk Pengadilan Militer III-18 Ambon. Adapun proses peradilan yang transparan merupakan salah satu

syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-18 Ambon bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsisten, ketepatan dan keandalan.

Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

#### **a. Implementasi e-Court**

Berdasarkan Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI, yang dimaksud *e-Court* adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, *e-Court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. *e-Court* merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya



asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam *e-court* antara lain :

- 1) *e-Filing* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)
- 2) *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara *Online*)
- 3) *e-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara *Online*)
- 4) *e-Litigation* (Persidangan secara *Online*).

Dari beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi *e-court* ini, masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-18 Ambon, hal ini dikarenakan :

- 1) Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak melalui proses pendaftaran, tetapi melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer IV-19 Ambon.
- 2) Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah perkara pidana dan perkara pelanggaran. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa/Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-18 Ambon juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.
- 3) Pemanggilan pihak bukan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, namun kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.

#### **b. Implementasi SIPP**

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia membangun sebuah system Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan web based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajahan web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan internet atau intranet.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis Web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim. SIPP dibangun sebagai



media kerja yang efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah.

Terkait dengan pelayanan public kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI me,luncurkan program layanan informasi “One Day Publish”. Program “One Day Publish” adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya Satker yang dibawah Mahkamah Agung RI yang telah mengimplemengtasikan SIPP, dituntut untuk memberikan pelayanan public berupa “One Day One Publish”.

“One Day One Publish” merupakan maklumat pelayanan kepada public bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon di akhir tahun 2024 adalah versi 5.6.4. Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang ada di SIRATMIL yaitu Versi 3.0.3.

### c. **Dukungan Aplikasi**

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas, Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi tersebut didapat dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MARI dan Kementerian Keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional, sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh pegawai dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilmiltun MARI yang digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diantaranya adalah:

- 1) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi dibidang perkara.
- 2) Monitoring Implementasi SIPP(MIS)
- 3) Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-BERPADU) yaitu aplikasi dibidang perkara.

- 4) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang kepegawaian.
- 5) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), yaitu aplikasi di bidang administrasi.
- 6) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi dibidang keuangan.
- 7) Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- 8) Sistem Aplikasi Satker (SAS)
- 9) *Electronic Integrated Planning System* (E-IPLANS) yaitu aplikasi dibidang keuangan.

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

- 1) Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data (PAPEDA), yaitu aplikasi virtual yang melayani informasi dibidang, Kesekretariatan melayani informasi tentang organisasi, dibidang Kepaniteraan melayani informasi tentang perkara, dibidang pengaduan melayani informasi tentang pengaduan dan dibidang pelayanan informasi tentang profil dan layanan lainnya.
- 2) Elektronok Pemusatan Data Informasi Monitoring Cuti dan Kinerja (E-PATTIMURA), yaitu aplikasi yang digunakan untuk monitoring, pengajuan cuti pegawai dan capaian kinerja.

#### **d. Dukungan Jaringan, Internet dan Server**

Jaringan computer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan jaringan LAN (*Local Area Connection*) dengan sistem client-server. Desain jaringan ini memungkinkan antar computer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun Server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima pada bulan Desember 2019 sebagai server pendukung *e-court*.

Tabel 4. 5 Data Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur Jaringan		
Jaringan internet	Total bandwidth	20 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	Koneksi LAN	Jaringan local antar ruang

## 9. PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA.

### a. Implementasi *e-court*

**e-court** adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar / Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- 1) e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- 2) e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- 3) e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- 4) e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer III-19 Jayapura belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga akan digunakan untuk perkara pidana.

### b. Implementasi SIPP

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, **Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern**, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-19 Jayapura mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Seluruh informasi perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat di akses oleh publik secara gratis, di tahun 2023 ini

Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah menerapkan aplikasi SIPP Versi **5.3.1** Dasar dibentuknya SIPP adalah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, Surat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMASSK/I/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK / II / 2012 tentang standart Pelayanan pengadilan.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-19 Jayapura meliputi :

1) Komputer Server dengan spesifikasi :

- a) Merk : LENOVO X 3250 M5 AC 1
- b) CPU : Intel Xeon E3-1200 V3
- c) Memory : 8 Gb
- d) Hard Disk : 500 Gb
- e) OS : Linux centos

2) Router

- a) Merk : Mikrotik Router Board 1100AHX2
- b) CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
- c) Main Storage: 64 MB
- d) RAM : 1,5 Gb
- e) LAN Port : 13 Port
- f) OS : RouterOS

Perangkat pendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Militer III-19 Jayapura

1) Komputer PTSP

- a) Merk : HP AIO ProOne 600 G5
- b) CPU : Intel Core i5
- c) RAM : 4GB
- d) Hard Disk : 1TB
- e) OS : Windows 10

2) Kiosk Touchscreen

- a) Merk : Vestouch
- b) OS : Android
- c) Display : 21,5 inch

Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau diatasnya.

Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan alamat [sipp.dilmil-jayapura.go.id](http://sipp.dilmil-jayapura.go.id) juga dilakukan sinkronisasi setiap hari sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

*One Day One Publish* merupakan bentuk pelayanan kepada publik, dalam hal ini khususnya terhadap pencari keadilan, dimana Pengadilan militer III-19 Jayapura mempublikasikan Informasi perkara maksimal 1 (satu) hari setelah perkara tersebut diputus. Akan tetapi Pengadilan Militer III-19 Jayapura saat ini terus berupaya melaksanakan Pelayanan *Same day Publish*, yaitu mempublikasikan pada hari yang sama pada saat perkara tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi 411 telah terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan.



# BAB V

## PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

### A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Sesuai peraturan Menpan dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah, Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan ZI di Pengadilan Militer pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 2017. Berikut ini adalah daftar Pengadilan Militer di jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas, yaitu :

No	Satker	Predikat		Foto Sertifikat
		WBK	WBBM	
1	Dilmilti III Surabaya	10 /12/ 2019	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	
2	Dilmil III-12 Surabaya	10 /12/ 2019	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	

3	Dilmil III-13 Madiun	10 /12/ 2018	-	<p>WBK</p> 
			18 /12/ 2020	<p>WBBM</p> 
4	Dilmil III-14 Denpasar	Diusul kan tahun 2023 (Gagal)	-	-
5	Dilmil III-15 Kupang	Diusul kan tahun 2023 (Gagal)	-	-
6	Dilmil III-16 Makassar	Tidak Mengusulk an di tahun 2023	-	-

7	Dilmil III-17 Manado	21 Desember 2020	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	
8	Dilmil III-18 Ambon	20 Desember 2021	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	
9	Dilmil III-19 Jayapura	Diusulkan tahun 2023 (Gagal)	-	-

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)


Merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Kalsifikasi Surat Mahkamah Agung RI serta Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Nomor 460/DjMT/Kep/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar




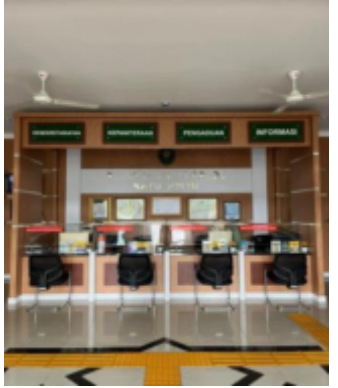


Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, anti korupsi, kolusi, PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Melalui Meja PTSP ini, pencari Keadilan cukup datang kemeja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh Pegawai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan bekerja dan melayaninya.

*Gambar Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

No	Satker	Pembangunan PTSP (Tahun)/ Prestasi	SK Tim PTSP	Foto PTSP
1	Dilmilti III Surabaya	2018 dan direnovasi tahun 2022 dengan DIPA TA 2022	Surat Keputusan Kadilmilti III Surabaya Nomor W3.Mil/09/PS.02/V III/2022 tanggal 10 Agustus 2022	

2	Dilmil III-12 Surabaya	2018	Surat Keputusan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/13/KEP/II/2023 tanggal 2 Februari 2023	
3	Dilmil III-13 Madiun	<p>2018 dan direnovasi tahun 2021 dengan DIPA TA 2021/</p> <p>Juara III perlombaan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Militer (2018)</p>	Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/62/Sprin/I/2022 tanggal 21 Januari 2022	
4	Dilmil III-14 Denpasar	2018	Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3-Mil03/25/SK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023	
5	Dilmil III-15 Kupang	<p>2018 dan direnovasi tahun 2019 dengan DIPA TA 2019/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan dari Kemenpan RB Tahun 2022 sebagai Lembaga dalam lingkungan Peradilan yang melaksanakan <b>“Pelayanan Prima”</b></li> <li>- Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTT dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Yudikatif sebagai Badan Publik</li> </ul>	Surat Keputusan Kadilmil III-15 Kupang Nomor W3-Mil04/20/Skep/I/2022 tanggal 10 Januari 2022	

		dengan Predikat "Cukup Informatif".		
6	Dilmil III-16 Makassar	2019	Surat Keputusan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: W3.Mil05 /70/KEP/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023	
7	Dilmil III-17 Manado	2018	Surat Keputusan Kadilmil III-17 Manado Nomor W3.Mil06/88a/OT.0 0/I/2022 W3.Mil06/89a/OT.0 0/I/2022 W3.Mil06/90a/OT.0 0/I/2022 W3.Mil06/91a/OT.0 0/I/2022 Tanggal 27 Januari 2022	
8	Dilmil III-18 Ambon	2018	Surat Keputusan Kadilmil III-18 Ambon Nomor W3.Mil07/59/ Skep/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022	
9	Dilmil III-19 Jayapura	2018	Surat Perintah Kadilmil III-19 Jayapura Nomor W3- Mil.08/SK/06/1/ 2022 tanggal 4 Januari 2022	

### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

#### 1. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Pelayanan publik secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak

penyelenggara pelayanan Publik maupun masyarakat. Inovasi pelayanan Publik di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang asas-asas pelayanan Publik, menjelaskan bahwa salah satu asas pelayanan Publik adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan Publik sebagaimana amanat dari undang-undang pelayanan Publik memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan antara lain perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Dalam rangka memberikan pelayanan bagi kaum penyandang disabilitas agar terwujud pelayanan inklusif, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menyediakan sarana dan prasarana khusus disabilitas. Di tahun 2024 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membangun dan menjalankan tiga inovasi baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta 3 inovasi pada tahun 2024 yang diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. Ketiga inovasi tersebut yaitu:

**a. Inovasi *WhatsApp Bot* Pelayanan Publik**

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta praktek kerja mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya atas nama Dani Fauzan Al Faruq. Inovasi ini dilaksanakan sebagai alat yang inovatif untuk memberikan informasi dan pelayanan publik yang ada pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kepada masyarakat secara lebih efisien, cepat dan akurat. *WhatsApp Bot* pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebuah aplikasi berbasis *Node.js* yang dirancang untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat melalui platform pesan instan *WhatsApp*. Berikut adalah gambaran singkat tentang *WhatsApp Bot* ini:

- 1) **Informasi Umum:** *WhatsApp Bot* ini memberikan informasi umum tentang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, seperti alamat, jam operasional, nomor telepon, dan layanan yang tersedia.
- 2) **Informasi Kasus:** Masyarakat dapat menggunakan *WhatsApp Bot* ini untuk memeriksa status perkara hukum tertentu. Mereka dapat memasukkan nomor perkara dan mendapatkan informasi tentang jadwal sidang, status perkara, dan perkembangan terkini.
- 3) **Pengaduan dan Umpan Balik:** *Bot* ini juga menerima pengaduan dan umpan balik dari masyarakat terkait pelayanan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pengguna dapat mengirim pesan terkait keluhan atau saran,

dan bot akan mengarahkannya kepada departemen yang bersangkutan.

4) **Penghitungan Pengunjung:**

*Bot* juga mencatat jumlah pengunjung dan pengunjung yang baru bergabung.

5) **Survey Kepuasan Masyarakat:**

*Bot* mengirimkan pesan yang mengarahkan pengguna untuk mengisi survei kepuasan masyarakat tentang pelayanan publik.

6) **Penanganan Pesan Tidak Dikenali :**

Jika pengguna mengirimkan pesan yang tidak dikenali, *bot* akan memberikan pesan selamat datang dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

Penggunaan *WhatsApp Bot* pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau kepada masyarakat. Hal ini juga membantu mengurangi beban pekerjaan staf pengadilan dalam memberikan informasi yang sifatnya rutin dan dapat diotomatisasi. Selain itu, *bot* ini meningkatkan aksesibilitas pelayanan hukum, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi kapan saja melalui platform yang sudah sangat umum digunakan, yaitu *WhatsApp*.

**b. Inovasi Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Web**

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta praktek kerja mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya atas nama Okky Dwita Lorenza. Inovasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan manajemen data perpustakaan dan memberikan akses informasi yang lebih baik kepada pengguna serta memungkinkan pencarian informasi yang cepat dan akurat. Website ini dapat menjadi sarana yang memungkinkan para pihak terkait, termasuk hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya, untuk dengan mudah mengakses informasi hukum yang relevan. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi pencarian, peminjaman, dan manajemen koleksi buku.

**c. Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Digital**

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta praktek kerja mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya atas nama Yoga Adi Pratama. Inovasi ini dirancang untuk mendukung fungsi-fungsi kritis, termasuk manajemen buku, pencarian, dan fitur peminjaman. Dengan menerapkan sistem informasi perpustakaan berbasis *web* pada Pengadilan Militer Tinggi III

Surabaya, diharapkan dapat mengoptimalkan proses-proses di dalam perpustakaan, meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pencarian informasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan koleksi.

Pengembangan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis *web* di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap:

1) Efisiensi Pencarian Informasi:

Membantu pengguna untuk dengan cepat dan efisien menemukan buku atau informasi yang mereka butuhkan melalui fitur pencarian yang lebih canggih.

2) Layanan Sirkulasi yang Lebih Baik:

Mengotomatisasi proses sirkulasi buku, peminjaman, dan pengembalian untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan layanan.

3) Pembuatan Laporan yang Cepat dan Akurat:

Memudahkan petugas perpustakaan dalam menyusun laporan mengenai peminjaman, pengembalian, dan keadaan stok buku secara *real-time*.

4) Peningkatan Keakuratan Data:

Mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan data perpustakaan, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

5) Peningkatan Aksesibilitas:

Memberikan akses yang lebih mudah bagi pengguna untuk memanfaatkan koleksi perpustakaan dari berbagai lokasi dan perangkat.

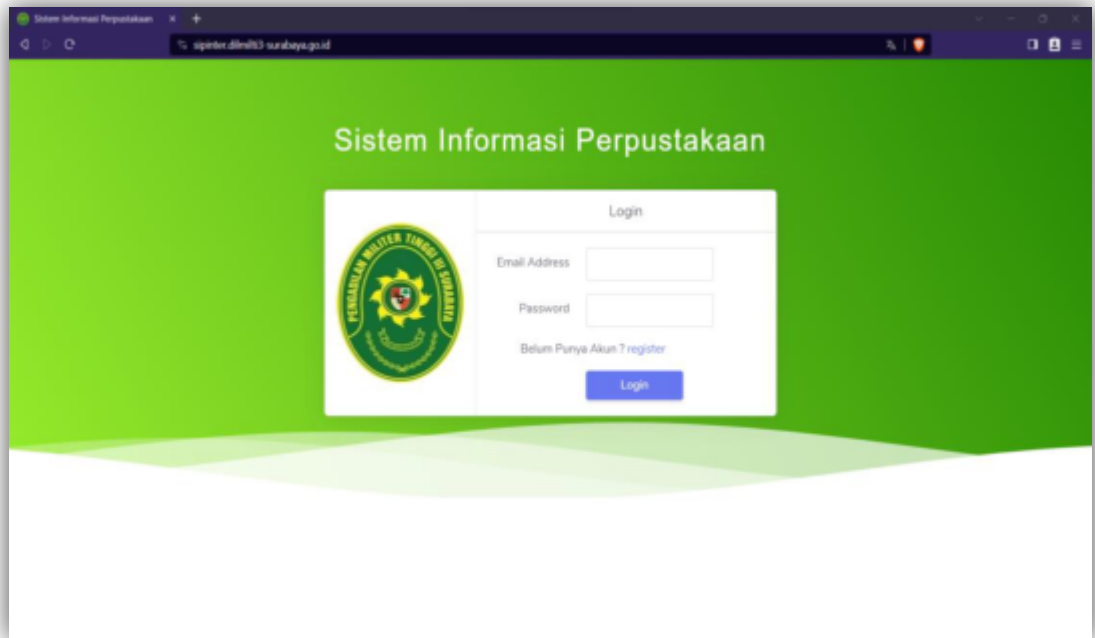
Melalui penerapan sistem informasi perpustakaan digital ini, diharapkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi perpustakaan, mempercepat proses pencarian buku, memberikan layanan sirkulasi yang lebih baik, dan menyediakan laporan yang cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pengelolaan koleksi literatur.

Berikut ini tampilan dari Sistem Informasi Perpustakaan *Digital* pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya :

1) **Halaman Login**

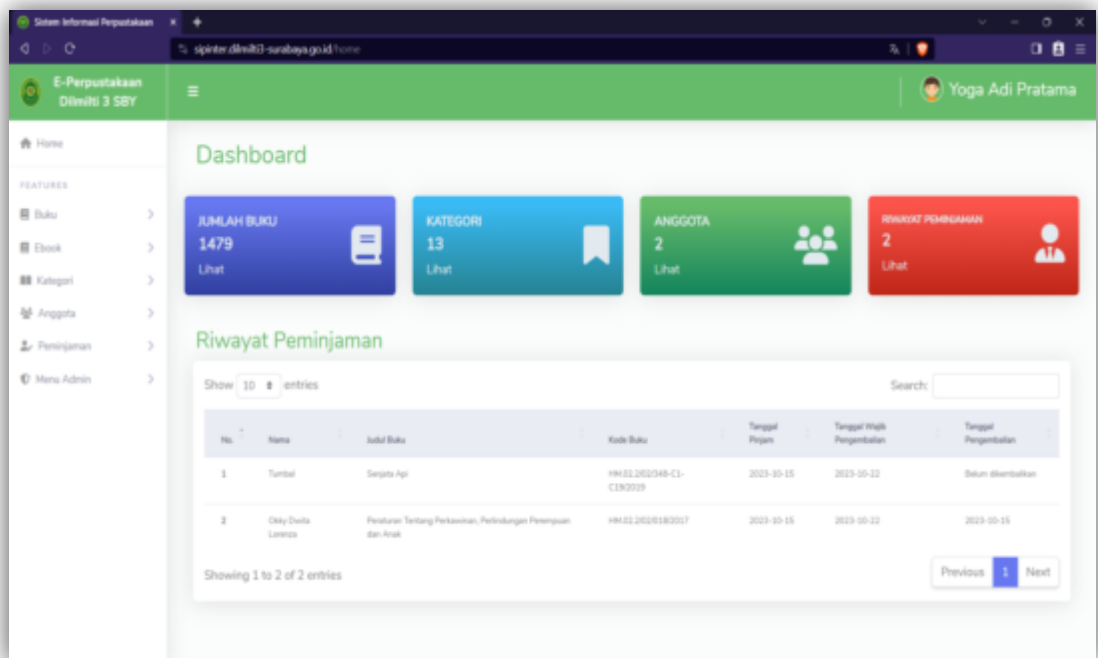
Halaman *login* merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika *project* dijalankan yang dapat diakses.





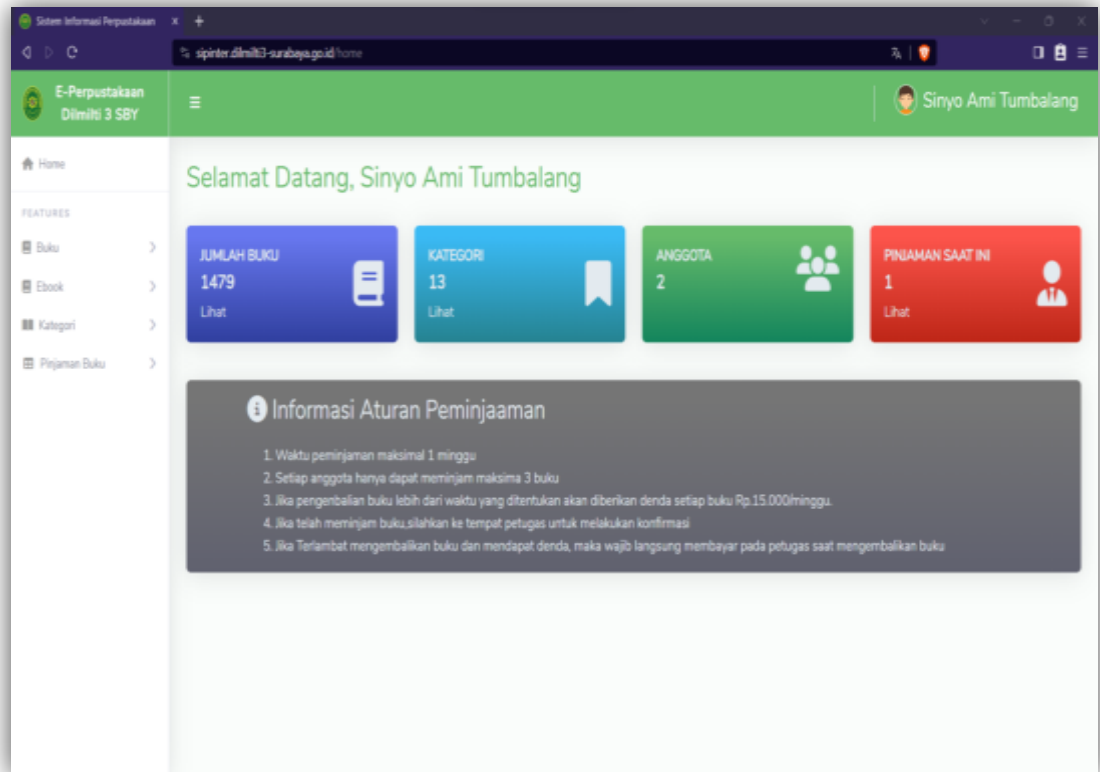
## 2) Halaman *Home* ( *Admin* )

Halaman utama merupakan *interface* awal setelah *Admin* melakukan *login*. Halaman ini berfungsi untuk pengelolaan sistem informasi perpustakaan, baik itu untuk mengolah data buku, data anggota maupun transaksi yang terdiri dari peminjaman dan pengembalian.



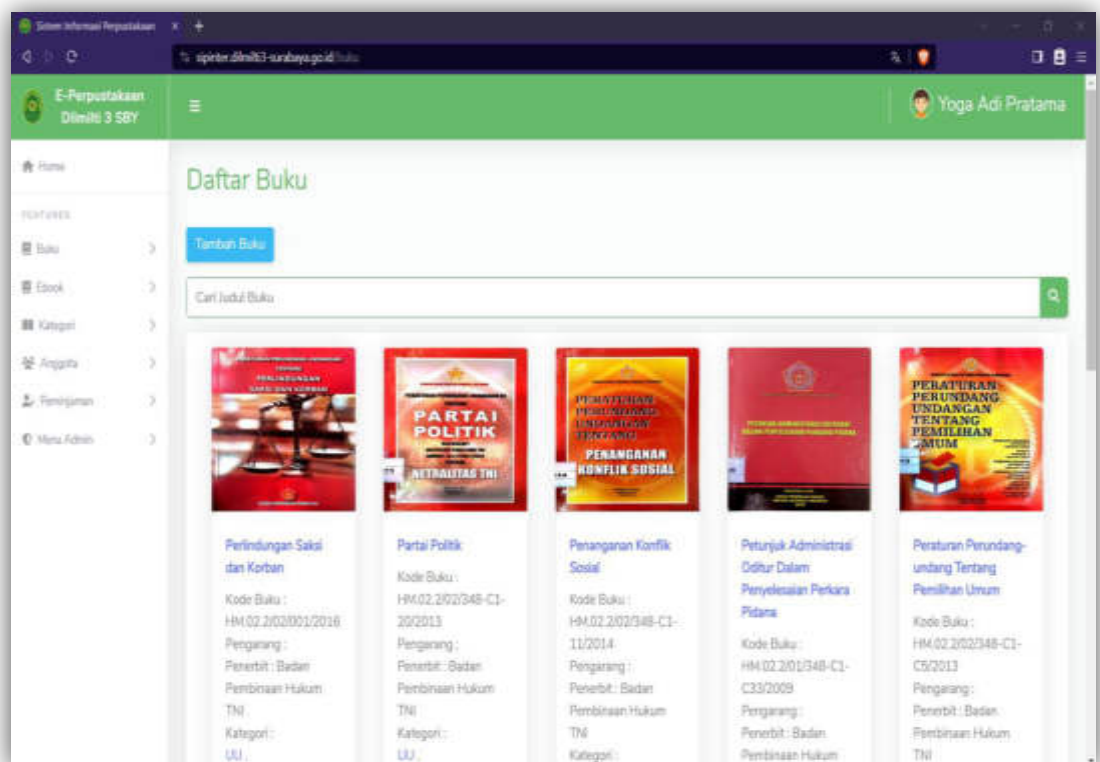
## 3) Halaman *Home* ( *Anggota* )

Halaman utama merupakan *interface* awal setelah Anggota melakukan *login*.



#### 4) Halaman Buku ( Admin dan Anggota )

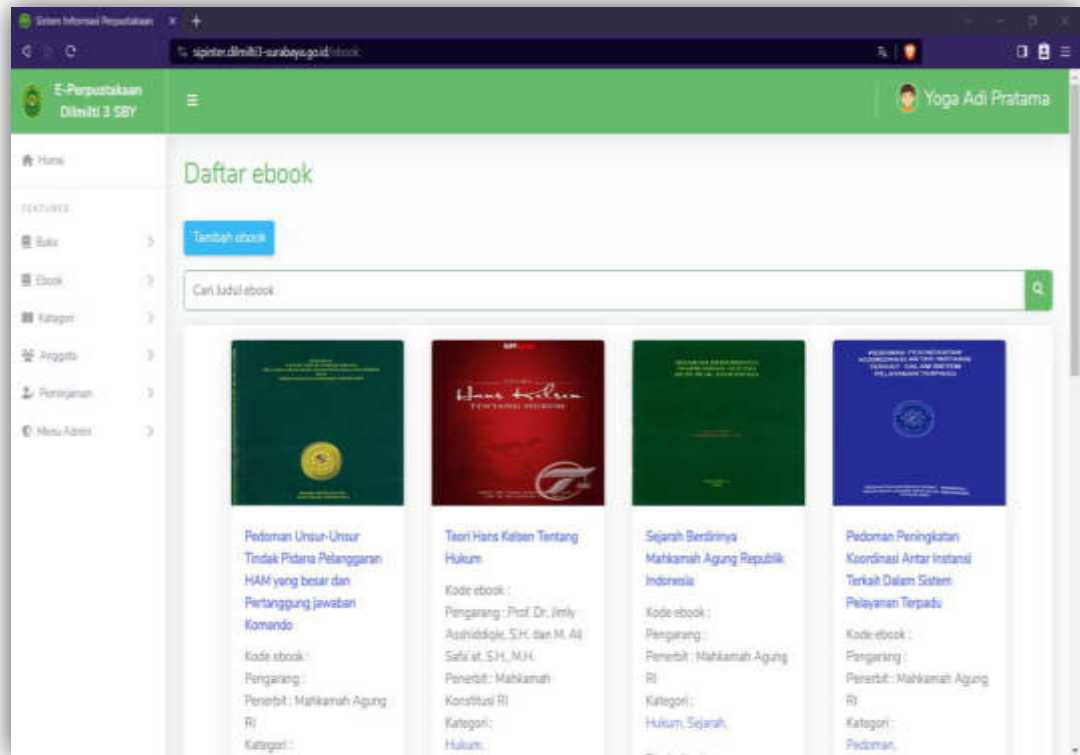
Pada tampilan menu data buku ini, *admin* bisa mencari data buku sesuai dengan kategori buku.



#### 5) Halaman Ebook ( Admin dan Anggota )

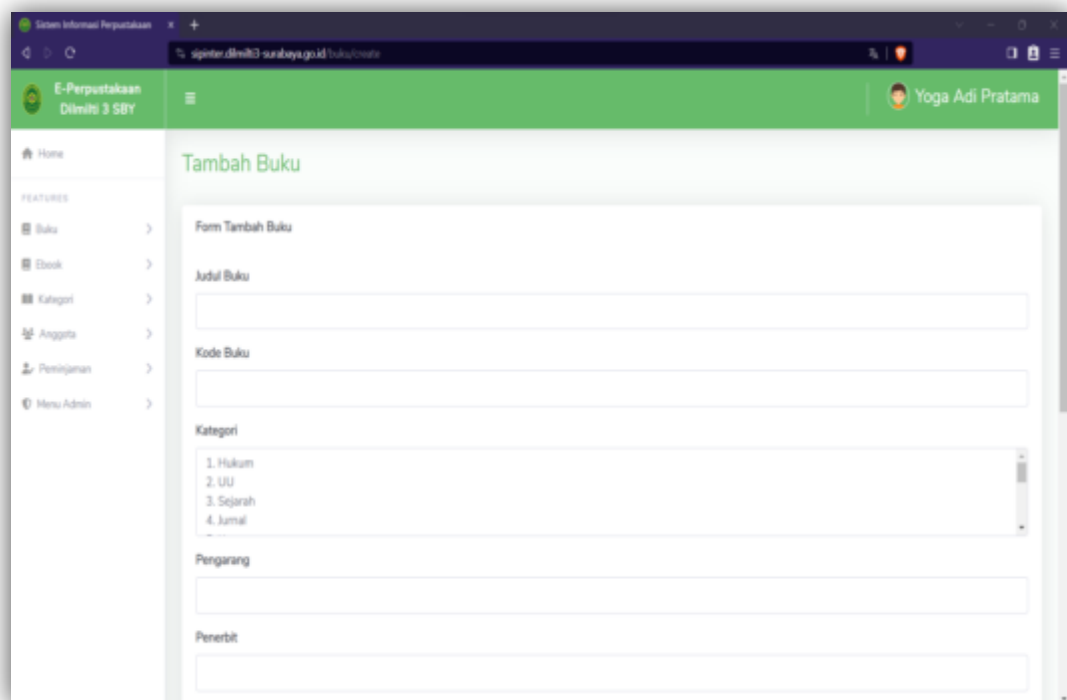
Pada tampilan menu data Ebook ini, admin bisa mencari data buku sesuai dengan kategori Ebook.





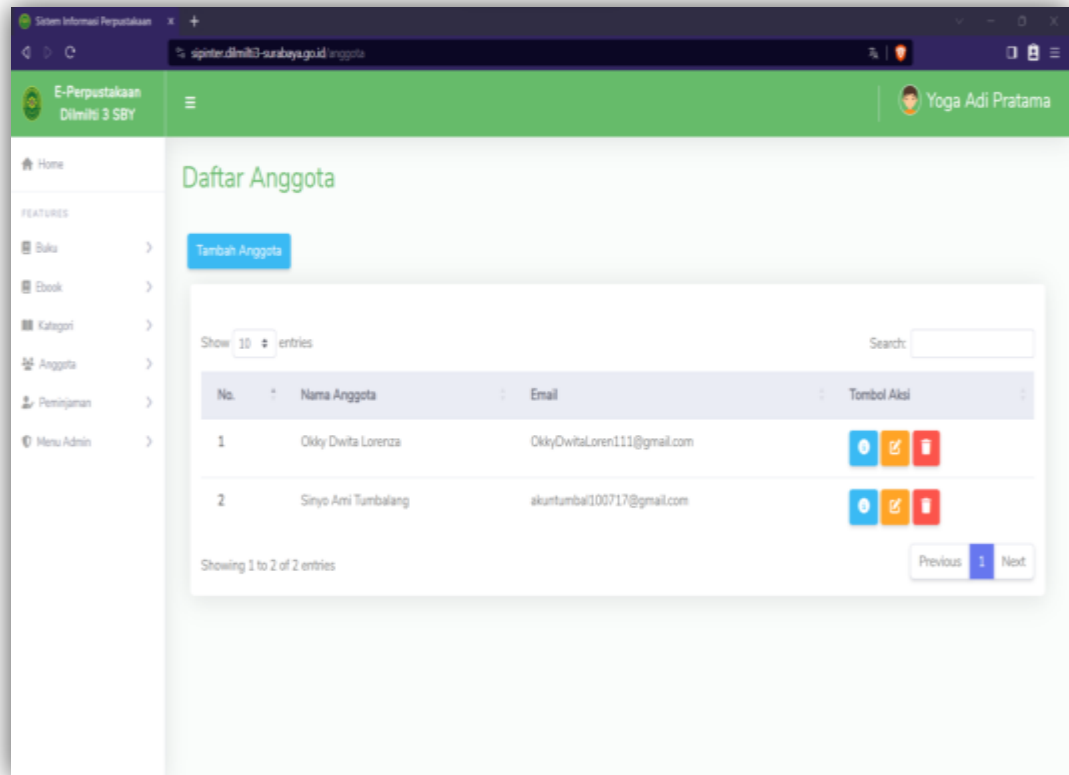
## 6) Halaman Olah Buku atau Ebook ( Admin )

Menu mengolah data buku atau ebook yang ada di perpustakaan dengan fitur menambah, mengedit data buku.



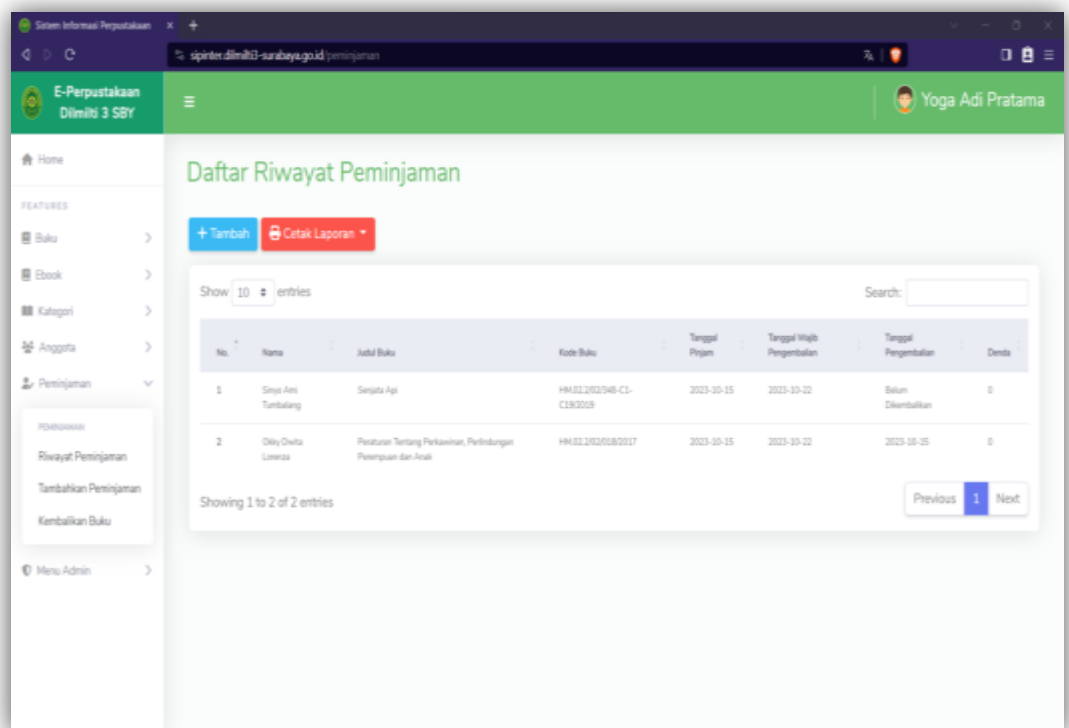
## 7) Halaman Anggota ( Admin )

Pada menu data anggota, admin dapat melihat seluruh data Anggota yang sudah terdaftar menjadi anggota perpustakaan.



### 8) Halaman Riwayat Peminjaman ( Admin )

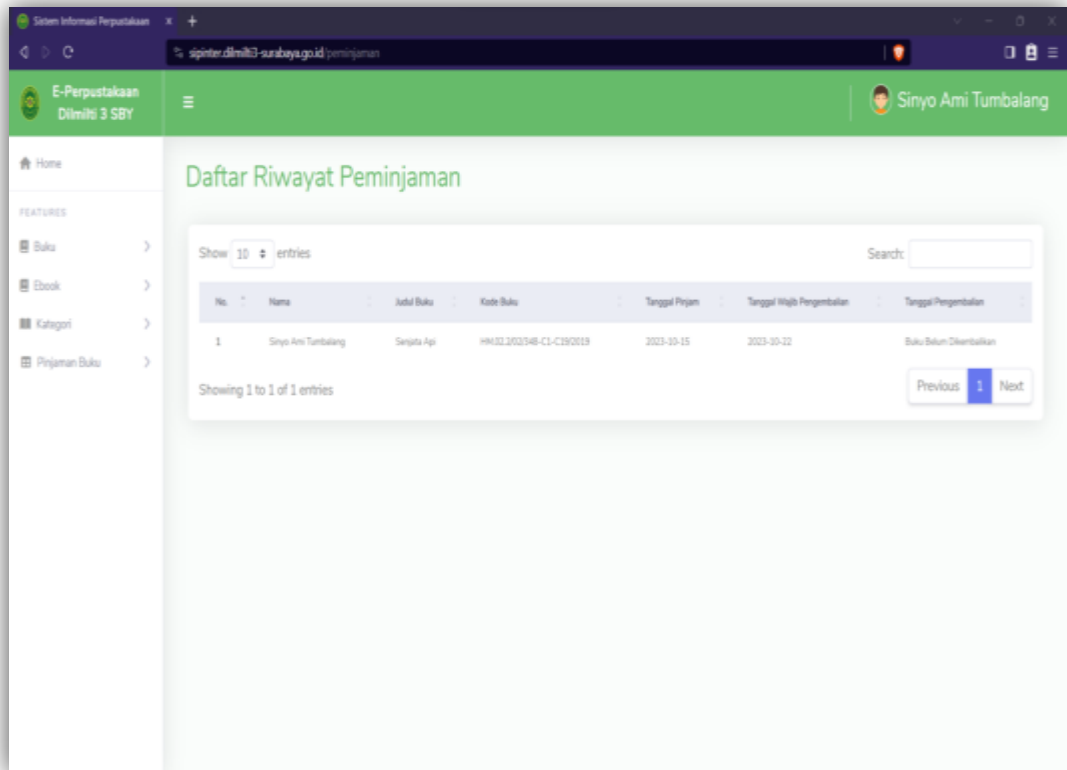
Pada menu riwayat peminjaman, admin dapat melihat seluruh data peminjaman yang sudah tersimpan.



### 9) Halaman Riwayat Peminjaman ( Anggota )

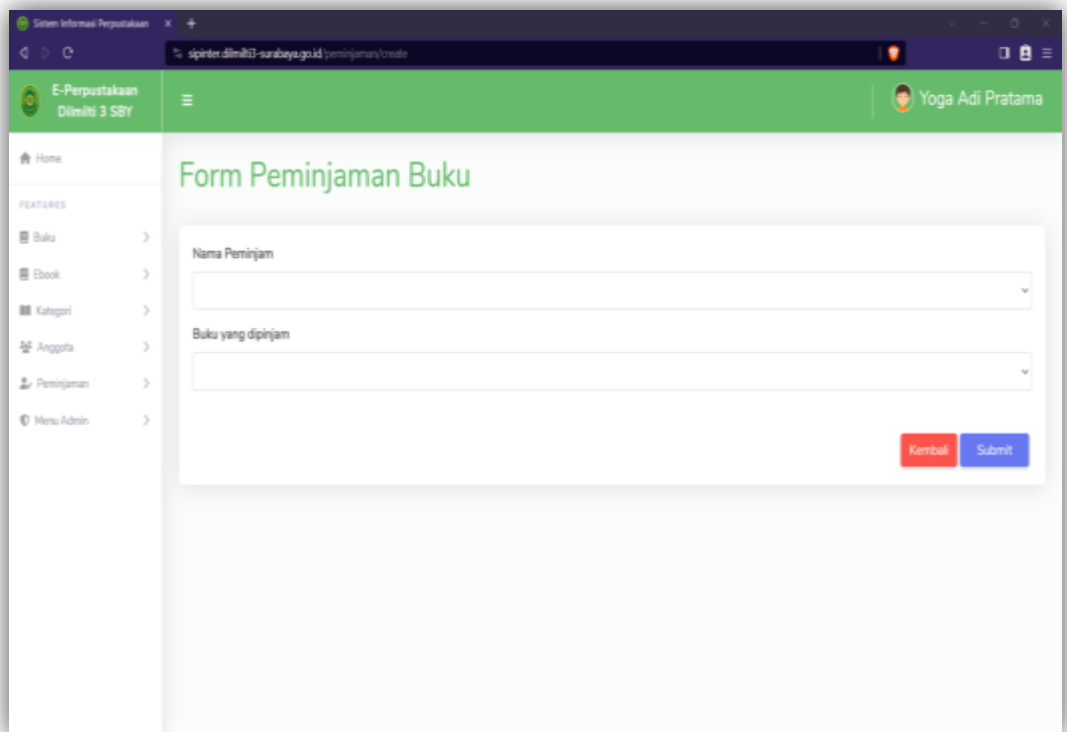
Pada menu riwayat peminjaman , Anggota dapat melihat seluruh data

peminjaman yang sudah tersimpan.



#### 10) Halaman Tambah Peminjaman Buku ( Admin )

Menu Tambah Peminjaman digunakan untuk melakukan transaksi peminjaman Buku oleh Anggota yang dioperasikan oleh Admin.



#### 11) Halaman Pengembalian Buku ( Admin )

Menu pengembalian digunakan untuk transaksi pengembalian buku. Pada menu ini jika anggota mengembalikan buku lebih dari 7 hari setelah

peminjaman, maka sistem dapat menghitung denda secara otomatis.

No.	Nama	Judul Buku	Kode Buku	Tanggal Pinjam	Tanggal Wajib Pengembalian	Tanggal Pengembalian
1	Smpu Amn Tambalang	Sergata Api	HM.02.2023048-C3-C29/2019	2023-10-15	2023-10-22	Belum Dikembalikan
2	Diky Dvita Lorenza	Peraturan Tentang Perkawinan, Perhubungan Perempuan dan Anak	HM.02.2023039/2017	2023-10-15	2023-10-22	2023-10-15

Form Pengembalian Buku

Nama Peminjam

Buku yang akan dipinjam

Kembali Submit

#### d. Inovasi *Standard Operational Procedure (SOP)* Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Kaum Penyandang Disabilitas.

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta pelatihan dasar atas nama CPNS Afni Syafaatun, S.A.P. Inovasi ini dilaksanakan khusus pada bagian PTSP di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra. Adapun inovasi yang dilaksanakan berupa :

- 1) Pembuatan *Standard Operational Procedure (SOP)* Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi kaum penyandang disabilitas di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan nomor : W3.Mil/20/SOP.01/IV/2022.

 PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA J. Raya H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283 Telp. (031) 867193 Email : milti3surabaya@ditmiliti.org	No. S.P. : 01/2024 No. Perencanaan : 01/2024 No. Revisi : 01/2024 No. Perubahan : 01/2024
	Tanggal dan Tempat : Surabaya, 27 April 2024 Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya  Dipukul : Jamadil 1444
ASSALAMU ALAIKAM WA'ALAYHI WASSALAM DAN PEHAMATNYA AMIN	
Dasar Hukum : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentara Nasional Indonesia 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tentara Nasional Indonesia 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perang 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Asas-asas Organisasi dan Tata Kerja 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 16 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 17 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 19 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 20 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 22 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 23 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 24 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 25 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 26 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 27 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 28 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 30 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 31 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 33 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 34 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 36 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 37 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 38 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 39 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 40 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 41 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 42 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 43 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 45 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 46 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 48 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 50 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 51 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 52 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 53 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 54 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 55 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 56 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 57 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 58 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 59 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 60 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 61 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 62 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 63 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 64 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 65 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 66 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 67 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 68 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 69 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 70 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 71 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 72 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 73 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 74 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 75 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 76 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 77 Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 78 Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 79 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 80 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 81 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 82 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 83 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 84 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 85 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 86 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 87 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 88 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah 90 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah	Ketentuan pelaksanaan : 1. 04 2. 05 3. 06/04/2024 Mekanisme : 1. 4.4. Dalam manajemen maka dari proses-proses 2. 7.1.3. Informasi 3. 7.1.4. Kegiatan yang dilaksanakan secara 4. 7.2.2. Menerima dan menerima informasi 5. 7.2.3. Pengiriman informasi dan komunikasi Pelaksanaan/berlangsung : 1. Komando 2. Perintah 3. Hal-hal teknis (KTI) 4. Dokumen Pelaksanaan (Pembuat Perencanaan, Sumber, Pelaksanaan, dan Laporan) (KTI) 5. Buku Pengantar (KTI) dan Laporan (KTI) 6. 01/04/2024 Penutupan dan penandatanganan : Dokumen Terikat


**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**  
 J. Raya H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283  
 Telp. (031) 867193  
 Website : www.ditmil3-surabaya.go.id  
 Email : milti3surabaya@ditmiliti.org

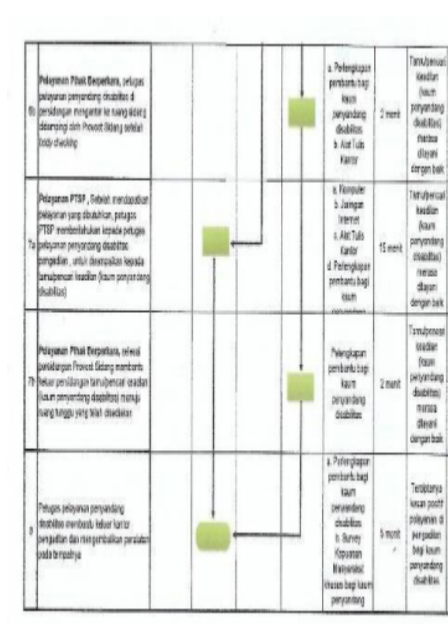


**STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS**  
**DI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**


**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**  
 J. Raya H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283  
 Telp. (031) 867193  
 Website : www.ditmil3-surabaya.go.id  
 Email : milti3surabaya@ditmiliti.org

**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**  
**S.O.P. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS**  
**DI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

Dibuat Oleh :	 <b>AFNI SYAFAATUN, S.A.P.</b> NIP. 19960918 202002 2 005
Diperiksa Oleh :	 <b>Dr. KOERNAWATY SJARIEF, S.H., M.H.</b> KOLONEL LAUT (K4W) NRP 13712P
Disahkan Oleh :	 <b>KIRTO, S.H., M.H.</b> BRIGADIR JENDERAL TNI




**PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**  
 J. Raya H. Juanda No.87 Gedangan - Sidoarjo 61283  
 Telp. (031) 867193  
 Website : www.ditmil3-surabaya.go.id  
 Email : milti3surabaya@ditmiliti.org

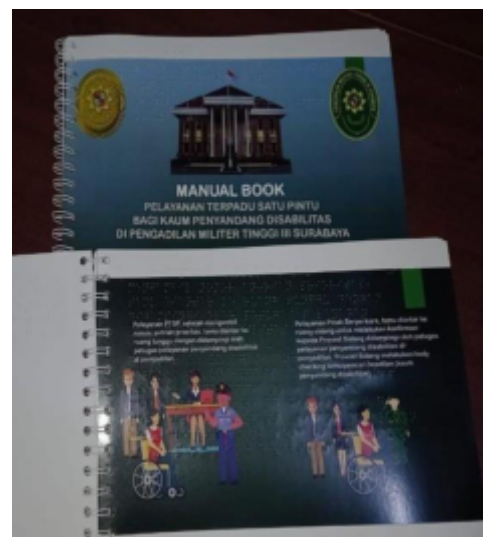
**LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**  
**S.O.P. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BAGI KAUM PENYANDANG DISABILITAS**  
**DI PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA**

Dibuat Oleh :	 <b>AFNI SYAFAATUN, S.A.P.</b> NIP. 19960918 202002 2 005
Diperiksa Oleh :	 <b>Dr. KOERNAWATY SJARIEF, S.H., M.H.</b> KOLONEL LAUT (K4W) NRP 13712P
Disahkan Oleh :	 <b>KIRTO, S.H., M.H.</b> BRIGADIR JENDERAL TNI

- 2) Buku pengunjung/tamu pengadilan dan kartu antrian prioritas khusus kaum penyandang disabilitas di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



- 3) *Manual book* Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Kaum Penyandang Disabilitas dalam bentuk *braille* di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



- 4) Penayangan video alur Pelayanan Terpadu Satu Pintu bagi Kaum Penyandang Disabilitas di TV Plasma/Layar monitor ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.





**e. Inovasi Digitalisasi Pelayanan Perkara bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta pelatihan dasar atas nama CPNS Nila Rukhama, A.Md. Inovasi ini dilaksanakan khusus pada bagian pelayanan perkara di PTSP kepaniteraan dan pelayanan perkara di persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Adapun inovasi yang dilaksanakan berupa :

- 1) Brosur di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentang prosedur pelayanan prioritas PTSP Kepaniteraan dan prosedur pelayanan prioritas persidangan



- 2) Standing banner di depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentang prosedur pelayanan prioritas PTSP Kepaniteraan.



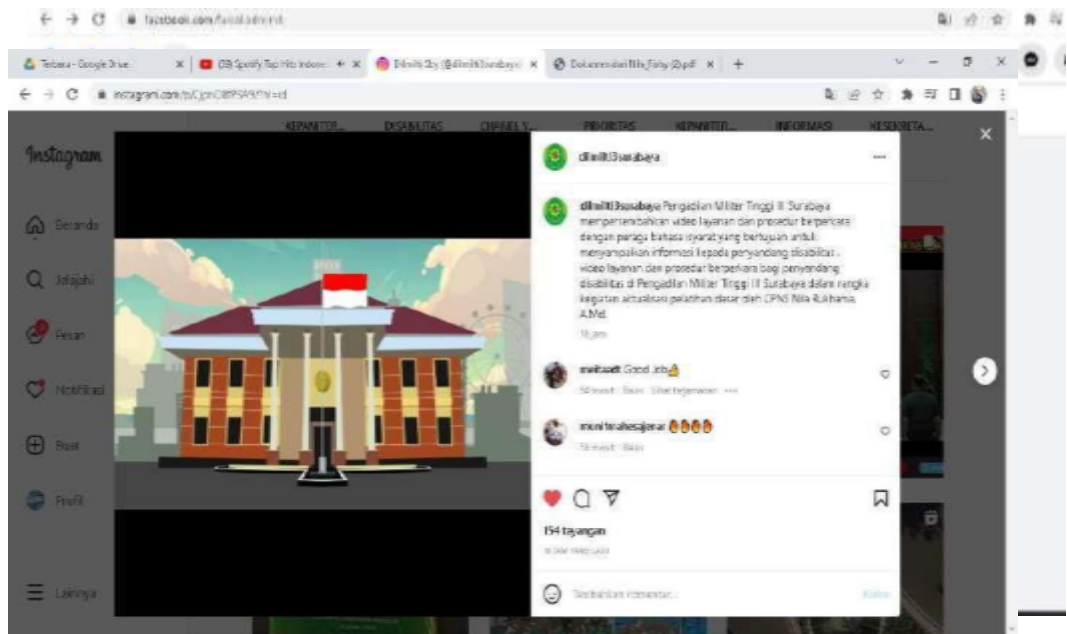
- 3) Standing banner di depan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentang prosedur pelayanan prioritas Persidangan.



- 4) Publikasi Video Pelayanan Perkara dengan peraga Bahasa isyarat Bagi penyandang disabilitas di Youtube, Website, Instagram, Facebook Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

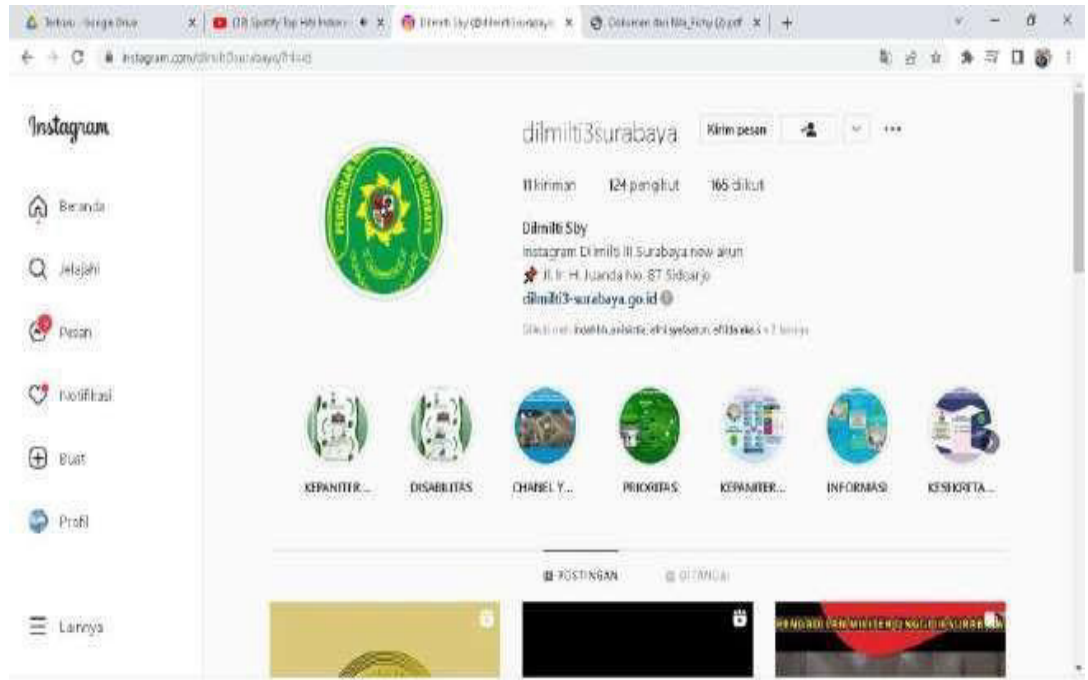






5) Publikasi Brosur dan Standing Banner Pelayanan Perkara dengan peraga Bahasa isyarat Bagi penyandang disabilitas di Instagram dan Facebook Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.





6) Penayangan video Pelayanan Perkara dengan peraga Bahasa isyarat Bagi penyandang disabilitas di TV Plasma / Layar monitor ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



**f. Inovasi Penambahan Fitur Ramah Kelompok Rentan Pada Website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya**

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta pelatihan dasar atas nama CPNS Afrida Eka Sabilla, A.Md.A.B. Inovasi ini dilakukan pada *Website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya* dan diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra. Adapun inovasi yang dilaksanakan berupa :

- 1) Penambahan fitur suara, saturasi, dan perbesar font bagi kelompok rentan pada website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

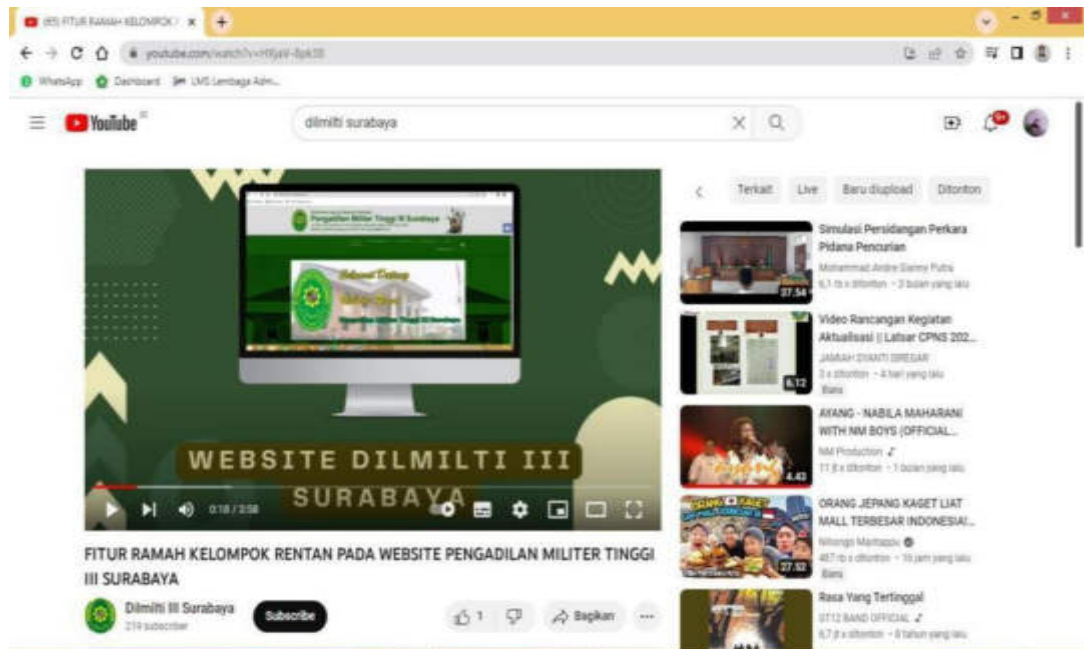
```

233
234
235     if (isset($icon)) {
236         return sprintf('img src="%s" alt="%s" data-bbox="%s" data-cs="3" data-kind="parent" data-bbox="%s" data-kind="ghost"/>', $icon, $icon);
237     }
238     return '';
239 }
240
241 private function get_svg_icons($icon) {
242     if (null == $this->svg_icons) {
243         $this->svg_icons = array(
244             'wheelchair' => 'feather icon: wheelchair',
245             'eye-click' => 'feather icon: eye',
246             'accessibility' => 'feather icon: accessibility'
247         );
248     }
249 }
250
251     if (isset($this->svg_icons[$icon])) {
252         return $this->svg_icons[$icon];
253     }
254     return $this->svg_icons['accessibility'];
255 }
256
257 public function __construct() {
258     add_action('wp_enqueue_scripts', array($this, 'enqueue_scripts'));
259 }
260
261     add_action('wp_footer', array($this, 'print_html_to_content_block'), 99);
262     add_action('wp_footer', array($this, 'print_footer'), 99);
263 }
264
265 }
266
    
```





- 2) Publikasi fitur ramah kelompok rentan pada website Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di media sosial *youtube* dan *Instagram*.



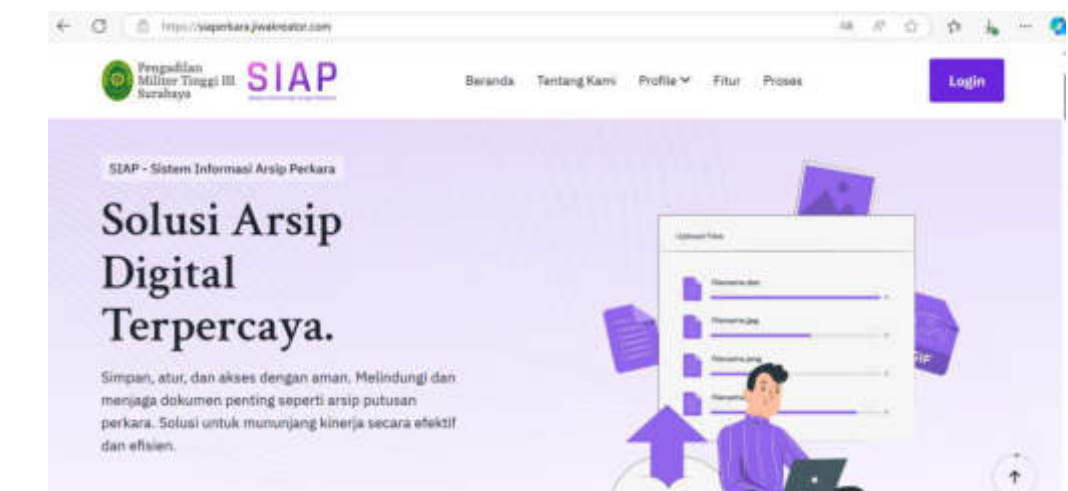
### g. Inovasi Peningkatan Arsip Putusan Perkara Secara Digital Menggunakan Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP).

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta pelatihan dasar atas nama CPNS Nonikca Florence Tiara, S.H. Inovasi ini dilaksanakan khusus pada bagian Kepaniteraan di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Inovasi ini dirancang untuk mendukung kinerja Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan tujuan untuk memudahkan dan mempercepat pencarian arsip perkara ketika dibutuhkan sehingga tidak lagi membuat para pencari keadilan menunggu hanya untuk mendapatkan suatu produk hukum khususnya salinan putusan, sehingga dapat terwujudnya misi Peradilan Militer Tinggi III Surabaya yaitu Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Berikut ini tampilan dari Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP) pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:

#### 1) Halaman awal/*landing page*

Halaman awal merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika website tersebut dibuka, dan muncul pilihan login.

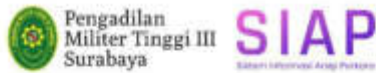


Gambar *Landing Page* tentang SIAP



Gambar profil pada landing page SIAP





## SISTEM INFORMASI ARSIP PERKARA (SIAP)

Solusi arsip digital terpercaya, melindungi dan menjaga dokumen seperti arsip putusan perkara. Sebagai salah satu upaya untuk menunjang kinerja kepaniteraan secara efektif dan efisien.

Mengakses "SIAP" sangat mudah! Ikuti langkah-langkah berikut untuk mulai mengelola dokumen hukum Anda dengan aman:

### CARA MENGAKSES

- 1 Kunjungi [s.id/siaperkara](https://s.id/siaperkara) di browser anda
- 2 Masuk ke halaman Login dan masukkan email dan password yang terdaftar
- 3 Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke dashboard utama.
- 4 Di sini, Anda dapat mengunggah, mengelola, dan mencari dokumen secara cepat dan aman.

### FITUR UNGGULAN

- Encrypted Storage
- Role-Based Access Control
- Activity Log Tracking
- Seamless Document Upload
- Backup Otomatis dan Terjadwal
- File Upload Validation

### MANFAAT

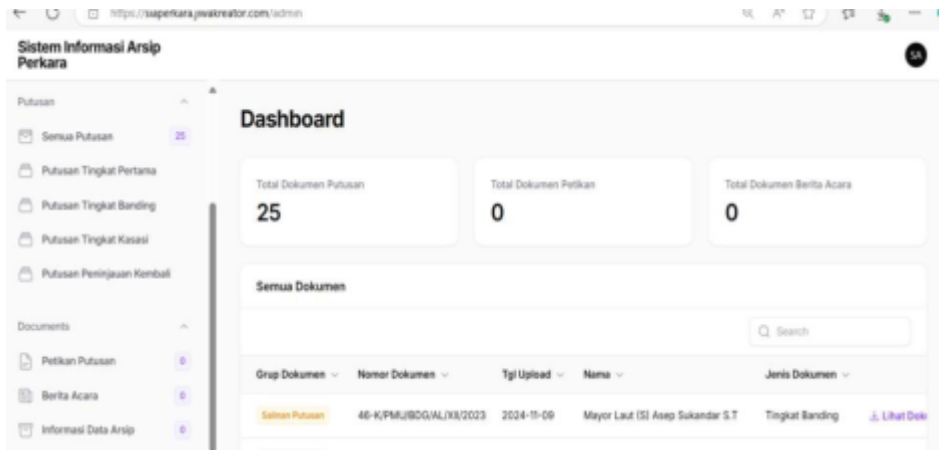
- Menjaga arsip dokumen secara aman dan tidak mudah rusak.
- Memudahkan proses pencarian dan penyimpanan arsip lebih cepat, efektif dan efisien.
- Sebagai salah satu sarana untuk memudahkan kinerja kepaniteraan dalam memberikan salinan putusan kepada para pencari keadilan.

Scan QR disamping atau kunjungi link berikut ini <https://s.id/siaperkara>

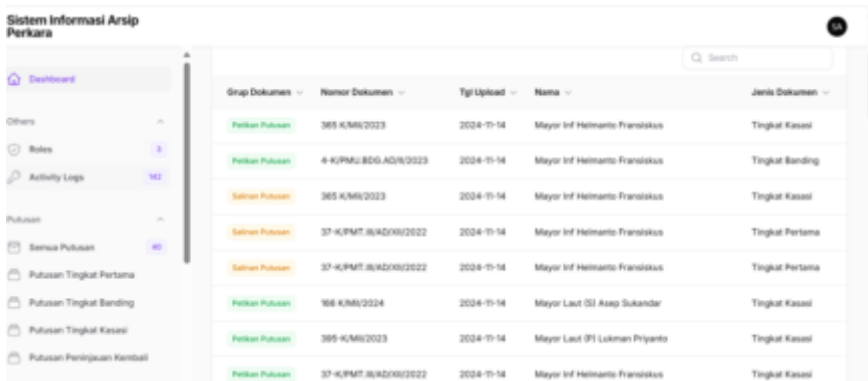
Mahkamah Agung Republik Indonesia | Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya | Sistem Informasi Arsip Perkara

## 2) Halaman Menu SIAP

Menu arsip yang ada di Sistem Informasi Arsip Perkara (SIAP), terdiri dari arsip Putusan Tingkat Pertama, Putusan Tingkat Banding, Putusan Tingkat Kasasim Putusan Peninjauan Kembali, Petikan Putusan, Berita Acara Sidang, Informasi Data Arsip.



3) Menu Putusan pada salinan putusan perkara yang telah terinput pada SIAP

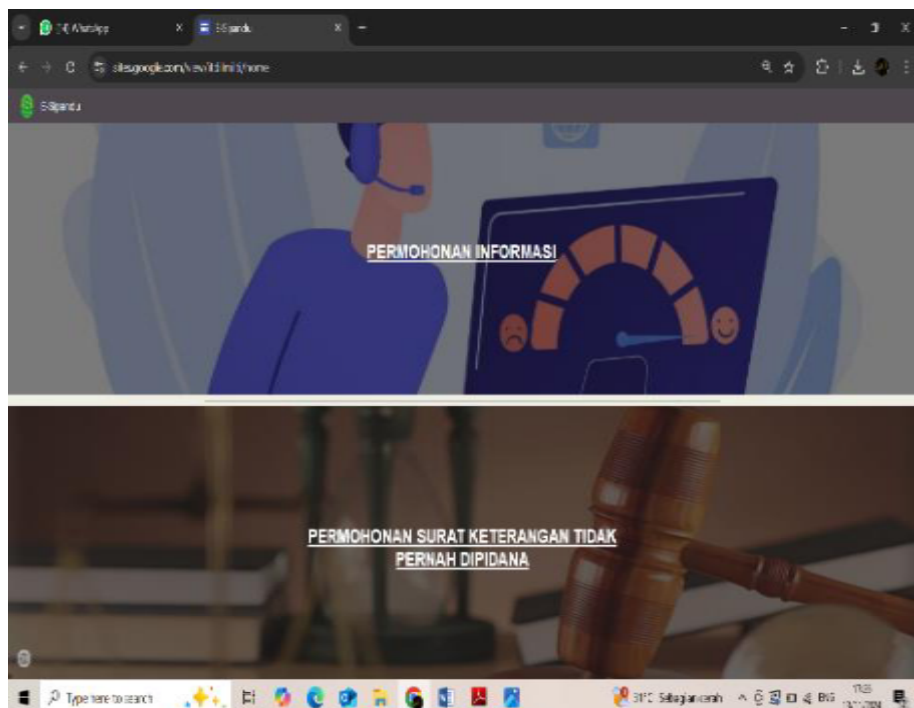


### h. Inovasi Elektronik Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Terpadu (E-SIPANDU)

Inovasi ini merupakan hasil aktualisasi dari peserta Pelatihan Dasar atas nama CPNS Reza Aziz Pasya, S.H. Inovasi E-SIPANDU merupakan layanan berbasis elektronik yang dapat diakses oleh Pemohon secara mandiri, digunakan untuk mengajukan Permohonan Informasi berupa permintaan salinan putusan, permintaan petikan putusan, dan permintaan Akta BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) bagi Para Pencari Keadilan dan permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikhususkan untuk Prajurit TNI berpangkat Mayor ke atas pada wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Adapun inovasi yang dilaksanakan berupa :

- 1) Pembuatan *website* Elektronik Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Terpadu (E-SIPANDU) dan menginput data *google form* ke dalam *website* E-SIPANDU, yang kemudian diintegrasikan dengan *website* satuan kerja.





2) Publikasi layanan Elektronik Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Terpadu (E-SIPANDU), berupa:

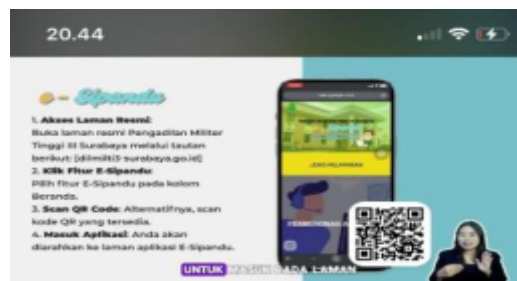
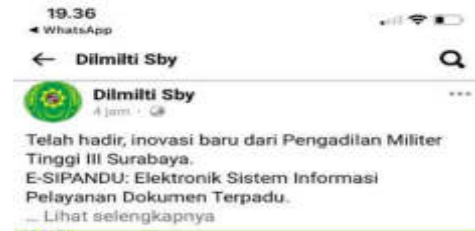
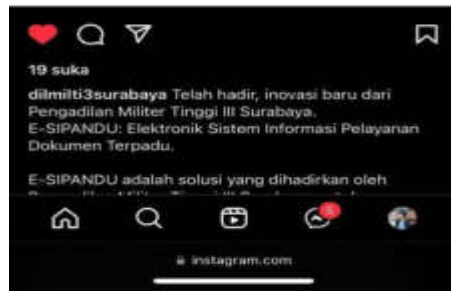
- a) Brosur di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tentang jenis prosedur dan penggunaan layanan E-SIPANDU.



- b) Konten infografis pada TV digital PTSP terkait layanan pada *website* E-SIPANDU.



- c) Konten infografis dan video tutorial penggunaan layanan E-SIPANDU pada media sosial *Instagram*, *Facebook*, dan *Youtube* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



## 2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

### a. Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

### b. Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.

**c. Aplikasi SUKMA**

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.

**d. Aplikasi SIPDIL**

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

**e. Aplikasi HARUM**

Aplikasi HARUM merupakan aplikasi yang dibangun untuk menunjang pelayanan publik Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Mei 2021. HARUM adalah kepanjangan dari Halaman Forum.

Aplikasi HARUM dimaksudkan sebagai media berbagi informasi dan diskusi tentang hukum dan pelayanan publik. Pembangunan aplikasi HARUM ini didasari oleh beberapa pemikiran yaitu :

- 1) Banyaknya permohonan data dari mahasiswa.

Sehubungan hal ini, dirasa akan memberi manfaat lebih apabila Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan media bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mencari informasi dan diskusi hukum dengan Hakim (pengampu yang ditunjuk) yang notabene memiliki keilmuan dan pengalaman dalam bidang hukum.

- 2) Kondisi pandemi.

Melalui media ini, mahasiswa dan masyarakat umum dapat tetap memperoleh informasi tanpa harus datang dan berinteraksi dengan petugas, sehingga tetap terjaga protokol kesehatan.

Aplikasi HARUM menyediakan layanan diskusi dan berbagi informasi dari masyarakat maupun dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi HARUM dijalankan dengan menunjuk Hakim sebagai pengampu atau narasumber.

**f. Aplikasi SIPTERA**

Aplikasi SIPTERA merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini

dibangun dan mulai dijalankan di bulan Juli 2021. SIPTERA adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan.

Aplikasi SIPTERA adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan antara *database* dengan *Microsoft Word* untuk membantu memudahkan kepaniteraan dalam membuat akta-akta dan persuratan. SIPTERA merupakan aplikasi internal kepaniteraan pertama di Dilmil III-12 Surabaya. Aplikasi SIPTERA dibangun dengan bahasa pemrograman SQL melalui *Microsoft Access* untuk kemudahan pengaturan *database*.

Pada SIPTERA terdapat tiga versi untuk setiap pihak berperkara, yaitu versi terdakwa, versi penasihat hukum dan versi oditur militer. Akta-akta dan surat-surat dari aplikasi SIPTERA bergantung pada siapa yang mengajukan upaya hukum. Dengan demikian akan meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam proses pembuatan akta dan surat yang dimaksud. SIPTERA sementara direncanakan dalam tiga kali tahapan. Tahap pertama adalah versi yang sedang digunakan dan dikembangkan saat ini di Kepaniteraan Dilmil III-12 Surabaya, tahap kedua yaitu integrasi dengan SIPP sehingga proses pengisian atau manajemen *database* bisa berjalan lebih efektif dan efisien dan tahap ketiga adalah tambahan Fitur BAS dan Konsep Putusan secara otomatis.

**g. Chat Online berbasis Website**

Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Maret 2023.

Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna layanan di Internet yang di terdapat di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi ini bertujuan agar pengguna layanan dapat segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-1 Surabaya.

**h. APLIKASI ELITMIL**



Aplikasi Elitmil (Elektronil Literatur Dilmil) merupakan inovasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini mulai diterapkan pada bulan Desember 2023.

Aplikasi Elitmil adalah sistem automasi perpustakaan berbasis web yang digunakan untuk pengelolaan koleksi tercetak dan terekam yang ada di perpustakaan. Dibangun dengan kapabilitas cross-platform, aplikasi Perpustakaan dapat berjalan dengan baik di atas semua sistem operasi seperti MacOS, MS-Windows, dan GnU/Linux.

Aplikasi ini dirancang secara khusus agar dapat digunakan oleh perpustakaan yang memiliki banyak koleksi, anggota dan staf, di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal (intranet) maupun internet. Untuk meningkatkan interaktifitas agar bisa tampil seperti aplikasi desktop, juga digunakan teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript And XML).

### 3. Pengadilan Militer III-13 Madiun

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap Masyarakat pencari keadilan dan demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku badan peradilan di bawahnya juga tak lelah untuk berinovasi. Berikut beberapa inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun:

#### a. Website Pengadilan Militer III-13 Madiun

Pada halaman website yang dimiliki Pengadilan Militer III-13 Madiun ini pada tahun 2024 ini yang terbaru ada perombakan website yang lebih rapih dan estetik, dan juga sudah menyesuaikan dengan standarisasi website yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Website yang baru ini pun sudah dapat menyesuaikan dengan tampilan gawai dari masing-masing pengakses. Selain itu, website ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan hadirnya fitur *Accessibility Menu* dan juga *Text to Speech* dengan tampilan sebagai berikut:

- Tampilan Website:





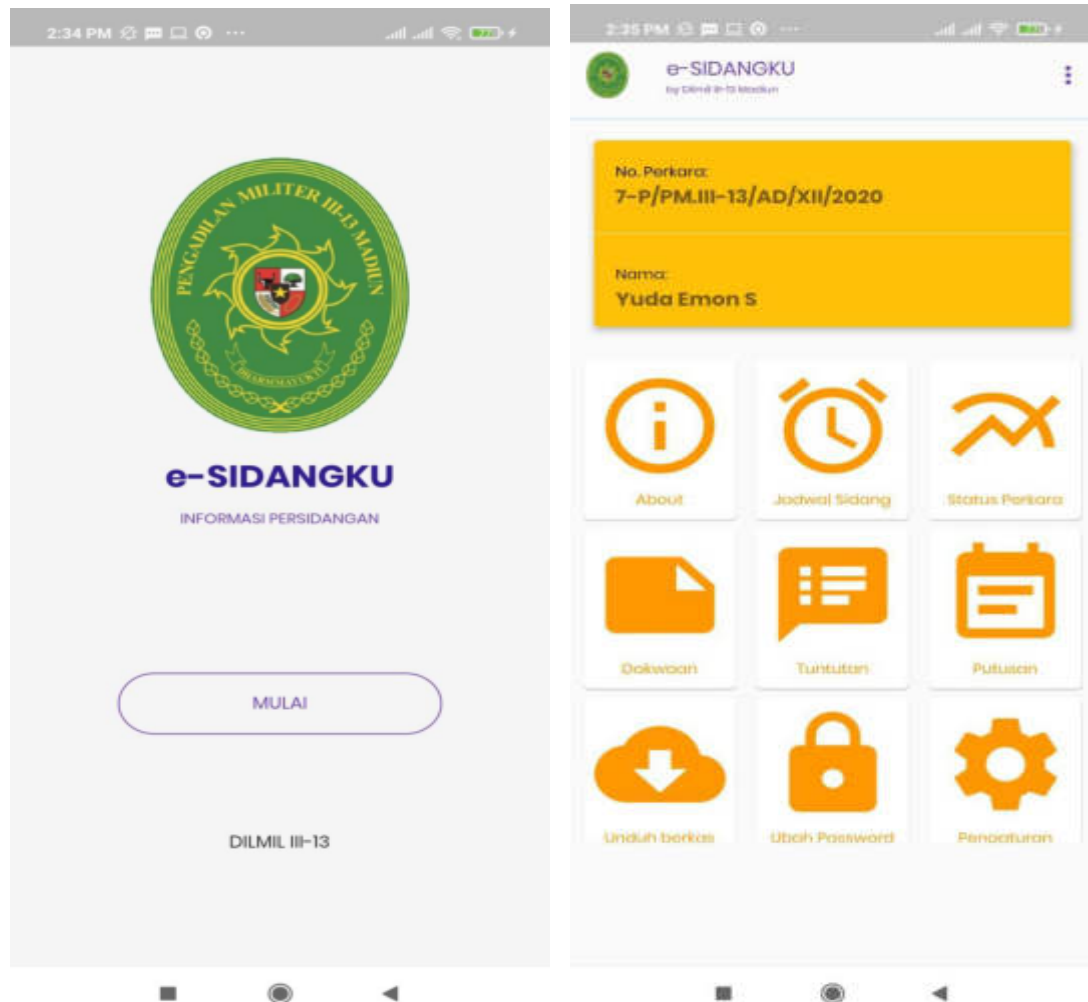
c. Aplikasi Mobile MMC

Aplikasi Mobile MMC adalah pengembangan dari aplikasi e-SIDANGKU, Dimana di dalamnya terdapat seluruh informasi terkini Pengadilan Militer III-13 Madiun, beserta link ke semua sosial media Pengadilan Militer III-13 Madiun. Tak hanya itu, di dalam aplikasi ini juga terdapat form untuk kepengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dapat diakses oleh public secara online, yang mana sebelumnya pihak yang membutuhkan surat ini harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun (gambar terlampir).



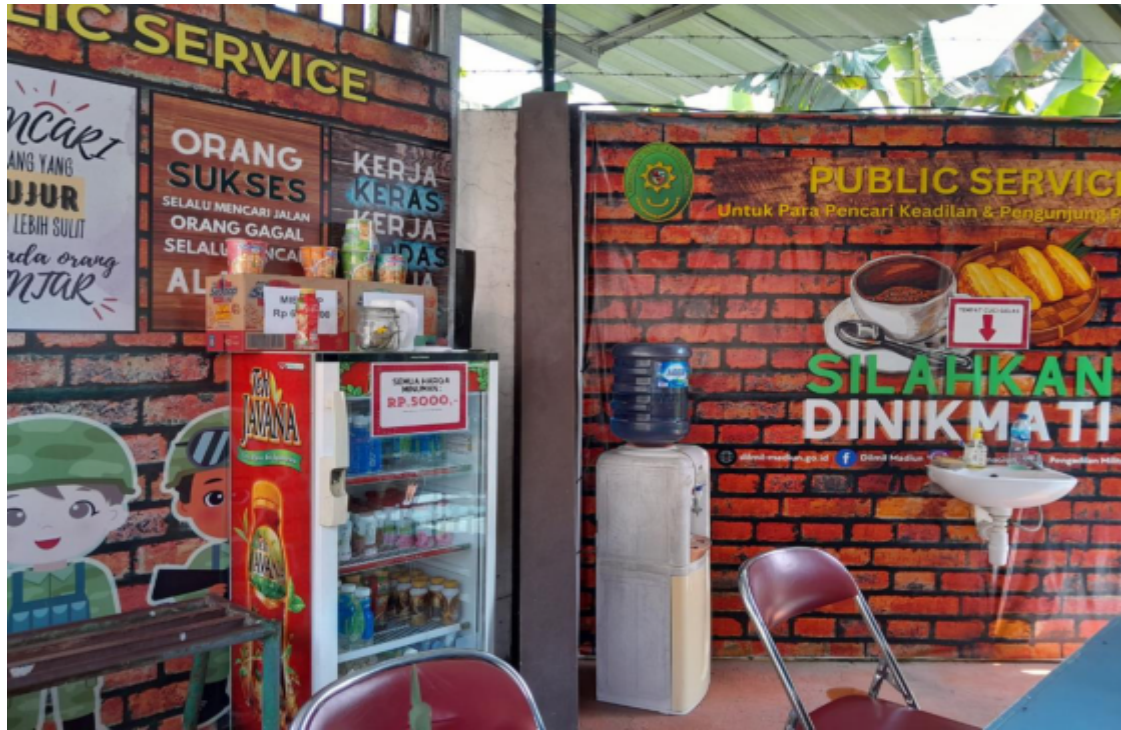
d. Aplikasi e-SIDANGKU

Aplikasi e-SIDANGKU adalah sebuah inovasi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berupa aplikasi untuk para pihak berperkara dalam memperoleh informasi terkait persidangan yang tengah mereka jalani secara mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pemilik Ponsel berbasis Android di Google Play Store. Didalamnya terdapat menu Jadwal Persidangan, Status Perkara, Dakwaan, Pengaduan, dan Unduh Salinan Putusan. Terdapat pula fitur pengingat untuk memastikan agar para pihak berperkara tidak lupa akan jadwal persidangan yang akan mereka jalani. (gambar terlampir).



e. Public Service

Publik (*Public Service*) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dalam mengimplementasikan *Public Service* maka Pengadilan Militer III-13 Madiun menyediakan area pelayanan public bagi Masyarakat Pencari Keadilan dan para tamu persidangan untuk melepas penat dan dahaga ketika menunggu jalannya proses persidangan yang sedang berlangsung. Tersedia air mineral, kopi, teh dan snack yang dapat dinikmati oleh para tamu persidangan yang disediakan gratis oleh kantor, yang dana nya berasal dari sumbangan sukarela para anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. Hal ini merupakan wujud nyata Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mempertahankan Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). (gambar terlampir).



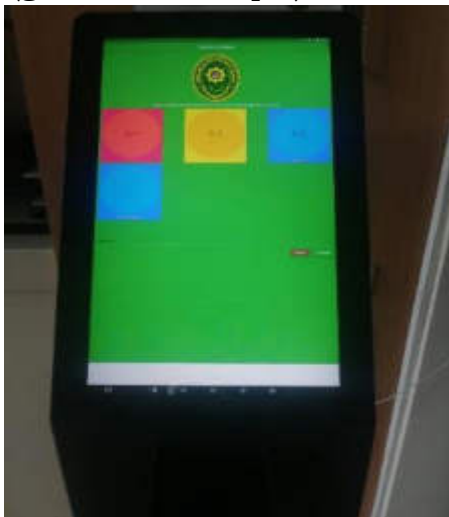
f. Ruang Tunggu Terbuka

Ruang tunggu terbuka merupakan salah satu bagian dari *area public service* yang berada di luar bangunan yang kegunaannya sangat penting bagi siapa saja untuk berbagai aktivitas. Dalam pemenuhan pelayanan bagi pencari keadilan, untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan ruang tunggu bagi para tamu persidangan dan masyarakat pencari keadilan. (gambar terlampir).



g. Aplikasi Nomor Antrian Tamu

Untuk tertibnya pelayanan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun ini menggunakan sistem antrian secara elektronik berupa aplikasi antrian tamu, dimana tamu akan dibagi sesuai dengan jenis layanannya, yang kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas PTSP, sehingga proses antrian tamu dapat berjalan dengan lancar dan tertib. (gambar terlampir).



Tiket Antrian

#	No Antrian	Loket	Jam Datang	Keterangan	Aksi
1	P-01	Kepaniteraan	15:32:53	Menunggu	Panggil
2	S-01	Kesekretariatan	15:32:49	Menunggu	Panggil
3	S-02	Kesekretariatan	15:32:51	Menunggu	Panggil

© 2021 Dilmi III-13 Madiun

h. Inovasi Digitalisasi Penyerapan Anggaran

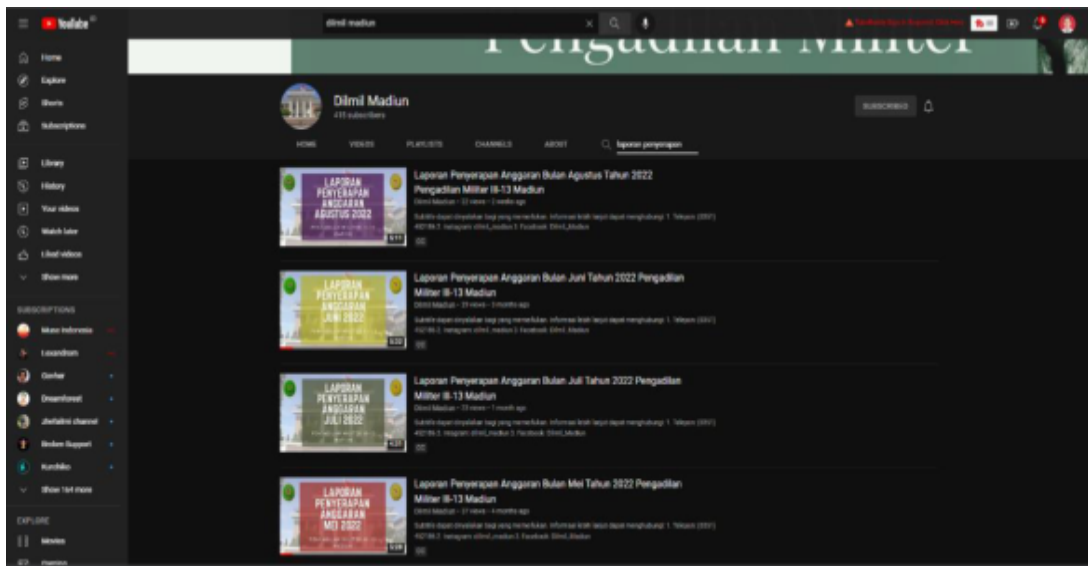
Inovasi Digitalisasi Penyerapan Anggaran merupakan suatu proses manajemen yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dan demi membantu rekan-rekan para difabel untuk memahami tentang mengelola biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dengan biaya yang minimal yang sehingga laporan ini dapat dimuat di seluruh media sosial Dilmi III-13 Madiun. (gambar terlampir).

1. Pada Website

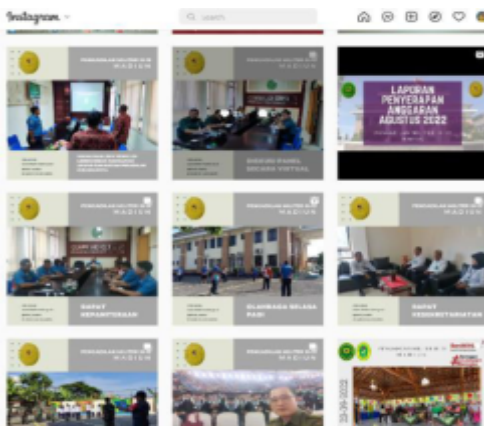




2. Pada Youtube Dilmil III-13 Madiun



3. Pada Instagram



d. Pada Facebook



i. Inovasi Layanan Khusus Informasi Digital Whatsapp pada Website dan Sosial Media Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat mulai mengenal teknologi informasi. Misalnya, penggunaan smartphone yang hampir semua kalangan memiliki perangkat jenis ini. Mereka juga sangat merasakan kemudahan dalam segala hal termasuk mendapatkan informasi terupdate. Oleh karena itu, Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai inovasi teknologi dengan memanfaatkan salah satu aplikasi media sosial yang mudah diakses oleh Masyarakat yaitu dengan cara pengembangan pelayanan public berbasis aplikasi Whatsapp sebagai langkah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Pada aplikasi Whatsapp ini terdapat chat yang terhubung langsung dengan bot yang akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh publik,

seperti informasi data perkara, jadwal sidang, permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, pengaduan, permohonan layanan khusus (bagi kaum rentan dan disabilitas), dan pusat layanan informasi. Berikut aplikasi berbasis Whatsapp. (gambar terlampir)

j. Wall of Impressions

Kata-kata motivasi atau impresi tentang kehidupan menjadi salah satu cara menasihati diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan Wall of Impressions atau kata-kata motivasi yang ditulis oleh para tamu pejabat yang hadir di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir).



k. Semir Sepatu Gratis

Dalam rangka memberikan pelayanan public kepada para pencari keadilan untuk itu Inovasi ini dihadirkan sebagai salah satu upaya Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mencapai pelayanan yang prima. (gambar terlampir).



1. Ladies Park

*Ladiespark* ini disediakan guna memwadhahi masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun khususnya wanita, untuk dapat memarkir kendaraannya dengan mudah, dengan spot parkir yang dinilai paling mudah untuk diakses. (gambar terlampir)



m. Parkir Difabel

Parkir difabel ini disediakan untuk memwadhahi Para Disabilitas agar dapat dengan mudah turun dari kendaraan dan mengakses sarana disabilitas kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



n. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik

Selain dari survey manual yang telah disediakan (dengan mengisi form/angket survey yang telah disediakan), masyarakat pencari keadilan juga dapat mengisi survey indeks kepuasan masyarakat secara online langsung dari gadget/gawai nya masing-masing. Survey ini berbentuk QR-Code yang tersebar diberbagai area kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. Survey elektronik ini disediakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tolak ukur dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan juga wujud nyata dalam mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). (gambar terlampir)



o. Pojok Baca

Pojok baca disediakan untuk masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun agar dapat mengisi waktu ketika menunggu dengan bacaan yang menambah ilmu dan keimanan. Buku/bacaan ini disediakan diberbagai sudut

kantor seperti ruang tunggu, didalam ruang tahanan, dan juga di ruang ramah anak. (gambar terlampir)

p. ATR (Audio to Text Recorder)

ATR adalah perangkat yang berfungsi untuk merubah audio menjadi text yang dapat mempercepat proses persidangan. Dengan demikian proses persidangan menjadi lebih akurat dan cepat untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan. (gambar terlampir)





q. Go Green

Go green adalah kawasan atau area yang berada di sekitar kantor maupun di dalam kantor yang berfungsi untuk keindahan dan kenyamanan para pencari keadilan. Kawasan atau area Go Green ini bertujuan untuk menyegarkan udara. (gambar terlampir)



r. Charger HP

Perangkat ini merupakan piranti yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Seiring perkembangan teknologi informasi, maka keberadaan changer HP sangat diperlukan sebagai sarana pelayanan bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang mengisi daya baterai HP. (gambar terlampir)



s. Kotak P3K

Sarana ini diperlukan sebagai sarana pelayanan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan baik terhadap pengunjung sidang, pencari keadilan dan anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



t. Smoking Area

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka bebas dari asap rokok, maka sebagai sarana pelayanan menyediakan Smoking Area untuk pengunjung Sidang dan Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



u. Free Wifi

Free Wifi yang diseluruh kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun ini dapat memberikan layanan manfaat yang besar seperti membantu dan memudahkan para pencari keadilan mengakses informasi. (gambar terlampir)



v. Televisi Menampilkan DIPA dan Jadwal Persidangan

Sarana televisi besar sebagai sarana transparansi peradilan berkaitan dengan informasi persidangan, jadwal sidang dan sosialisasi pelayanan prima yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

(gambar terlampir)



w. Alat Pemadam Api Ringan

Sarana ini dibutuhkan sebagai sarana pengamanan tingkat pertama apabila terjadi kebakaran di dalam kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



Alur ini digunakan untuk mempermudah evakuasi apabila terjadi kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya. (gambar terlampir)





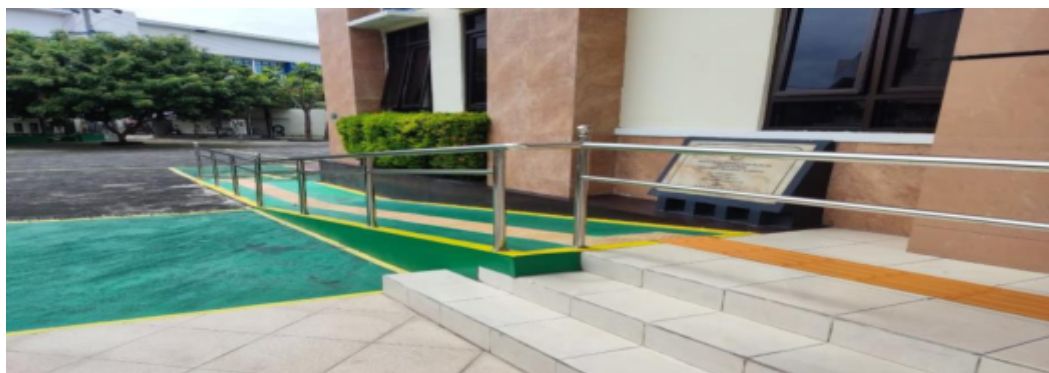
y. Jalur Evakuasi Titik Kumpul

Sarana digunakan sebagai titik kumpul evakuasi apabila terjadi bencana alam. (gambar terlampir)



z. Jalur Khusus Disabilitas

Sarana Disabilitas digunakan sebagai sarana pelayanan yang berkebutuhan khusus bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang, sehingga dapat mempermudah akses bagi yang berkebutuhan khusus. (gambar terlampir)



Pos Penjagaan dan Ruang Tunggu Tamu

Sarana ini digunakan sebagai screening pertama apabila ada tamu keluar masuk kantor sehingga keamanan dapat terkendali. (gambar terlampir)



aa. Papan Pengumuman

Sarana ini digunakan untuk mempermudah sebagai sarana pelayanan informasi pencari keadilan dalam rangka mempublikasikan hasil persidangan. (gambar terlampir)



bb. Tempat Bermain Anak

Sarana ini digunakan untuk membantu para pencari keadilan yang membawa anaknya yang masih balita untuk dapat bermain di tempat tersebut sehingga tidak mengganggu proses persidangan berlangsung. (gambar terlampir)



cc. LHKPN

LHKPN singkatan dari Laporan Harta Kekayaan



Penyelenggara Negara. Ini merupakan daftar harta kekayaan yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara, selain kami menuangkan beberapa Inovasi Pelayanan Publik, Pengadilan Militer III-13 Madiun juga melaporkan LHKPN yang sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Sebagai keterbukaan informasi publik dan mencegah bagian dari upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaporkan LHKPN (gambar terlampir) WBK (Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 secara Virtual Pengadilan Militer III-13 Madiun



menerima penganugerahan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI. (gambar terlampir)

### PENGHARGAAN WBK 2018



### PENGHARGAAN WBBM 2020



#### 4. Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi-aplikasi sejak tahun 2019. Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

##### a. Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

Di tahun 2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar membangun satu aplikasi baru yaitu aplikasi E-Santi (Elektronik Sistem Asisten Terintegrasi). Aplikasi E-Santi (Elektronik Sistem Asisten Terintegrasi) pada tanggal 21 Juli 2023 Aplikasi tersebut di Launching oleh Kadilmil III-14 Denpasar yang dihadiri oleh seluruh staff Dilmil III-14 Denpasar



Pada tahun 2024 Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapat penghargaan Lomba Website se-indonesia yang diselenggarakan oleh Dirjen Badilmiltun dan mendapat Juara II, Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan selalu meningkatkan pelayanan public terhadap Masyarakat pencari keadilan. Dan Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapatkan Nominasi 4 (empat) besar dalam pembuatan Vidio Profil.



#### b. INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAINNYA

Selain aplikasi E-Santi, Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebelumnya juga telah membangun dan menjalankan beberapa aplikasi yang dibuat oleh Personil Dilmil III-14 Denpasar dalam mendukung kinerja sehari-hari. Aplikasi yang masih digunakan secara intern yaitu Aplikasi SIMPEKIP. Bersamaan dengan digunakannya aplikasi ini, disusun pula SOP sebagai pedoman penggunaan aplikasi dan diterbitkan surat penunjukan admin atau tim pelaksana aplikasi.

- Aplikasi SIMPEKIP (Sistem Pengelolaan PKP dan SKP Pegawai) merupakan inovasi sistem media pengelolaan, pengumpulan sekaligus penyimpanan berkas PKP dan SKP pegawai Pengadilan Militer III-14 Denpasar secara digital menggunakan google form dan google drive.



Gambar V.9 : Aplikasi Simpekip

#### Hasil Survei Pelayanan Publik

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Militer III-14 Denpasar melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Masing-masing survei dilaksanakan setiap bulan dalam tahun 2024.

Survei dilaksanakan terhadap 50 (lima puluh) orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor W3.Mil03/19/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-14 Denpasar.

Variabel pada pengukuran survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

**c. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Survei IKM dilaksanakan Triwulan IV mulai tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan. Hasil survei IKM Triwulan IV tahun 2024 mencapai nilai 3,73 yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

**d. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari beberapa kegiatan yaitu dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan.

Adapun survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan tahap kegiatan yang sama. Hasil survei IPK Triwulan IV tahun 2024 mencapai nilai 3,77 % yaitu berada di kategori SANGAT BAIK.

**5. Pengadilan Militer III-15 Kupang**

Pada Pengadilan Militer III-15 Kupang tahun 2024 terdapat 6 (enam) inovasi yaitu :

**a. Kiosk Touchscreen**

*Kiosk Touchscreen* atau anjungan *touchscreen* yang diletakkan di area PTSP yang berisi menu informasi berupa pengisian e-survey, hasil survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat, hasil survey Indeks Persepsi Korupsi, aplikasi SIWAS MARI, Website tentang peradilan yang dapat diakses secara elektronik oleh masyarakat, serta brosur-brosur elektronik

yang dapat di akses di mesin Kiosk tersebut sehingga mempermudah masyarakat memperoleh informasi secara mandiri apabila datang ke kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang.

**b. E-Brosure**

Tujuan *E-Brosur* adalah mempermudah masyarakat khususnya para pencari keadilan mendapatkan informasi mengenai pelayanan yang ada di Pengadilan Militer III-15 Kupang. Dengan E-Brosur ini, pengguna layanan dapat mengakses brosur-brosur yang disajikan di Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut, tanpa harus membawa fisik (hardcopy) dokumen informasi yang disediakan di meja PTSP Pengadilan Militer III-15 Kupang.

**c. E-Survey**

E-Survey merupakan aplikasi berbasis Google Form yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari masyarakat atas pelayanan Dilmil III-15 Kupang yang menjadi tolak ukur indeks kepuasan masyarakat secara real time sehingga dapat diketahui sebaik apa pelayanan di Pengadilan Militer III-15 Kupang melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

**d. E-PIS (Elektronik Pakta Integritas)**

E-PIS merupakan aplikasi berbasis Google Form yang bertujuan untuk penandatanganan pakta integritas secara elektronik oleh para aparatur sebelum pelaksanaan persidangan dimulai baik terdakwa, POM, saksi, Oditor, maupun penasehat hukum dalam upaya menegaskan komitmen dalam menjalankan kewenangan dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

**e. E-GUHHAN (Elektronik Penanguhan Penahanan)**

E-Guhhan merupakan aplikasi berbasis Google Form yang bertujuan untuk meregister Penanguhan Penahanan, Penanguhan Penahanan dapat diajukan dalam hal adanya jaminan tersangka / dan atau terdakwa dengan syarat tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran atau adanya permintaan dari Komandan satuan dengan alasan tertentu.

**f. Pelayanan Upaya Hukum**

Pelayanan terhadap permohonan banding, Administrasi Perkara Kasasi,

Administrasi Perkara Peninjauan Kembali, dan Administrasi Perkara Grasi.

**g. Pelayanan Penanggungan Penahanan**

Pelayanan terhadap permintaan Penanggungan Penahanan yang dapat diajukan dalam hal adanya jaminan tersangka / dan atau terdakwa dengan syarat tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan, tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana atau membuat keonaran atau adanya permintaan dari Komandan satuan dengan alasan tertentu.

**h. Pelayanan Administrasi Persidangan**

Pelayanan Persidangan Perkara Pidana Kejahatan dan Pidana Pelanggaran.

**i. Pelayanan Permohonan Informasi**

Pelayanan Permohonan Informasi bisa diajukan secara offline dengan cara mengunjungi PTSP Pengadilan Militer III-15 Kupang dan mengisi formulir Permohonan Informasi, atau dapat juga melalui online berbasis website dengan mengunjungi alamat berikut <https://dilmil-kupang.go.id/layanan-informasi.php> .

**j. Pelayanan Pengaduan**

Pelayanan Pengaduan bisa diajukan secara offline dengan cara mengunjungi PTSP Pengadilan Militer III-15 Kupang dan mengisi formulir Pengaduan, dapat juga melalui online berbasis website dengan mengunjungi alamat berikut <https://dilmil-kupang.go.id/layanan-pengaduan.php> .

**5. Pengadilan Militer III-16 Makassar**

Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar tahun 2024 terdapat inovasi sebagai berikut :

- a. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Adanya ruang tunggu bagi pencari keadilan yang nyaman (Self Service), ruang menyusui, musollah, dan tempat bermain anak-anak yang representative;
- c. Adanya Jalur disabilitas tuna Netra berupa guiding block;
- d. Drop off khusus penyandang disabilitas;
- e. Ruang Sidang Khusus Virtual;
- f. Adanya Aplikasi E-LIHAT untuk mempermudah pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat mengakses informasi dari mana

saja;

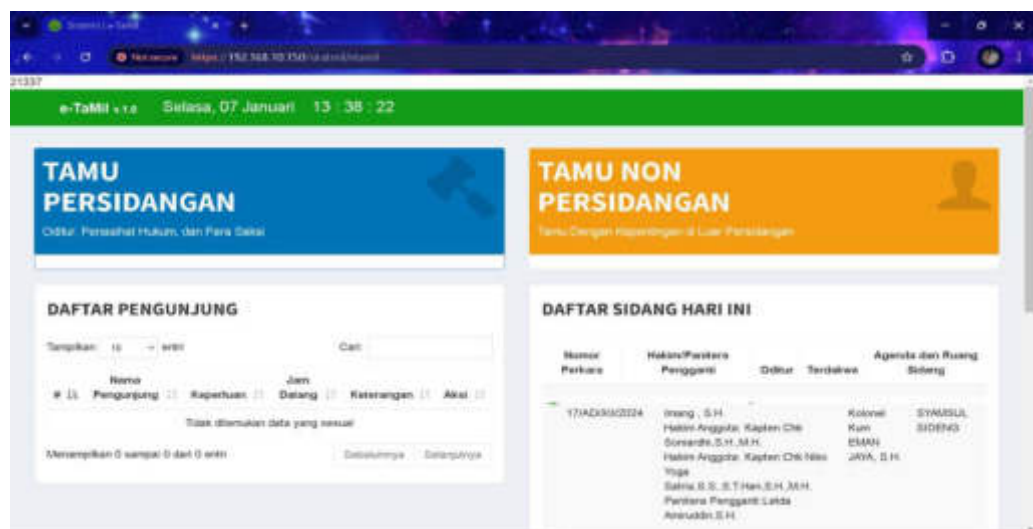
g. Tersedianya Meja Inzage bagi para pencari keadilan pada saat pembacaan putusan upaya hukum;

h. Tersedianya E-Survey untuk mempermudah para pencari keadilan dalam memberikan penilaian kepuasan pelayanan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

i. Tersedianya Media Konsultasi dan Pengaduan pada menu Website Dilmil III-16 Makassar bagi para pencari keadilan

## 6. Pengadilan Militer III-17 Manado

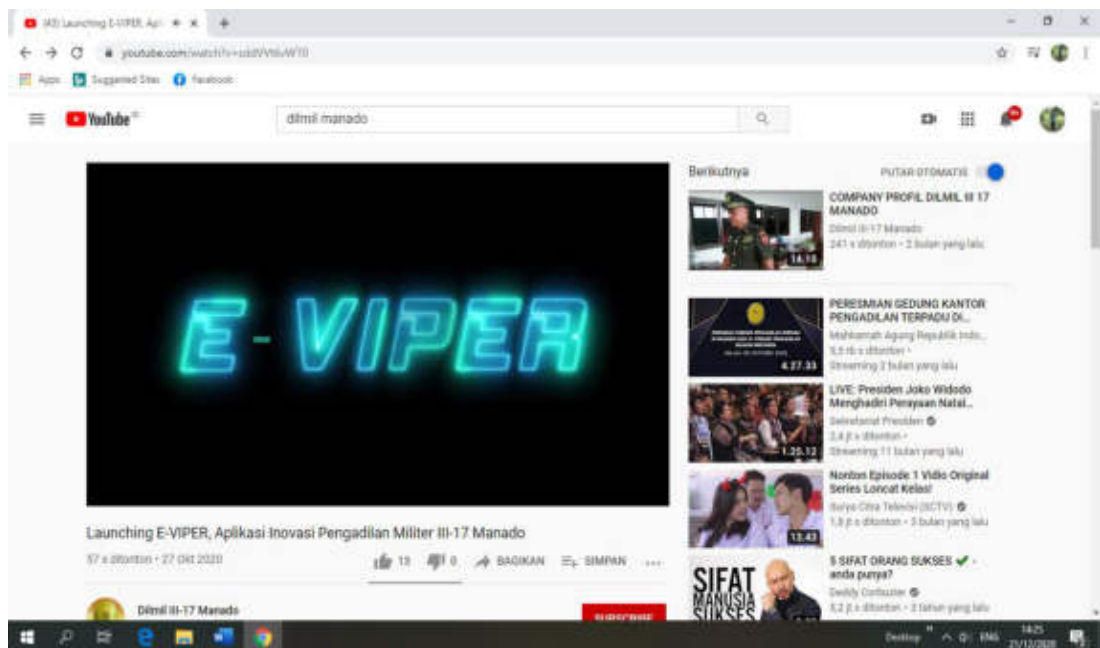
e-TaMil merupakan singkatan dari Elektronik Buku Tamu Pengadilan Militer adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh salah satu personel Pengadilan Militer III-17 Manado yang mana aplikasi ini berfungsi sebagai buku tamu secara elektronik sehingga para tamu persidangan maupun non persidangan tidak perlu lagi menulis buku tamu secara manual dan akan terus dikembangkan serta disinkronkan dengan survey kepuasan masyarakat.



Pada tanggal 13 Desember 2018, penggunaan Aplikasi e-TaMil pada Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ke-2 sangat menginspirasi beberapa pihak dalam model pelayanan masa depan, Aplikasi ini disambut antusias oleh para pencari keadilan, hal ini terbukti dengan banyaknya penilaian positif dari hasil polling Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

**a. Penggunaan Aplikasi e-Viper (Elektronik Virtual Pengadilan Militer)**

Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pengadilan Militer III-17 Manado terus berinovasi, tahun 2020 Inovasi yang dilakukan yaitu Aplikasi e-Viper yang di resmikan penggunaannya oleh Kadilmil III-17 Manado, Letnan Kolonel Chk Dwi Yudo Utomo, S.H., pada tanggal 27 Oktober 2020. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan kepada pengguna layanan PTSP sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengantri di PTSP Dilmil III-17 Manado. Dengan demikian maka tidak akan terjadi penumpukan pengunjung di Front Office Dilmil III-17 Manado pada jam pelayanan kerja yang bertujuan meminimalisir terjadinya penularan virus corona (Novel Corona Virus 2019).







**b. SMS Blast**

SMS Blast adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengirimkan pesan sms melalui provider Telkomsel kepada pengunjung dengan radius sekitar Pengadilan Militer III-17 Manado dimana ini dari pesan tersebut adalah berupa pesan layanan yang ada pada Pengadilan Militer III-17 Manado. Pada pesan tersebut akan terdapat link menuju aplikasi layanan E-Viper yang nantinya didalam aplikasi tersebut terdapat layanan PTSP Pengadilan Militer III-17 Manado

**c. Layanan Goberxim**

Layanan ini merupakan salah satu inovasi dalam hal pelayanan publik dimana nantinya fungsi dari layanan ini adalah untuk membantu para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Militer III-17 Manado tanpa membawa kendaraan sehingga petugas piket persidangan bisa menawarkan layanan untuk dipesankan taxi online

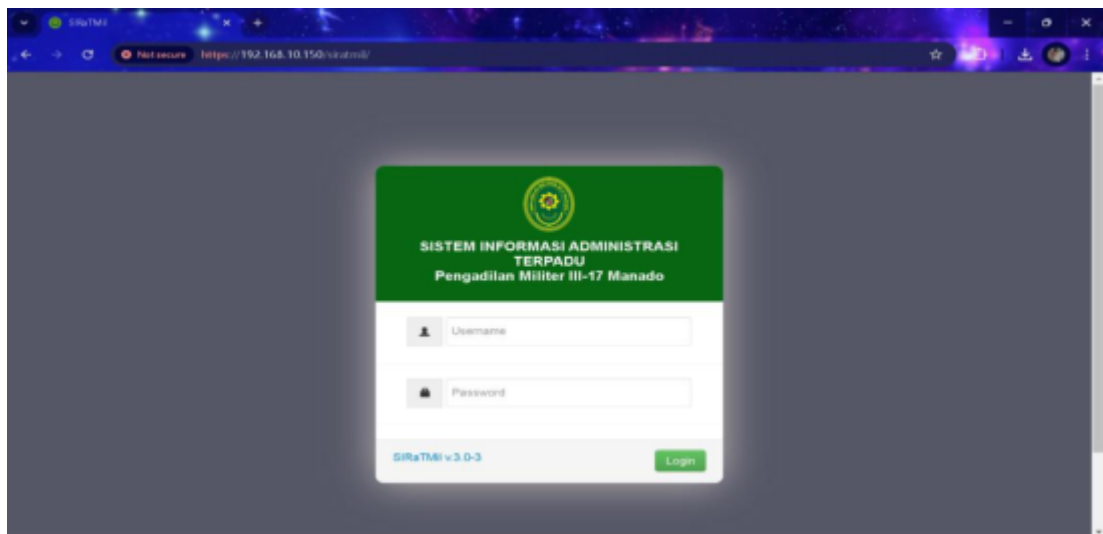




#### d. Aplikasi Yang Sedang Dikembangkan

Pada Tahun 2024, Pengadilan Militer III-17 Manado melakukan pengembangan terhadap aplikasi Siratmil yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan prima. Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Militer III-17 Manado, berupaya menerapkan Aplikasi SIRATMIL sesuai Surat Edaran Dirbinganisminmil Ditjenbadilmiltun MARI Nomor : 13/Djmt/SE/6/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pelaksanaan dan Implementasi Aplikasi SIRATMIL. Karena jika bidang administrasi persuratan dapat dijalankan dengan baik maka akan memberikan dampak positif terhadap ASN dan instansinya.

Tujuan dilakukannya pengembangan pada aplikasi Slratmil ini adalah dikarenakan untuk pengoptimalisasi fungsi dari fitur-fitur pada aplikasi Siratmil, dimana sebelumnya aplikasi Slratmil ini hanya bisa dibuka melalui jaringan local yang ada di Pengadilan Militer III-17 Manado, menjadi bisa dibuka dan diakses dimana saja dan kapan saja melalui jaringan public



#### 7. Pengadilan Militer III-18 Ambon

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/Lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi.

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaharuan teknologi informasi (TI). Pembaharuan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Inovasi Pengadilan Militer III-18 Ambon ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

Aplikasi PAPERDA ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk memperoleh informasi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan mudah khususnya untuk satuan Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku utara.

Adapun PAPERDA tersebut adalah aplikasi virtual untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nomor Whatsapp (085823989133) yang melayani informasi antara lain :

- a. Kesekretariatan melayani informasi tentang Organisasi
- b. Kepaniteraan melayani informasi tentang Perkara
- c. Pengaduan melayani informasi tentang Pengaduan
- d. Pelayanan melayani informasi tentang Profil Dan Layanan lainnya.

Pengadilan Militer III-18 Ambon menyadari bahwa untuk dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik, maka diperlukan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan, Inovasi yang ada di Pengadilan Militer III-18 Ambon antara lain :

- a. Free Wifi bagi Pengunjung.

Adapun bagian dari komitmen Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memberikan layanan yang lebih baik dan memudahkan pengunjung dalam mengakses informasi adalah menyediakan free Wifi untuk pengunjung. Fasilitas ini memungkinkan pengunjung untuk dapat mengakses internet dengan mudah selama berada di kantor Pengadilan Militer.

- b. Pojok Tensi.

Pojok Tensi merupakan bentuk pelayanan yang disediakan kepada Pengunjung sidang maupun non persidangan yang berkenaan untuk

mengecek tekanan darah mereka oleh petugas Dilmil III-18 Ambon secara gratis.



Gambar 5. 1 Inovasi Pojok Tensi



c. **Senin Berkah.**

Senin Berkah merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada pengunjung sidang maupun non persidangan yang datang pada setiap hari Senin, sebelum jam 09.00 WIT dan akan mendapatkan reward berupa snack gratis oleh Dilmil III-18 Ambon

**8. Pengadilan Militer III-19 Jayapura**

Demi mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, Pengadilan Militer III-19 Jayapura selaku badan peradilan dibawahnya juga tak Lelah untuk berinovasi. Berikut adalah inovasi yang telah dilahirkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura demi menunjang pelayanan publik agar semakin prima.

a. **Aplikasi SI-PAITUA (Sistem Informasi Pengadilan Militer III-19 Jayapura)**

Aplikasi SI-PAITUA dirancang oleh tim IT Dilmil III-19 Jayapura sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan. Pengadilan Militer III-19

Jayapura memiliki 2 (dua) wilayah hukum yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga para pencari keadilan terkadang kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai persidangan dikarenakan jarak yang sangat jauh apabila harus datang langsung ke kantor Dilmil III-19 Jayapura. Oleh karena itu tim IT Dilmil III-19 Jayapura membuat sebuah aplikasi berbasis pesan WhatsApp yang dapat mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi mengenai persidangan di Dilmil III-19 Jayapura. Aplikasi SI-PAITUA ini dapat memberikan informasi mengenai jadwal sidang, informasi perkara, direktori putusan dan pengaduan.



b. Aplikasi E Barcode Jadwal sidang

Aplikasi E-barcode jadwal Sidang dibuat sebagai Inovasi pelayanan pengadilan kepada masyarakat agar lebih mudah dalam mencari informasi jadwal sidang dengan gawai/Hp yang dimilikinya hanya dengan Scan barcode yang telah di sediakan.



c. Aplikasi E Barcode Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi

Aplikasi E-barcode Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi dibuat sebagai Inovasi pelayanan pengadilan kepada masyarakat agar lebih mudah dalam mengisi Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan gawai/Hp yang dimilikinya hanya dengan Scan barcode yang telah di sediakan.



d. Pojok Bermain Anak

Sarana ini digunakan untuk membantu para pencari keadilan yang membawa anaknya yang masih balita untuk dapat bermain di area yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu proses persidangan ketika pemeriksaan sedang berlangsung.



e. Layanan Khusus Disabilitas

Sarana Disabilitas digunakan sebagai sarana pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus agar mendapat kemudahan pada saat mengunjungi persidangan.





f. Smoking Area (Area Merokok)

Bahwa Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam rangka bebas dari asap rokok, maka sebagai sarana pelayanan menyediakan Smoking Area untuk pengunjung Sidang dan Anggota Pengadilan sehingga di dalam ruangan dan sekitar ruangan aman atau bebas dari asap rokok.



g. Tempat Charger

Sarana ini di tempatkan di ruang tunggu sidang dan diperuntukan bagi pengunjung persidangan untuk mengisi daya baterai HP pada saat sedang menunggu jalannya persidangan.





# BAB VI

## PENGAWASAN

### A. Internal.

#### 1. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu:

##### a. Pengawasan Melekat

Istilah pengawasan melekat (waskat) pertama kali muncul dalam Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/46/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bahwa pengawasan melekat merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern, selanjutnya disebut WASKAT adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Segala sumber daya dimanfaatkan, dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Melekat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Adanya monitor CCTV di ruang Kepala untuk mengawasi seluruh anggota;
- 2) Kegiatan apel pagi dan apel siang/sore yang mana pengambil apel dilakukan oleh Kepala, Wakil Kepala, Hakim Militer Tinggi dan Pejabat Struktural secara bergilir untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota;
- 3) Kegiatan Jam Komandan setiap awal bulan;
- 4) Survei atau pengawasan yang dilakukan oleh Kepala / terhadap kegiatan pegawai dan kebersihan ruangan.

#### Pelaksanaan apel pagi bersama Dilmilti III Surabaya & Dilmil III-12 Surabaya



#### b. Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah Pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik di bidang Perkara maupun Kesekretariatan dengan metode *interview* dan pemeriksaan dokumen serta Pengawasan Bidang Teknis Yustisial dan Pengawasan Bidang Non Teknis Yustisial, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa program kerja;
- 2) Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaanprogram kerja;
- 3) Memberikan saran-saran untuk perbaikan;
- 4) Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
- 5) Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Pertama atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.

Untuk melaksanakan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menunjuk para Hakim Tinggi untuk mengawasi bagian-bagian

guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 259/KPMTW3.Mil/PW1.1/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yaitu:

- 1) Kolonel Kum Dr. Tri Ahmad, B S.H.,M.H. NRP 520883, jabatan Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Koordinator Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya,
- 2) Kolonel Kum M Idris, S.H.,M.Hum. NRP 524413 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan,
- 3) Kolonel Chk (K) Prastiti Siswayani, S.H NRP 11960026770670 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Kebersihan, Kerapihan dan Ketertiban,
- 4) Kolonel Kum Immanuel Pancasila, S.,S.H.,M.Si, NRP 520868 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Keuangan
- 5) Kolonel Laut (H) Agus Budiman S, S.H., M.H NRP 12365/P jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Disiplin Kinerja Kepegawaian,
- 6) Kolonel Chk Agus Husin, S.H.,M.H.NRP 636562 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Perpustakaan dan Arsip,
- 7) Kolonel Laut (H) Riza Fadilah, S.H., NRP 13149/P jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Administrasi Perkara,
- 8) Kolonel Chk Sahrul, S.H.,M.H. NRP 11980031941273 jabatan Pokkimmilti Gol IV Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai Hakim Militer Tinggi Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.

Dalam sebuah instansi atau organisasi, perlu adanya pengawasan, baik pengawasan internal dan pengawasan eksternal. kegiatan dari pengawasan itu sendiri berfungsi untuk mengaudit, mereviu, mengevaluasi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya melaksanakan pengawasan pembinaan baik internal dan eksternal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri serta Pengadilan di jajaran Wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## **2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya.**

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2024 yaitu:

### **a. PENGAWASAN BIDANG**

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/43/KEP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas. Yang selanjutnya dilakukan

perubahan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01 / KPM.W3.Mil01 / OT1.6 / IX / 2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2023.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **1) Pengawasan Bidang Keuangan**

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

- a) Terjadinya pergantian Bendahara terhitung mulai tanggal per 1 Maret 2024 namun belum dilakukan penggantian nama Bendahara pada Aplikasi SAKTI.
- b) Adanya kekosongan jabatan Pengelola BMN.
- c) Masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran semester 1 untuk Dipa 01 maupun Dipa 05

#### **2) Pengawasan Bidang Teknologi Informasi Dan SIPP**

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah:

- a) Laporan perkara di Aplikasi SIPP belum sinkron dengan laporan perkara di google Drive.
- b) Bandwidth pada seluruh access point kantor disetting unlimited

#### **3) Pengawasan Bidang Kepegawaian**

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang kepegawaian adalah :

- a) Kosongnya jabatan Panitera Muda Pidana, Panitera muda Hukum dan Kasubbag PTIP.
- b) Adanya kekosongan jabatan Pengelola BMN.
- c) Adanya permohonan /usul anggota untuk mengikuti pendidikan Secapa dan Secaba bagi anggota TNI

#### **4) Pengawasan Bidang Administrasi Umum**

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang administrasi umum adalah :

- a) Ruang arsip berkas di Gudang bawah sudah di skat tetapi masih belum tertata rapi dan masih terlihat bertumpuk karena arak arsip sudah penuh.
- b) Penataan tempat parkir kendaraan Roda Dua, Roda 4 milik Karyawan/pegawai dan milik Pengunjung/Tamu masih menjadi satu tempat
- c) Inventarisir terhadap pemegang barang/BMN masih ditemukan belum adanya surat penyerahan tanggung jawab kepada personil pemegang barang BMN tersebut.
- d) Tidak adanya ruang saksi yang memadai.
- e) Kurangnya kerapihan dan kebersihan kantor

#### **5) Pengawasan Bidang Perkara**

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

Masih terdapat BAS yang belum selesai tepat waktu.

#### **6) Pengawasan Bidang Pelayanan Publik**

pada Pengawasan Bidang Pelayanan Publik tidak ada Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik.

### **3. Pengadilan Militer III-13 Madiun**

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya yang sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai kawal depan (Provost) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada dasar kebijakan pengawasan meliputi sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan jo.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan dibawahnya.

Adapun empat hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah:

- a. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:

- a. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan Para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial



maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-13 Madiun.

- b. Hakim Pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
- c. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat pengadilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
- d. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- e. Memberi sanksi jika terdapat personel baik militer maupun ASN yang melanggar disiplin

Pada tahun 2024 telah dilakukan pengawasan bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dilaksanakan oleh Para Hakim Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 200/KPM.W3-MIL02/KP7.1/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-13 Madiun, daftar nama-nama Hakim tersebut antara lain:

- a. Mayor Kum Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. NRP. 535951 Waka Dilmil III-13 Madiun sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- b. Mayor Chk Asep Hendra Andriyanto, S.H. Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik.
- c. Mayor Chk Nurdin Rukka, S.H., M.H. NRP 21950070141174 Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Pengadilan, Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan publik.

#### 4. Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Pengawasan Internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu

Pengawasan melekat dan pengawasan rutin yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Keberhasilan Pelaksanaan tugas peradilan amat ditentukan oleh peran aparatur penyelenggaranya. Beberapa kegiatan pokok dalam mencapai program pengawasan aparatur Negara adalah meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan perencanaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai penjuror depan Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 tahun 2016.

Tugas Pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tingkat pertama adalah melakukan Pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi objek Pengawasan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim dan Panitera.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan pengawasan internal, yang meliputi pengawasan melekat dan rutin mengenai :

- a. Manajemen Peradilan
- b. Administrasi Kepegawaian
- c. Administrasi Umum
- d. Administrasi Perkara
- e. Administrasi Persidangan
- f. Administrasi Keuangan

Tujuan diadakannya pengawasan adalah supaya penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan agar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk

perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang dan mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintah yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

- a. Memonitoring tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. Hakim Pengawas bidang yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
- c. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
- d. Mengadakan rapat berkala (Monev) atau Jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- e. Memberi sanksi jika terdapat personil baik Militer maupun PNS yang melanggar disiplin.

Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang penunjukkan Hakim Pengawas Bidang yakni Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 03/KPM.W3-Mil03/SK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang susunannya sebagai berikut :

No	Nama/Pangkat/Korps/NRP	Jabatan	Hakim Pengawas Bidang
1.	Letkol Chk Muhamamad Rizal, SH. MH	Wakil Kepala	Koordinator Hakim Pengawas Bidang
2.	Kolonel Chk (K) Kus Indrawati, SH.	Angpokkimmil Gol. IV	Bidang Perencanaan, TI

	MH.		dan Pelaporan
3.	Letkol Chk I Gede Made Suryawan, SH. MH	Angpokkimmil Gol. V	Bidang Kepegawaian dan Ortala
4.	Letkol Chk Johannes Sudarso Taruk, SH.MH.	Angpokkimmil Gol VI	Bidang Kepaniteraan
5.	Kapten Chk (K) Dianing Lusiasukma, SH., MH.	Angpokkimmil Gol VII	Bidang Umum dan Keuangan Bidang Pelayanan Publik

Tabel V.1 : Kimwasbis

## 5. Pengadilan Militer III-15 Kupang

Pengawasan internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Fungsi pengawasan peradilan dilakukan oleh unit organisasi yang konvensional dan berwibawa yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personelnnya serta peran dalam organisasi Mahkamah Agung.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalkan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Tugas Pokok Pengadilan Militer III-15 Kupang selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan.

Tujuan diadakannya pengawasan adalah :

- a. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/ pengembangan dimasa yang akan datang.
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer III-15 Kupang yaitu :

- a. Bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan,

- b. Bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan
- c. Bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Pengadilan Militer III-15 Kupang melakukan pengawasan internal, yang meliputi pengawasan melekat dan fungsional mengenai :

- a. Manajemen Peradilan,
- b. Administrasi Kepegawaian,
- c. Administrasi Umum,
- d. Administrasi Perkara,
- e. Administrasi Persidangan,
- f. Administrasi Keuangan.

Pembinaan Pengawasan oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang Tahun 2024 telah dilaksanakan antara lain :

- a. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-15 Kupang.
- b. Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera / Sekretaris dan jajarannya.
- c. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
- d. Mengadakan rapat berkala/Jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- e. Memberi sanksi jika terdapat personil baik militer maupun PNS yang melanggar disiplin.

Pembinaan Pengawasan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Satuan Kerja Tingkat atas Tahun 2024 telah dilaksanakan antara lain :

- a. Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 28 – 30 Mei 2024 Oleh Kepala Pengadilan Militer Utama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., beserta tim yang terdiri dari Sekretaris Pengadilan Militer Utama Ibu Nur Atiah, S.H., M.H., dan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Utama Letnan Kolonel Chk Ata Wijaya, S.H., M.H.

- b. Pembinaan dan Pengawasan pada tanggal 21 – 24 Oktober 2024, Oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Brigjend TNI Dr. Eron Sinambela, S.S, S.H., M.H., bersama tim yang terdiri dari Hakim Militer Tinggi Kolonel Laut (H) Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., dan Kasubbag Keuangan dan Pelaporan Tubagus Maulana A. Darma, S.H., M.H.

## **6. Pengadilan Militer III-16 Makassar**

Pengawasan internal merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak menghadapi kendala. Harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai benteng keadilan tidak sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak, hal ini terbukti dengan masih banyaknya kritik dan sorotan yang ditujukan terhadap lembaga peradilan.

Masyarakat mengkritik bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya menempatkan diri sebagai lembaga yang dapat memberikan pelayanan keadilan sebagaimana yang diharapkan, lambat dalam menangani perkara, biaya dirasakan mahal, adanya perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) yang dianggap tercela. Banyak kritik yang dialamatkan terhadap lembaga peradilan tersebut bagaimanapun tidak terlepas dari kinerja lembaga peradilan selama ini. Terlebih lagi, era reformasi memerlukan keterbukaan (transparansi), profesionalisme serta demokrasi disegala bidang termasuk di lembaga peradilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas peradilan amat ditentukan oleh peran penyelenggara negaranya. Beberapa kegiatan pokok dalam mencapai program pengawasan aparatur Negara adalah meningkatkan kualitas informasi sistem pengawasan yang dipadukan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan/pengendalian pelaksanaan dan pelaporan.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendaikan agar tugas tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7,8 dan 9 Tahun 2016.

Tugas Pokok Pengadilan Militer III-16 Makassar selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam tingkat pertama adalah

melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk peningkatan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan diadakannya pengawasan adalah:

- a. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar yaitu :

- a. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para-Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-16 Makassar.
- b. Hakim pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera atau Sekretaris dan jajarannya.
- c. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
- d. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan (monitoring dan evaluasi) setiap 1 (satu) bulan sekali.



- e. Memberi sanksi jika terdapat personel baik Militer maupun PNS yang melanggar disiplin.

Salah satu bentuk pengawasan internal yang sangat membantu dalam monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yang berkaitan erat dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan. Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer III-16 Makassar pada Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar, yaitu:

Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: 18/KPM.W3Mil05/SK.PW1.1/II/2024. tanggal 1 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

## **7. Pengadilan Militer III 17 Manado**

Pengawasan merupakan pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan Rutin/Reguler yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

### **a. Pengawasan Melekat**

Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Pengawasan Rutin/Reguler**

Pengawasan Rutin/Reguler merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer III-17 Manado dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik di bidang perkara maupun kesekretariatan.

Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai kawal depan (Provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Adapun tiga hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-17 Manado yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim

dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah:

- a. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga tujuan pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado yaitu :

- a. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik didalam Pengadilan Militer III-17 Manado.
- b. Hakim Pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawsan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan militer III-17 Manado, yang kemudian hasil pengawsan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
- c. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat pengadilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
- d. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- e. Memberi sanksi jika terdapat personel baik militer maupun ASN yang melanggar disiplin.

Salah satu bentuk pengawasan internal yang sangat membantu dalam monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan yang berkaitan erat dengan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

## 8. Pengadilan Militer III-18 Ambon

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian.

Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak menghadapi kendala. Harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agar benar-benar dapat menempatkan dirinya sebagai benteng terakhir belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak. Hal ini terbukti dengan masih banyak kritik dan sorotan yang ditujukan terhadap lembaga peradilan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana kerja yang telah ditentukan. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai penjuror depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan senantiasa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI dalam hal ini PERMA 7, 8 dan 9 Tahun 2016.

Di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu :

- a. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental dalam pelaksanaan tugas.
- b. Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon
- c. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
- d. Mengadakan Monev/Jam Komandan setiap bulan pada minggu pertama.
- e. Memberi sanksi jika terdapat personel baik Militer maupun ASN yang melanggar disiplin.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 70/KPM.W3-Mil07/SK/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2024.

Adapun objek pengawasan yaitu Bidang Manajemen Peradilan, Bidang Administrasi Persidangan, Bidang Administrasi perkara, Bidang Administrasi umum, dan Bidang Kinerja Pelayanan Publik.

Berdasarkan Perintah Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 60/KPM.W3-MIL07/SPRIN/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 tentang, Perintah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan di Masmil IV Makasar.

Tim Pengawas dan Pengamat ini melaksanakan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan IV (Iemasmil) Makasar mulai tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024, dengan metode ; Wawancara dan Pemeriksaan Lapangan atau Kondisi fisik sel Tahanan, dan Hasil Pengawasan dan Pengamatan tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

## **9. Pengadilan Militer III-19 Jayapura**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang pengawasan dan pembinaan langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya.

Pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tahun 2024 berbentuk pembinaan Sumber daya manusia bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial serta etika aparatur peradilan yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Rutin / Jam Komandan yang dilakukan rutin setiap sebulan sekali.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pengawasan bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura Sesuai dengan Surat Keputusan kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 10/KPM/SK/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim tersebut antara lain :

- a. Letkol Chk Panjaitan Hotman M.T., S.H., M.H. NRP. 11000022761076 Jabatan Waka Dilmil III-19 Jayapura sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.

- b. Mayor Chk Ardiansyah, S.Pd.I., S.H., M.H. NRP. 11080095210883 Jabatan Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-19 Jayapura sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- c. Letkol Chk M. Arif Sumarsono, S.H., M.H NRP. 11020006580974 Jabatan PokKimmil Gol V dan Kapten Chk Aditya Wicaksono, S.H NRP. 1100004840584 Jabatan PokKimmil Gol VII pada Dilmil III-19 Jayapura sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksa Administrasi Perkara
- d. Mayor Chk Hengky Afandi, S.H., M.H NRP.11040016470180 Jabatan Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-19 Jayapura sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksaan Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik.
- e. Kapten Chk James C.D Tetelepta, S.H NRP. 11080105450585 Jabatan Pok Kimmil Gol VII sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksaan Administrasi Persidangan.
- f. Mayor Chk Iskandar, S.H., M.H NRP. 21960346030574 Jabatan Pok Kimmil Gol VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Pemeriksa Keuangan, PBJ dan BMN.

## B. EVALUASI

### 1. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Secara prinsip bahwa terhadap hasil Pengawasan dari seluruh pejabat struktural dan para Hakim Pengawas bidang tersebut ditindak lanjuti melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Temuan dari para Pejabat Struktural dalam melaksanakan pengawasan melekat secara umum hasilnya langsung ditindak lanjuti oleh masing-masing unsur terkait terkecuali untuk masalah-masalah tertentu dibawa terlebih dahulu dalam forumrapat bulanan yang diselenggarakan minimal satu bulan satu kali.
- b. Pada saat para Hakim Pengawas Bidang menemukan temuan-temuan atau masalah-masalah sesuai bidang pelaksanaan tugasnya, maka hakim Pengawas bidang tersebut pada saat itu langsung memberikan arahan/bimbingan kepada pelaksana dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi.
- c. Seluruh hasil temuan dari masing-masing Hakim Pengawas bidang dilakukan eksphose yang dipimpin Kepala Pengadilan Militer III Surabaya Pengawasan kepada seluruh Pegawai, untuk menyikapi masalah-masalah tertentu, maka kadilmilti III Surabaya mengambil Kebijakan-kebijakan khusus.

- d. Para Hakim Pengawas bidang selalu melakukan monitoring tindak lanjut hasilPengawasan.

## 2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.

### a. EVALUASI PENGAWASAN BIDANG

#### 1) Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a) Akan segera dikoordinasikan dengan KPPN Surabaya II terkait penggantian tersebut. Serta melengkapi dokumen- dokumen data dukung yang diperlukan.
- b) Akan dilakukan Baperjakat Internal untuk Pengelola BMN agar dapat fokus dan optimal dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.
- c) Agar segera direalisasikan untuk rencana kontrak yang telah disusun dan akan melakukan revisi pergeseran anggaran ke pos-pos yang diperlukan.

#### 2) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi dan SIPP

Dari hasil pengawasan di bidang TI dan SIPP, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu:

- Majelis Hakim dan Panitera Pengganti diharapkan bisa bekerjasama dalam mengupload putusan di Aplikasi SIPP.

#### 3) Evaluasi Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan di bidang kepegawaian, selanjutnya

dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu:

- a) Perlu penambahan personil Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Kasubbag PTIP agar perkara dapat diselesaikan tepat waktu.
- b) Akan dilakukan Baperjakat Internal untuk Pengelola BMN agar dapat fokus dan optimal dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing.

#### 4) **Evaluasi Bidang Administrasi Umum**

Dari hasil pengawasan di bidang administrasi umum, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a) Agar segera dilakukan pengadaan tempat dan Rak Arsip agar berkas-berkas yang sudah dalam usia tua/lama bisa di tempatkan di ruang tersendiri dengan di disusun /disimpan dengan rapi.
- b) Agar segera dibuatkan tempat Parkir tersendiri dan dipisahkan antar parkir kendaraan baik Roda 4 maupun Roda 2 Milik pegawai/Karyawan dengan parkir kendaraan pengunjung dengan di beri tanda khusus.

#### 5) **Evaluasi Bidang Perkara**

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- Masih adanya BAS yang belum selesai tepat waktu mengakibatkan hambatan pada minutasi yang berakibat pada kecilnya nilai capaian SIPP. Untuk mengatasi hal ini, Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim memonitor dan mendorong terlaksananya penyelesaian BAS secara tepat waktu.

#### 6) **Evaluasi Bidang Pelayanan Publik**

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a) Adanya kekosongan petugas di meja PTSP pada saat jam kerja disebabkan kurangnya jumlah pegawai. Untuk mengatasi hal ini, akan disusun kembali jadwal piket petugas PTSP.
- b) Pengisian survei yang belum maksimal disebabkan karena rusaknya e-kios sebagai perangkat untuk menampilkan aplikasi



pengisian survei. Sebagai solusi, aplikasi survei dijadikan satu dalam perangkat yang sama dengan buku tamu elektronik. Hal ini menyebabkan pengunjung tidak mengetahui keberadaan aplikasi survei tersebut, sehingga pengunjung tidak dapat mengisi survei.

**b. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI**

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2024 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

**c. EVALUASI PENERAPAN SPIP**

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

**d. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)**

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2024 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

**3. Pengadilan Militer III-13 Madiun**

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.

#### 4. Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk memecahkan masalah. Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Metode evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dirancang telah dijalankan dan untuk mengidentifikasi kendala dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, untuk kemudian dicari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari. Evaluasi yang telah dilakukan yaitu :

##### a. Evaluasi Pengawasan Bidang

###### 1) Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2024 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

###### 2) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi

Dari hasil pengawasan di bidang TI, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- a) Agar server ataupun alat pengolah data tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perawatan rutin tetap dijalankan sesuai anggaran yang ada, selain itu SDM yang menggunakan perangkat-perangkat ini juga harus membekali diri dengan pengetahuan yang memadai tentang penggunaan perangkat-perangkat TI.
- b) Dengan penambahan bandwidth yang telah dilakukan, agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Bagian IT agar tetap memonitor kelancaran akses internet.

###### 3) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu

:

- a) Aplikasi SIPP harus selalu dimonitor dan diupdate agar aplikasi SIPP tetap berjalan dengan baik.
- b) Tidak adanya anggaran (Wasmal) dalam pengawasan terhadap terpidana.

#### 4) **Evaluasi Bidang Keuangan**

Dari hasil pengawasan di bidang Keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu agar belanja barang (52) dapat terserap optimal maka perlu dimonitor pembelanjanya dalam buku pengawasan anggaran, sehingga dapat direncanakan penarikan dananya agar terserap maksimal.

#### 5) **Evaluasi Bidang Personel**

Dari hasil pengawasan di bidang Personel, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

:

- a). Agar bagian kepegawaian dapat segera membuat laporan dalam jabatan fungsional yang masih ada untuk dapat difungsikan dan melakukan pelaksanaan Penilaian Bagi Pegawai PPNPN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya kepada seluruh Anggota PPNPN Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b). Perihal masih kurangnya jumlah tenaga pada Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas masih ada yang rangkap jabatan, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu agar bagian kepegawaian menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan kepada Mahkamah Agung untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud.

#### b. **Evaluasi Penanganan Gratifikasi**

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2024 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik dan Penerapan aturan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

#### c. **Evaluasi Penerapan SPIP**

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer

III-14 Denpasar. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

**d. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)**

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2024 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

**e. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan**

Dengan tidak adanya kejadian yang membutuhkan penanganan untuk mengatasi benturan kepentingan selama tahun 2024, maka dapat dinyatakan bahwa standar pelayanan publik yang diberlakukan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

**5. Pengadilan Militer III-15 Kupang**

Pada tahun Anggaran 2024 pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-15 Kupang selalu berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan Teknis dibidang Administrasi Perkara, Administrasi Umum dan Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian secara teknis dan Non teknis telah dilaksanakan dan menjadi beban tanggung jawab masing-masing Sub Bagian sesuai dengan jabatan, tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-15 Kupang dibidang urusan perkara telah berjalan dengan baik dan penyelesaian perkara dapat diselesaikan di bawah waktu yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Satker Pengadilan Militer III-15 Kupang tetap mengacu pada sistem yang ada dan Struktur Organisasi yang ditetapkan, sehingga penerapannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana yang tercantum dalam Visi dan Misi untuk mewujudkan Pengadilan Militer III-15 Kupang Yang Agung.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung teknis lainnya secara personal merupakan Aset yang sangat penting demi terwujudnya sistem kerja yang baik dan berkualitas.

**6. Pengadilan Militer III-16 Makassar**

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan dan tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah Putusan Pidana Penjara yang telah di jatuhkan dalam persidangan di Pengadilan Militer dengan hukuman penjara telah di laksanakan penahanannya secara fisik sebagai Terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar sebagaimana mestinya dan dapat memperoleh data yang nyata/faktual atas pelaksanaan Pidana yang di jatuhkan yang pelaksanaan pidananya di lakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Militer Makassar.

**7. Pengadilan Militer III 17 Manado**

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-17 Manado.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.

**8. Pengadilan Militer III-18 Ambon**

Secara prinsip bahwa terhadap hasil pengawasan dari seluruh pejabat pengawasan pada masing-masing bagian tersebut ditindak lanjuti melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan/ Jam Komandan sebagai berikut :

- a. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok di bagian Kepaniteraan, mencakup Administrasi Perkara, Manajemen Peradilan dan administrasi persidangan.

- b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok di bagian kesekretariatan yang mencakup bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, serta bidang Umum dan keuangan.
- c. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok di bagian Kesekretariatan yang mencakup bidang Kepegawaian dan Ortala serta Bidang Pelayanan Publik.

## 9. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Analisa dan evaluasi di bidang perkara dilaksanakan dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura, jenis dan jumlah tindak pidana maupun pelaku dari tindak pidana tersebut yang terjadi di wilayah hukum berada dalam wewenangnya, melaksanakan inventarisasi laporan penyelesaian perkara, Mengawasi dan memonitor dari kemungkinan-kemungkinan terjadi penyalahgunaan keuangan. Memonitor Setiap saat pada pelaksanaan apel pagi dan apel sore secara langsung serta memberi masukan kepada Dilmiltama setiap personel yang akan UKP (Usulan Kenaikan Pangkat). Dan Memberi teguran kepada semua personel yang melakukan kesalahan/pelanggaran bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan, sebagai masukan dan bahan pertimbangan satuan Atas.

### Kondisi Lingkungan Strategis

Sebagai dasar perumusan dan pelaksanaan program pembangunan kearah perbaikan sesuai dengan tuntutan masa depan maka perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam kondisi Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyangkut Kekuatan dan Kelemahan sebagai berikut :

- a. Kekuatan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang meliputi :
  - 1) Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan TUPOKSI.
  - 2) Adanya semangat kerja, disiplin Personil dan jiwa korsa yang tinggi.
  - 3) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan peranan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- b. Kelemahan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang meliputi:
  - 1) Kualitas SDM baik khususnya di bidang IT belum memadai dan kurangnya pengembangan karir untuk jajaran Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
  - 2) Keterbatasan jumlah personil yang harus mengkafer pekerjaan pada jabatan yang kosong sehingga kinerja personil Dilmil III-19 Jayapura belum berjalan sesuai SOP.

- 3) Bimtek hanya terbatas pada bagian kepaniteraan, keuangan dan IT saja, namun pada bagian kepegawaian, ortala belum ada sehingga belum adanya kesamaan pola pikir dan produk yang dihasilkan. Anggaran DIPA yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura tidak sesuai dengan TOR dan RAB yang telah diajukan pada saat pengajuan Anggaran.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Jajarannya telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan juga sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai dan sarana prasarana. Untuk lebih berhasil guna dan berdaya guna Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya telah membuat Program Kerja Tahunan dan rincian tugas setiap pegawai dengan membagi habis semua Pekerjaan

Hambatan yang masih dirasakan adalah secara Kualitatif dan Kuantitatif Sumber Daya Manusia yang masih perlu terus ditingkatkan kemandirian maupun tanggung jawabnya.

#### B. Rekomendasi

Hendaknya peningkatan Skill (kemampuan tugas) para Pegawai/Pejabat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan jajarannya dapat terus diupayakan Kualitas dan Kuantitasnya melalui kegiatan Diklat, Sosialisasi dan Bimtek.

Untuk lebih memantapkan Fungsi-fungsi pelayanan kepada pencari keadilan kita tingkatkan Profesionalisme dan mengembangkan keteladanan

Agar ditambah Pegawai/TNI tertentu terutama bidang teknis Kepaniteraan (pengolah data dan Panitera Pengganti) dan Administrasi Umum (pengolah data bidang umum dan Kepegawaian serta Tenaga IT).

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer Tinggi III dan Pengadilan Militer se wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun Anggaran 2024 telah di susun dan di pertanggungjawabkan atas Penetapan Kinerja dan DIPA TA 2024, Berbagai kendala dan persoalan yang di hadapi dan telah di sampaikan dan mohon satuan Atas memberikan petunjuk dalam rangka peningkatan Kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Pengadilan Militer se- wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sidoarjo, 31 Januari 2025  
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.  
Brigadir Jenderal TNI